



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
MENGHADAPI ANCAMAN PAHAM ANARKO SINDIKALIS  
DALAM PERSPEKTIF PEPERANGAN ASIMETRIS  
(STUDI KASUS HARI BURUH 2019 DI KOTA BANDUNG)**

**TESIS**

**TALOLO MUARA  
120190102014**






**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS  
JAKARTA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Talolo Muara
NIM	: 120190102014
Program Studi	: Peperangan Asimetris
Fakultas	: Strategi Pertahanan
Judul Tesis	: Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019 di Kota Bandung)
Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Yusuf, S.Sos., MM Brigadir Jenderal TNI Tanggal: 17 Februari 2021	Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. Letkol Inf/ NRP 34148 Tanggal: 17 Februari 2021
Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan  Dr. Deni D.A.R., S.Sos., M.Si (Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal:	

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	: Talolo Muara		
NIM	: 120190102014		
Program Studi	: Peperangan Asimetris		
Fakultas	: Strategi Pertahanan		
Judul Tesis	: Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019 di Kota Bandung)		
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Pembimbing I:</b> Dr. Yusuf, S. Sos., MM Brigadir Jenderal TNI		17 Februari 2021
2.	<b>Pembimbing II:</b> Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. Letkol Inf/ NRP. 34148		17 Februari 2021
3.	<b>Reviewer I:</b> Dr. Moch. Afifuddin, S.E., MM., M.Si (Han)., CIQnR Brigadir Jenderal TNI (Purn.)		17 Februari 2021
4.	<b>Reviewer II:</b> Dr. Drs. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., MM., CIQaR Kolonel Caj (Purn.)		17 Februari 2021
5.	<b>Reviewer III:</b> Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si.		17 Februari 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2021



Talolo Muara

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan karunia Nya sehingga tesis berjudul **“Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019 di Kota Bandung)”** dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pertahanan pada program studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Secara tertulis, peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan skripsi baik langsung maupun tidak langsung. Banyak hambatan yang dihadapi peneliti terutama sulitnya melaksanakan penelitian dan ruang gerak yang terbatas akibat Pandemi Covid-19. Namun, berkat dari Tuhan, orang tua, saudara, narasumber, dan semua pihak yang bersedia membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dengan ketulusan hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR selaku rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
2. Mayjen TNI Dr. Deni D. A. R., S.Sos., M.Si (Han) selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.
3. Brigjen TNI Dr. (Cand) Sammy Ferrijana, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia
4. Letkol Laut (K) Dr. Anwar Kurniadi., S.Kp., M. Kep. selaku Sekretaris Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

5. Kolonel (Caj) Dr. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., MM., CIQaR selaku Sekretaris Prodi Peperangan Asimetris sebelumnya yang telah mendukung peneliti selama perkuliahan dan proses penyusunan tesis.
6. Brigjen TNI Dr. Yusuf, S.Sos., MM selaku pembimbing I yang telah mendukung proses penyusunan tesis dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
7. Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. selaku pembimbing II yang telah mendukung proses penyusunan tesis dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
8. Orang tua peneliti, Sahata Purba dan Pintauli Siregar dan adikku Indah Sari Purba yang selalu mendukung dalam penyelesaian tesis.
9. Laksda Dr. Suhirwan, S.T., M.MT., CIQnR., CIQaR; Brigjen Dr. Pujo Widodo., S.E., MA., M.DS., M.Si., M.Si (Han); dan Kolonel Caj Dr. Surryanto Djoko Waluyo M.H., MM., CIQaR selaku reviewer pada Seminar Proposal Tesis yang memberikan arahan terkait perbaikan proposal tesis dan langkah penelitian di lapangan.
10. Laksda Dr. Suhirwan, S.T., M.MT., CIQnR., CIQaR; Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si.; dan Kolonel Caj (Purn.) Dr. Surryanto Djoko Waluyo M.H., MM., CIQaR selaku reviewer pada Seminar Hasil Penelitian yang memberikan arahan terkait pengolahan data penelitian.
11. Brigjen (Purn.) Dr. Moch. Afifuddin, S.E., MM., M.Si (Han)., CIQnR; Kolonel Caj (Purn.) Dr. Surryanto Djoko Waluyo M.H., MM., CIQaR; dan Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si selaku reviewer sidang akhir tesis yang memberikan arahan perbaikan untuk keseluruhan komponen tesis.
12. Teman-teman seperjuangan AW Cohort 8: Bang Rahman, Agus, Mas Angga, Azizah, Mas Ferga, Ilham, Mas Irfan, Ken, Oni, Pak Rofik,

Mbak Risa, Fida, dan Wada. Sukses dan semoga mencapai yang dicita-citakan buat kita semua.

13. Terima kasih untuk narasumber penelitian Pak Anto, Pak Aan, Pak Dedi, Pak Erry, Pak Sefi, Pak Dadang Sobandi, Pak Muradi, Pak Endang, Pak Muradi, Pak Roy Jinto, Pak Iyus, Bang Ando, Mas Fikri, Mas Zani, dan Febri, dan kawan-kawan yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, peneliti sangat menerima kritik, saran, dan masukan untuk menjadi evaluasi bagi peneliti dalam penyusunan karya ilmiah berikutnya. Peneliti berharap tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang ingin menelitinya lebih lanjut dan perkembangan ilmu pertahanan dan peperangan asimetris. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.

Shalom. Tuhan Yesus Memberkati.

Bogor, 22 Februari 2019



Talolo Muara

**ABSTRAK**  
**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**MENGHADAPI ANCAMAN PAHAM ANARKO SINDIKALIS DALAM**  
**PERSPEKTIF PEPERANGAN ASIMETRIS**  
**(STUDI KASUS HARI BURUH 2019 DI KOTA BANDUNG)**

**TALOLO MUARA**

Aksi damai demonstrasi buruh di kantor pemerintahan Jawa Barat diciderai oleh aksi vandalisme dan anarkis yang dilakukan aktor anarko sindikalis. Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran provokasi dan narasi anti pemerintah sehingga memunculkan dukungan dari simpatisan massa aksi. Namun demikian, strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam mencegah infiltrasi aktor anarko sindikalis yang menggunakan taktik asimetris. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ancaman anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris dan strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada peringatan hari buruh 2019 di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terbuka dan observasi tersamar, wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anarko sindikalis merupakan ancaman asimetris yang menanamkan sikap anti pemerintah melalui media sosial, vandalisme, dan budaya tren anak muda. Aktor dan simpatisan anarko sindikalisme kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang atau kelompok berkepentingan yang bersebrangan dengan pemerintah karena simpatisan tidak hanya berasal dari buruh tetapi juga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang terpinggirkan. Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui deteksi intelijen, pre-emptive, preventif, penegakkan hukum, dan pemulihan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam menghadapi gerakan anarko sindikalis yang liar, taktik berubah-ubah, dan terbentuknya simpatisan anarko sindikalis tidak terprediksi.

Kata Kunci: asimetris, strategi pemerintah, anti-pemerintah, anarko sindikalisme.

**ABSTRACT**  
**STRATEGY PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA IN FACING**  
**ANARCHO-SYNDICALIST THREAT IN**  
**ASYMMETRIC WARFARE PERSPECTIVE**  
**(CASE STUDY OF MAYDAY 2019 IN BANDUNG CITY)**

**TALOLO MUARA**

*The peaceful demonstration of worker at Government of West Java office was injured with vandalism and anarchism by anarcho syndicalist actor. The development of information technology make it easier to spread of provocation and anti-government narratives thus given rise to mass supported for the action. However, the strategy Provincial Government of West Java has not been effective in preventing the infiltration of anarcho syndicalism using asymmetric tactic. The purpose of this research is to analyze the threat of anarcho syndicalism in asymmetric warfare perspective and the strategy Provincial Government of the West Java in facing the anarcho-syndicalism threat in asymmetric warfare perspective at mayday 2019 in Bandung City. The research method used is a qualitative research method with a case study research design. The technique of data collection was carried out through open and covert observation, semi-structured interviews, and document analysis. The results show that anarcho-syndicalism is an asymmetrical threat that embodied anti-government attitude through social media, vandalism, and youth culture trend. Actor and sympathizers of anarcho syndicalism can be used by interest person or group who opposite with the government because do not only originated from workers but also student, and marginalized communities. The strategy Provincial Government of West Java strategy carried out through intelligence detection, pre-emptive, preventif, law enforcement, and restoration. The conclusion of this research that Strategy Provincial Government of West Java not effective in dealing anarcho syndicalist movement which disorderly, constantly changing. and establishment of anarcho syndicalism sympathizer unpredictable.*

*Keywords: asymmetric, strategy of government, anti-government, anarcho-syndicalism.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Strategi.....	11
2.1.2. Konsep Pertahanan Negara .....	15
2.1.3. Teori Pergerakan Sosial.....	17
2.1.4 Konsep Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	21
2.1.5. Konsep Anarko Sindikalisme .....	28
2.1.6. Konsep Peperangan Asimetris .....	36
2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	38
2.2.1. Penelitian Grendi Hendrastomo (2010) .....	38
2.2.2. Penelitian Muhammad Zuhdan (2014) .....	41

2.2.3. Penelitian Zukhrufah Dien Ardlillah (2017).....	43
2.2.4. Penelitian Victor Jacob Lucas, Djoko Andreas Novalino, dan Moch. Rofiq (2017) .....	44
2.2.5. Penelitian Hery Setyawan dan Mochammad Arif Affandi (2017).....	45
2.3. Kerangka Berpikir .....	54
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1. Metode dan Desain Penelitian .....	56
3.1.1. Metode Penelitian .....	56
3.1.2. Desain Penelitian .....	57
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	57
3.2.1. Tempat Penelitian .....	57
3.2.2. Waktu Penelitian .....	58
3.3. Subjek dan Objek Penelitian .....	60
3.3.1. Subjek Penelitian.....	60
3.3.2. Objek Penelitian .....	64
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.4.1. Observasi Terus Terang dan Tersamar.....	64
3.4.2 Wawancara Semi Terstruktur .....	65
3.4.3. Analisis Dokumen .....	65
3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	66
3.6. Teknik Analisis Data .....	67
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1. Gambaran Objek Penelitian .....	69
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandung .....	69
4.1.2. Gambaran Umum Pemerintahan Jawa Barat .....	74
4.1.3. Gambaran Umum Peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung.....	76
4.2. Hasil Penelitian .....	86
4.2.1. Ancaman Anarko Sindikalisme pada Hari Buruh 2019 di Kota Bandung.....	86

4.2.1.1.	Pelabelan Anarko Sindikalisme.....	86
4.2.1.2.	Anarko Sindikalisme Diminati Kalangan Intelektual dan Masyarakat di Kota-Kota Besar .....	88
4.2.1.3.	Agitasi Politik dan Pengenalan Paham Anarko Sindikalis .....	92
4.2.1.4.	Kegiatan Anarko Sindikalis di Kota Bandung .....	94
4.2.2.	Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Paham Anarko Sindikalis pada Hari Buruh 2019 di Kota Bandung.....	115
4.2.2.1.	Strategi Deteksi Intelijen .....	116
4.2.2.2.	Strategi Preemptive .....	118
4.2.2.3.	Strategi Preventif .....	119
4.2.2.4.	Strategi Penegakkan Hukum .....	120
4.2.2.5.	Strategi Pemulihan .....	123
4.3.	Pembahasan.....	124
4.3.1.	Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Hari Buruh 2019 di Kota Bandung.....	124
4.3.1.1.	Pelabelan Anarko Sindikalis.....	124
4.3.1.2.	Anarko Sindikalis Diminati Kalangan Intelektual dan Masyarakat di Kota-Kota Besar .....	125
4.3.1.3.	Agitasi Politik dan Pengenalan Paham Anarko Sindikalis .....	126
4.3.1.4.	Kegiatan Anarko Sindikalis di Kota Bandung .....	129
4.3.2.	Strategi Pemerintah Jawa Barat dalam Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Hari Buruh 2019.....	131

4.3.2.1. Strategi Deteksi Intelijen .....	131
4.3.2.2. Strategi Pre-emptive .....	132
4.3.2.3. Strategi Preventif .....	132
4.3.2.4. Strategi Penegakkan Hukum .....	134
4.3.2.5. Strategi Pemulihan .....	135
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>137</b>
5.1. Kesimpulan.....	137
5.2. Rekomendasi.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>147</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>150</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI.....</b>	<b>160</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Vandalisme di Kota Bandung pada Hari Buruh 2019.....	5
Gambar 2.1. Poster Jaringan Anti Otoritarian Mayday 2008 .....	33
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir.....	55
Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/ Model Interaktif .....	68
Gambar 4. 1. Peta Kota Bandung .....	70
Gambar 4. 2. Vandalisme Mobil Buruh pada Peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung .....	83
Gambar 4. 3. Penggundulan Massa Aksi pada Peringatan Hari Buruh 2019 di Polrestabes Bandung .....	84
Gambar 4. 4. Kompas Ideologi Politik .....	87
Gambar 4. 5. Lambang Anarko Sindikalis .....	92
Gambar 4. 6. Vandalisme “Mayday Not Holiday” dan “Mayday Bukan Eksistensi tetapi Insureksi.....	92
Gambar 4. 7. Vandalisme di Tembok Rumah Penduduk.....	93
Gambar 4. 8. Vandalisme “Lawan Serikat Elite” di Jembatan Pasopati.....	94
Gambar 4. 9. Penjualan Stiker dan Atribut untuk Dana Kolektif .....	97
Gambar 4.10. Contoh Zine Cucukrowo Mekgejin.....	103
Gambar 4.11. Dokumentasi Pasar Gratis 10 Januari 2021 .....	104
Gambar 4.12. Pembubaran Pasar Gratis oleh Kepolisian di Braga .....	105
Gambar 4.13. Kegiatan Buy Nothing Days 30 Desember 2020.....	105
Gambar 4.14. Vandalisme Kill Konsumerisme .....	106
Gambar 4.15. Capaian Hanya Satu: Masyarakat Tanpa Kelas .....	107
Gambar 4.16. Aksi Kamisan Hari HAM 10 Desember 2020 .....	108
Gambar 4.17. Poster 1 Tahun Penggusuran Tamansari .....	114
Gambar 4.18. Pembongkaran oleh Kontraktor 13 Januari 2021 .....	115
Gambar 4.19. Spanduk Penolakan Aksi Anarkis di Kota Bandung .....	124

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tuntutan Hari Buruh di Bandung 2014-2019 .....	24
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	47
Tabel 3.1. Waktu Pembuatan Tesis .....	59
Tabel 3.2. Informan Penelitian .....	62
Tabel 4.1. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Kota Bandung .....	71
Tabel 4.2. Informasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan di Tahun 2020 (Pertanggal 1 Januari 2021). .....	78
Tabel 4.3. Daftar Pengunjuk Rasa yang diamankan pada Demonstrasi Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019 di Kota Bandung Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..	91

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertahanan Indonesia diselenggarakan dalam sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menghadapi ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Dipersiapkan secara dini merujuk pada pembangunan sistem pertahanan yang berkelanjutan dan terus-menerus untuk menghadapi berbagai ancaman baik militer, non-militer, maupun hibrida. Kemudian, pertahanan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah merujuk pada kesatuan komando sehingga membentuk satu totalitas pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Warga negara beserta kesadaran terhadap hak dan kewajibannya merupakan subjek pertahanan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian bangsa. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter untuk membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat, disegani, dan memiliki daya tangkal tinggi.

Pertahanan Indonesia diimplementasikan secara dinamis sesuai hakikat ancaman baik militer maupun nonmiliter. Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak berbentuk fisik tetapi berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Strategi pertahanan negara dirumuskan dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun non militer yang didasarkan atas tiga substansi pokok yaitu apa yang dipertahankan (*ends*), dengan apa mempertahankan (*means*), serta bagaimana mempertahankan (*ways*) (Kementerian Pertahanan RI, 2015, h. 50). Merespon kondisi lingkungan strategis yang dinamis, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam menentukan kebijakan pertahanan untuk mengoptimalkan kemampuan guna menanggulangi berbagai ancaman.

Perkembangan ancaman non militer salah satunya ditimbulkan oleh penyusupan aktor anarko sindikalisme pada peringatan hari buruh internasional 2019 di Kota Bandung. Anarko sindikalisme merupakan paham yang menginginkan pembubaran seluruh lembaga kekuasaan politik yang dinarasikan menindas dan mengeksploitasi kalangan buruh digantikan komunitas bebas yang terikat oleh kepentingan sosial-ekonomi (Wahyono, 2020). Penganut anarko sindikalisme memandang bahwa pergerakan revolusioner hanya dapat dicapai oleh pekerja yang lepas dari subordinasi pemerintah dan partai politik (Rocker, 2017, hh. 200-202). Akan tetapi, anarko sindikalisme di Indonesia tidak hendak membuat negara sendiri tetapi memandang negara pada fungsi administratif termasuk mematuhi undang-undang dan peraturan. Akan tetapi mengkritik kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat (Nainggolan, 2019). Akan tetapi, ketidaktaatan terhadap hukum dan kericuhan yang dilakukan aktor anarko sindikalisme akan mengakibatkan ancaman keamanan dan keselamatan umum yang apabila tidak diantisipasi akan menjadi ancaman baru bersifat asimetris.

Aktor anarko sindikalisme memanfaatkan cara asimetris untuk menciptakan sikap anti-pemerintah pada peringatan hari buruh 2019. Pada implementasinya, aktor anarko sindikalisme menerapkan konsep peperangan asimetris yaitu menghasut yang lebih lemah/ orang yang terpinggirkan (*unprivileged section*) melalui isu keburukan politik suatu negara, perbedaan kelas, kepercayaan, atau komunikasi untuk membangkitkan anti-pemerintah (Katoch, 2010, p. 96). Pendekatan asimetris aktor anarko sindikalisme yang digunakan meliputi konflik sosial masyarakat, isu buruh, dan perkembangan teknologi. Konflik sosial yang dimanfaatkan yaitu korban penggusuran wilayah Tamansari, pengangguran lulusan perguruan tinggi. Selain itu, buruh juga dirampas haknya untuk hidup sejahtera dan merdeka, kerentanan pelecehan buruh perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak maternitas buruh perempuan dan diskriminasi upah, diskriminasi terhadap buruh yang memiliki ekspresi gender beragam atau orientasi seksual tertentu, keran investasi asing yang merugikan kelas buruh berupa penggusuran, konflik agrarian, PHK massal, liberalisasi dan

komersialisasi pendidikan, dan upah murah (Redaksi KSN, 2019). Kemudian, perkembangan teknologi dilakukan melalui penyebaran informasi yang menarasikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang kemudian digiring untuk melakukan cara-cara anarkis (Bappenas, 2011). Namun demikian, pemerintah kesulitan melakukan deteksi dini karena aktor anarko sindikalisme beroperasi secara sel dan berpindah-pindah.

Anarko sindikalis bergerak secara kolektif. Organisasi anarko berbentuk *adhocracy* sehingga tidak memberi ruang untuk adanya pemimpin struktural tetapi dalam kelompok atau kolektif (Ali, 2013, h.20). Secara struktur organisasi, aktor anarko sindikalisme tidak memiliki ketua ataupun sekretaris jenderal tetapi memiliki kepengurusan fungsional yaitu bendahara dan sekretaris yang bersifat sukarela dan bergantian selama satu atau dua tahun sekali. Anggota anarko sindikalisme kemudian membentuk kolektif yang beranggotakan 5-7 orang. Komunikasi antar anggota umumnya memanfaatkan media sosial terutama *whatsapp* dan email yang intensitasnya tidak rutin (Nainggolan, 2019).

Media pergerakan aktor anarko sindikalis bergeser dari jalanan kepada internet. Pergerakan pemuda didorong oleh keinginan mengubah masyarakat yang didorong oleh keinginan melawan karena ketakutan masyarakat akan hancur karena perbuatan menyimpang atau sikap apatis karena kecewa terhadap masyarakat (Soekanto, 2005, hh. 371-373). Namun demikian, berkurangnya ruang-ruang publik sebagai sarana perkumpulan pemuda akibat pembangunan fasilitas publik dimanfaatkan aktor anarko sindikalis untuk menjaring kalangan pemuda.

Kota Bandung merupakan lokasi strategis dan efektif dalam menggaungkan tuntutan buruh pada momentum hari buruh internasional. Berdasarkan kuantitas, buruh di Kota Bandung relatif sedikit dimana mayoritas berada di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, Kota Bandung bersifat strategis karena ibukota Jawa Barat dan lokasinya berdekatan dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Selain itu, Bandung merupakan tempat pertama berdirinya Front Anti Fasis pada tahun 1995 yang beranggotakan kelompok punk yang merupakan penggerak gerakan sosial dalam memperjuangkan

kesejahteraan buruh. Faktor lainnya yaitu kemudahan dalam mobilisasi massa pasca 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional, isu menarik bagi media, dan disorot secara internasional (Rahmawati, 2019). Oleh karena itu, pemanfaatan buruh yang jumlahnya besar akan berpotensi menjadi ancaman potensial bagi pertahanan negara.

Pergerakan buruh turut bergeser dari gerakan sosial kepada gerakan politik. Berdasarkan konsep New Labour, buruh tidak hanya berfokus pada masalah upah atau hubungan industrial, tapi juga melangkah ke isu-isu yang bersifat politik praktis maupun politik makro (Zuhdan, 2014). Hal ini ditandai dengan keberpihakan buruh terhadap salah satu calon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandung 2018, dan pada tahun 2019 mendorong adanya perwakilan buruh di parlemen baik ditingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Serikat Buruh juga diasumsikan mulai bergabung dengan pemerintah pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Serikat Buruh yang mengakibatkan tuntutan buruh relatif melunak pada tahun 2019. Akan tetapi, kondisi ini meresahkan bagi aktor anarko sindikalisme karena gerakan melalui parlemen merupakan perjuangan terlemah dan tanpa harapan karena tidak memberikan perlindungan terhadap buruh dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Rocker, 2017, hh. 108-121).

Pada peringatan hari buruh 2017-2019, tuntutan massa aksi cenderung diimplementasikan melalui cara-cara anarkis. Kondisi ini berbeda dengan pada masa awal penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional tahun 2014 dimana tuntutan buruh dilakukan melalui cara damai dan kondusif. Pada tahun 2017 terjadi aksi vandalisme, pembakaran, perusakan fasilitas umum, dan kericuhan yang diinisiasi oleh pemuda Kolektifa yang menggunakan atribut hitam-hitam (Tempo.co, 2017). Aksi ini kembali terulang pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh kelompok Gerakan Rakyat Anti Kapitalisme (GERAK) melalui penyebaran poster di media sosial *instagram* dan *facebook* (Pratiwi, 2018). Kemudian tahun 2019, aksi serupa terjadi dinyatakan dilakukan oleh aktor anarko sindikalisme. Namun demikian, aksi kekerasan justru terjadi pasca Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pada tahun 2016 bahwa kalangan buruh tidak

pernah melakukan aksi anarkis pasca 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional (Fardiansyah, 2016).

Aktor anarko sindikalisme menciderai aksi damai hari buruh 2019 di Kota Bandung. Massa aksi melakukan aksi vandalisme di beberapa lokasi diantaranya Sekolah Luar Biasa (SLB)-C Plus di Jalan Singaperbangsa, Taman Dago, dan juga mencoret-coret 25 kendaraan milik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat. Simbol "A" merujuk pada *no rule* terhadap aturan yang dibuat oleh kaum borjuis, bangsawan, dan negarawan (Nainggolan, 2019). Berdasarkan konsep anarko sindikalisme, perusakan fisik bukanlah dilihat dari tingkat keparahannya, tetapi kemampuan mempengaruhi siklus kapital dan psikologi pasar (Putra, 2018, h.230). Namun demikian, aksi kekerasan dianggap efektif berkaca dari kerusuhan total di Kota Bandung selama tiga hari berturut-turut pada tahun 2001 yang berhasil memaksa pemerintah Jawa Barat untuk memberlakukan kembali Kepmenaker No. 150/Men/2000 (Tim Peneliti SMERU, 2002).



**Gambar 1.1. Vandalisme di Kota Bandung pada Hari Buruh 2019**

Sumber: Dinillah (2019)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Program *Demo Creation Labour* yang bertemakan *Mayday is Creative Day, Together We Grow*. Tujuannya yaitu mengubah paradigma hari buruh rusuh dengan konsep yang kreatif melalui kegiatan lomba dan tetap dapat berbincang tentang solusi permasalahan buruh (Humas Bappeda Jabar, 2019). Berdasarkan perspektif peperangan, aktor anarko sindikalisme selaku pihak yang lebih lemah cenderung unggul dalam mobilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi pemerintah yang

cenderung mempertahankan kondisi tetap dan sifat organisasi yang konservatif (Thornton, 2011, p. 3). Akan tetapi, program *Demo Creation Labour* tidak efektif karena serikat buruh tetap melakukan aksi unjuk rasa di gedung sate yang akhirnya disusupi oleh aktor anarko sindikalis.

Koordinasi Kepala Daerah diwadahi melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Jawa Barat. LKS Jawa Barat berdiri sejak 17 Juli 2018 yang menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah, industri, dan buruh. Pemerintah Jawa Barat menegaskan keberpihakan terhadap kesejahteraan buruh melalui pembuatan perumahan buruh dan sekolah di dekat pabrik serta pemberian kursus kepada putra daerah (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019). Namun demikian, kelompok anarko memandang serikat pekerja/buruh tidak diperlukan karena merugikan bagi buruh, negosiasi seringkali tidak melibatkan buruh, dan tidak memuaskan buruh (Nainggolan, 2019).

Pemerintah Jawa Barat melakukan koordinasi melalui Forkopimda menjelang peringatan hari buruh 2019. Pendekatan cenderung dilakukan melalui pengamanan karena Gedung Sate merupakan lokasi puncak peringatan hari buruh. Strategi yang dilakukan Kepolisian dilakukan melalui Perkap 01 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui deteksi intelijen, preventif, pre-emptive, penegakkan hukum, dan pemulihan. Akan tetapi, strategi kepolisian belum efektif sehingga terjadi kerusuhan di gedung sate yang dilakukan oleh anarko sindikalis.

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung melakukan upaya deteksi dini. Deteksi dini dunia maya penting di era modern karena pengorganisasian anarko sindikalisme cenderung melalui online/media sosial. Kondisi ini berdasarkan pada hasil interogasi kepolisian di Polrestabes Bandung bahwa massa aksi bergerak karena ajakan dari media sosial *whatsapp*, *facebook*, dan *Instagram*, maupun ajakan teman sebagai bentuk solidaritas terhadap buruh. Namun demikian, pengamanan cenderung sulit dikarenakan latar belakang massa aksi yang anti-hierarkis sehingga tidak tergantung pada aktor tertentu, dan fleksibel.

Preemptive dilakukan melalui penangkalan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara stabilitas keamanan dalam negeri. Komunikasi pada era reformasi menempatkan media massa sebagai *public sphere* yang mendorong partisipasi masyarakat. Aktor anarko sindikalisme melakukan agitasi politik dan propaganda aktor anarko sindikalisme yang berperan dalam membangkitkan emosi dan mengontrol sikap individu masyarakat (Pureklolon, 2016, h. 236). Kondisi ini mengakibatkan penggalangan yang dilakukan belum efektif sehingga banyak kalangan simpatisan yang berasal di luar kota Bandung turut datang ke Bandung untuk meramaikan aksi buruh di Gedung Sate dengan menggunakan atribut serba hitam.

Preventif merupakan upaya kepolisian untuk mencegah dan mengeliminir berkembangnya suatu potensi gangguan menjadi ambang gangguan (AG). Polrestabes Bandung mengerahkan personil 1.300 personil untuk mengamankan aksi damai buruh melalui jalan kaki bersama dari titik kumpul di Monumen Perjuangan ke Gedung Sate (Adhey, 2019). Namun demikian, aksi damai buruh tetap dicerca oleh aksi vandalisme bahkan aksi kejar-kejaran antara Tim Prabu Polrestabes Bandung dan pemuda beratribut hitam-hitam (Tim detik.com, 2019).

Penegakkan hukum dilakukan melalui penjaringan massa aksi pada peringatan hari buruh 2019. Polrestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap 619 peserta aksi yang 293 diantaranya merupakan anak-anak dan 14 orang perempuan (Bernie, 2019). Namun demikian, berdasarkan data Polrestabes Bandung, peserta aksi berjumlah 561 orang dan 223 orang diantaranya adalah pelajar. Namun yang dikritisi oleh pelaporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah adanya aksi kekerasan dan intimidasi verbal dari kepolisian (Fisandra, 2019). Aksi represif kepolisian tersebut dipandang sebagai kesewenang-wenangan dan ketidakdewasaan dalam demokrasi. Selain itu, Dosen Sosiologi Fisipol UGM, AB Widyanta justru mendorong pemerintah untuk memberikan ruang bagi gerakan anarko sindikalisme (Lazuardi, 2019, h. 2).

Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam menghadapi ancaman anarko sindikalis. Anarko sindikalis menggunakan taktik asimetris untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui isu tentang konflik sosial maupun isu buruh yang disebarakan melalui media sosial sehingga sulit untuk diantisipasi oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti akan melaksanakan penelitian berjudul **Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Anarko Sindikalisme dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019 di Kota Bandung)**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung?
- b. Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.
- b. Menganalisis strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi keilmuan pertahanan dan referensi penelitian selanjutnya:

- a. menambah hasanah keilmuan pertahanan di bidang peperangan asimetris khususnya kajian ancaman nonmiliter anarko sindikalisme pada momentum hari buruh.
- b. Referensi bagi peneliti selanjutnya terutama penelitian sejenis atau kesamaan fenomena terkait pergerakan sosial kelompok anarko sindikalisme.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan strategi dan kebijakan yang efektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dan gambaran gejala yang kompleks dari gerakan anarko sindikalisme.
- b. Lembaga Pendidikan: penelitian terkait keterlibatan pelajar dalam aksi buruh 2019 dapat dijadikan referensi tenaga pendidik dan dinas pendidikan untuk mengantisipasi adanya pemanfaatan media sosial untuk memobilisasi kalangan terpelajar.
- c. Masyarakat: penelitian ini dapat memberikan kebaharuan informasi terkait gerakan anarko sindikalisme yang melakukan penyusupan dan membuat kerusuhan pada peringatan hari buruh 2019. Kebaharuan informasi ini dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh pihak terkait dan pihak yang hendak mempelajarinya.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori merupakan alur logika atau penalaran berupa konsep, definisi, atau proposisi yang disusun secara sistematis. Teori berfungsi dalam menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala (Sugiyono, 2019, h.54). Selain itu, teori berperan dalam membantu peneliti membuat kerangka berpikir (*framework*) melalui penyajian dan permulaan dalam pencarian permasalahan penelitian.

Peneliti akan dipandu untuk mengidentifikasi faktor yang sangat penting (*crucial*) secara sistematis dan saling berhubungan dengan aspek penelitian. Peneliti menggunakan teori untuk memahami gejala yang kompleks terkait Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi ancaman anarko sindikalisme pada aksi hari buruh (*mayday*) 2019. Oleh karena itu, teori yang digunakan sesuai dengan fenomena yang berkembang di lapangan agar menjadi bekal dalam memahami konteks sosial secara luas dan mendalam.

##### **2.1.1. Teori Strategi**

Strategi memandang lingkungan strategis dari berbagai perspektif yang ada. Pada level negara, strategi didefinisikan sebagai seni atau ilmu dalam mengembangkan dan memanfaatkan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional (Yarger, 2006, pp. 65-66). Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia, strategi berkaitan tiga substansi dasar yaitu apa yang dipertahankan (*ends*), bagaimana cara mempertahankan (*ways*), dan dengan apa mempertahankan (*means*) (Kementerian Pertahanan RI, 2015, h. 50). Strategi tersebut bukan hanya bereaksi terhadap lingkungan strategis tetapi mampu mencari, membentuk, dan mempengaruhi lingkungan masa depan (Yarger, 2006, p. 6).

Keberhasilan atau kegagalan suatu strategi di masa lampau tidak akan terulang kembali secara detail (Dolman, 2005, p. 112). Lingkungan strategis berkaitan dengan VUCA (*Volatile, Uncertain, Complexity, and Ambiguity*).

*Volatile* berkaitan dengan perubahan yang cepat dan eksplosif yang seringkali ditandai dengan kekerasan. *Uncertainty* berkaitan dengan masalah dan ketidakstabilan lingkungan strategis. *Complexity* berkaitan dengan lingkungan yang selalu berubah dan saling terkait satu sama lain. *Ambiguity* berkaitan dengan multi perspektif dan memungkinkan kesimpulan yang beragam walaupun beberapa diantaranya tidak selalu baik (Yarger, 2006, p. 18). Oleh karena itu, ahli strategi membuat strategi perkiraan (*strategy forecast*) dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan strategis baik *what they are* (fakta dan asumsi) dan *how they interact* (observasi, alasan, dan asumsi) dalam dimensi strategi (Yarger, 2006, p. 35). Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerlukan adanya strategi perkiraan di tengah ancaman nonmiliter anarko sindikalisme yang bergerak atas dasar kesejahteraan buruh.

Aksi buruh 2019 yang cenderung kondusif dicerai oleh penyusupan aktor anarko sindikalisme yang melakukan aksi kekerasan, vandalisme dan perusakan fasilitas publik. Anarko sindikalisme merupakan cabang dari anarkisme. Anarkisme merupakan kondisi kelompok tanpa pemimpin dan sulit untuk bekerjasama. Namun demikian, Robert Axelrod mengatakan kerjasama yang dibangun kalangan anarkis dilakukan dengan pengaruh dan kekuatan yang setara. Kemudian, berdasarkan *cooperation theory*, kerjasama yang dibangun setiap individu anarkis tidak mengejar kepentingan sendiri dan tanpa bantuan kekuasaan sentral yang memaksa (Dolman, 2005, p. 54). Oleh karena itu, Axelrod faktor pendorong dari kerjasama adalah interaksi berulang diantara banyak *players* (Dolman, 2005, p. 57). Pada implementasinya, aktor anarkis memiliki pemikiran yang sama yaitu melawan kapitalisme berbeda dengan *chaos* yang tidak memiliki perintah dan pola (Dolman, 2005, p. 111).

Strategi dan perencanaan merupakan dua hal yang berbeda. Strategi bersifat adaptif dan fleksibel sesuai pemahaman tentang lingkungan strategis dan menciptakan sinergitas antara *ends* (objektif), *ways* (konsep strategis), dan *means* (sumberdaya). Ahli strategi memiliki kemampuan berpikir holistik untuk mencapai tujuan negara jangka panjang, menjembatani masa lampau dan masa depan, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Sedangkan perencanaan

adalah wadah yang menjembatani antara strategi dan tindakan. Perencanaan membuat strategi menjadi mudah dipahami agar dapat diimplementasikan secara langsung (Yarger, 2006, p. 42). Namun demikian, peningkatan perencanaan menjadi strategi lebih rentan gagal karena menimbulkan banyak gesekan, dan reaksi asimetris karena rencana berisi instruksi detail sedangkan strategi berfokus pada tujuan (Yarger, 2006, p. 54). Adapun teori strategi meliputi:

- a. **Ends (objective)** yaitu tujuan yang harus dicapai. Tujuan diperoleh melalui beberapa pertimbangan yang mempengaruhi kondisi yang diinginkan diantaranya kepentingan, lingkungan strategis, dan keterbatasan instrumen kekuasaan yang tersedia (Yarger, 2006, p. 52). Lingkungan strategis selalu berubah sehingga hasil spesifik tidak bisa diprediksi dari awal (Yarger, 2006, p. 53). Oleh karena itu, strategi harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis tetapi tidak boleh kehilangan fokus dari kebijakan dan kepentingan.
- b. **Ways (strategic concept)** yaitu bagaimana penggunaan instrumen kekuasaan (*instrument of power*). Konsep strategis menghubungkan sumberdaya dan tujuan nasional yaitu siapa yang melakukan, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana mencapai tujuan nasional (Yarger, 2006, p. 55). Ahli strategi harus mempertimbangkan, memprioritaskan, dan menetapkan *instrument of power* yang utama (*dominant*) dan sekunder (*subordinate*) yang disesuaikan dengan lingkungan strategis dan tujuan strategis. Suatu konsep harus fleksibel dan adaptif sehingga memungkinkan adanya konsep baru apabila konsep sebelumnya gagal untuk mencapai tujuan strategis (*objective*) (Yarger, 2006, p. 57).
- c. **Means (resource)** yaitu sumberdaya yang mendukung *strategic concept* baik bersifat *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud). Sumberdaya berwujud diantaranya manusia, angkatan bersenjata, peralatan, uang, dan fasilitas. Sedangkan sumberdaya tidak berwujud adalah tujuan nasional, bantuan internasional, keberanian, kecerdasan, bahkan fanatisme. Ketidaktepatan alokasi sumberdaya akan menimbulkan bencana dan biaya yang besar untuk

pemulihannya. Selain itu, strategi tanpa sumberdaya yang memadai tidak layak disebut strategi. Oleh karena itu, ahli strategi bertanggung jawab dalam memastikan sumberdaya dapat mencapai tujuan strategis (*objective*) dari konsep strategis (*strategic concept*).

Strategi yang baik adalah keseluruhan yang tidak terpisahkan antara tujuan yang benar (*ends*), konsep yang sesuai (*ways*), dan sumberdaya yang diperlukan (*means*). Ahli strategi harus memastikan bahwa sumberdaya (*means*) yang diperlukan memadai untuk mengimplementasikan konsep strategis (*ways*) agar strategi tersebut dapat diterima, menciptakan efek strategis untuk mencapai tujuan kebijakan, serta mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional (Yarger, 2006, p. 62). Oleh karena itu, sinergitas dari *ends*, *ways*, dan *means* meningkatkan keberhasilan suatu kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memiliki tujuan yang jelas, cara mengatasi dan menangkal, dan penggunaan *instrument of power* daerah dalam menghadapi anarko sindikalisme.

Strategi tidak bersifat prediktif tetapi antisipatif dan proaktif. Strategi diperoleh melalui fakta, asumsi, dan kemungkinan. Ahli strategi dapat melakukan upaya paksaan (*coercive*) atau ajakan (*persuasive*) menggunakan *instrument of power* untuk mencapai tujuan nasional (Yarger, 2006, p. 67). *Belief system* dan *culture perception* memiliki peranan penting dalam pengembangan strategi yaitu disatu sisi menimbulkan gesekan tetapi di sisi lain gesekan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Yarger, 2006, p. 67). Oleh karena itu, strategi lebih menekankan pada efektivitas dibandingkan efisiensi dalam sinergitas *ends*, *ways*, dan *means* untuk mencapai efek strategis (Yarger, 2006, p. 68).

Strategi berkaitan dengan strategi prediktif dan bagaimana bertindak pemimpin strategis dalam menghadapi kondisi lingkungan strategis yang VUCA. Pemimpin strategis memanfaatkan *instrument of power* dan sumberdaya secara fleksibel dan adaptif untuk mencapai tujuan nasional. Strategi tersebut kemudian diturunkan dalam perencanaan yang merupakan jembatan antara strategi dan tindakan sehingga mudah dipahami oleh aktor *instrument of power*. Peneliti menggunakan teori ini untuk menjawab pertanyaan kedua penelitian yaitu

strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.

### **2.1.2. Konsep Pertahanan Negara**

Indonesia menganut sistem pertahanan semesta (Sishanta). Sistem pertahanan negara memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang dipersiapkan secara dini melalui usaha pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik oleh kawan maupun lawan. Pertahanan dipersiapkan secara dini merujuk pembangunan pada masa damai sampai masa perang.

Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis (ideologi Pancasila) dan fisik (kemampuan bela negara yang tinggi). Sarana psikis melalui senjata sosial yaitu kecintaan terhadap tanah air, menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, dan melengkapi diri dengan pengetahuan dan teknologi. Sedangkan sarana fisik melalui senjata teknologi yaitu keterampilan fisik baik wadah prajurit TNI maupun rakyat terlatih yang dipersiapkan sebagai komponen cadangan yang dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan persenjataan militer serta taktik dan strategi bertempur (Kementerian Pertahanan RI, 2014, hh. 74-75).

Kebijakan nasional diperlukan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional bersifat mutlak, vital, dan penting. Kepentingan nasional mutlak yaitu terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Kepentingan nasional vital yaitu keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur, serta demokrasi. Kemudian, kepentingan nasional penting adalah kepentingan terkait perdamaian dunia dan stabilitas regional (Supriyanto, 2014, h. 128). Anarko sindikalisme dipandang sebagai ancaman nonmiliter penting karena akan mengakibatkan

terganggunya stabilitas negara dan keamanan investasi sehingga menurunkan minat investasi ke Indonesia dan menimbulkan semakin tingginya angka pengangguran. Tindakan aktor anarko sindikalisme didorong oleh anggapan bahwa negara lebih berpihak kepada pengusaha dan pemilik modal.

Ancaman terhadap kepentingan nasional meliputi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Pada hakikatnya ancaman adalah setiap usaha dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi seperti agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, dan konflik komunal. Sedangkan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan informasi, dan keselamatan umum (Supriyanto, 2014, h. 129). Selain itu, terdapat ancaman nonmiliter berdimensi legislasi (Kementerian Pertahanan RI, 2014, h. 39). Anarko sindikalisme merupakan ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, sosial, keamanan, dan keselamatan umum. Anarko sindikalisme bergerak atas dasar perlawanan terhadap kapitalisme serta penindasan dan eksploitasi buruh oleh pemerintah dan pemilik modal melalui vandalisme, perusakan fasilitas publik, maupun aksi massa.

Pertahanan negara nirmiliter menempatkan kementerian di luar bidang pertahanan sebagai komponen utama. Kementerian/Lembaga tersebut disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman. TNI bertindak sebagai unsur-unsur lainnya melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan memberi bantuan kepada unsur utama. Sumberdaya utama pertahanan nirmiliter adalah sumberdaya manusia yang sadar akan bela negara. Keterlibatan warga negara dalam pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan profesi, pengetahuan, dan keahliannya di kementerian/lembaga (Kementerian Pertahanan RI, 2014, h. 79).

Pertahanan negara merupakan upaya membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara dini untuk menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Kekuatan pertahanan dibangun secara psikis (ideologi Pancasila) dan

fisik (kemampuan bela negara). Menghadapi ancaman nonmiliter, Pemerintah Daerah menjadi unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter melalui fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Konsep pertahanan negara akan digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua seputar ancaman anarko sindikalis dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.

### **2.1.3. Teori Pergerakan Sosial**

Globalisasi dan perkembangan teknologi turut membawa perubahan sosial masyarakat baik secara revolusioner dan evolusioner. Anarkisme cenderung disebabkan oleh perubahan revolusioner. James C. Davies dalam *Toward a Theory of Revolution* (2011), gerakan revolusioner seringkali muncul saat elite pemerintahan membuat aneka pembaharuan untuk mencegah, mengkooptasi, atau menjinakkan oposisi sehingga masyarakat mengharapkan adanya perubahan sosial yang berkelanjutan. Akan tetapi, masyarakat menjadi kecewa, memberontak, dan bersikap radikal karena pembaharuan yang dibuat oleh elite pemerintah berjalan lambat (Mirsal, 2004, hh. 153-154).

Durkheim membagi masyarakat menjadi masyarakat mekanik dan masyarakat organik. Masyarakat mekanik bersifat kolektif seperti kelompok etnis tradisional dan kelompok tribal. Sedangkan masyarakat organik bersifat kompleks dan bertindak berdasarkan fungsi kebutuhan seperti masyarakat modern (Susan, 2014, h.30). Penganut anarko sindikalisme melakukan kerusuhan, perusakan fasilitas umum, dan vandalisme pada aksi buruh 2019 merupakan masyarakat organik yang bertujuan melawan kapitalisme dan penindasan terhadap buruh.

Gerakan masyarakat merupakan tindakan sekelompok orang melalui keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga (*noninstitutionalized*) untuk memajukan atau menghalangi perubahan di masyarakat (Mirsal, 2004, h. 6). Walaupun gerakan kemasyarakatan tidak diterima secara umum oleh masyarakat, tetapi dipandang positif dan berbeda dengan tindakan kriminal dan

bentuk penyimpangan lainnya. Robert Mirsel membagi gerakan kemasyarakatan dalam tiga tahap yaitu:

- d. Tahap pertama terjadi pada 1940-an sampai dengan 1960-an. Pada masa itu, gerakan kemasyarakatan dilihat secara negatif berdasarkan perspektif Nazisme, Fasisme, dan Stalinisme yaitu tindakan main hakim sendiri dan kerusuhan berbau ras. Namun demikian, pada tahun 1960-an muncul teori ketegangan sosial sebagai hasil kritisi gerakan sosial yang dipandang secara negatif. Teori ketegangan sosial menjadi jembatan teori gerakan masyarakat pada tahap kedua (Mirsel, 2004, h. 16).
- e. Tahap kedua terjadi tahun 1960-an sampai dengan 1970-an bahkan berlaku hingga saat ini. Pada tahap ini, gerakan kemasyarakatan dipandang positif sebagai kekuatan untuk memajukan demokrasi, perjuangan hak-hak sipil, dan persamaan dalam masyarakat (Mirsel, 2004, h. 17). Gerakan kemasyarakatan efektif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa mengejar keuntungan (Mirsel, 2004, hh. 63-65). Namun demikian, analisis ideologi dalam gerakan kemasyarakatan baru ditemukan pada tahun 1983. Frances Fox Piven menyatakan bahwa gerakan kemasyarakatan kaum miskin yang berhasil adalah mobilisasi yang spontan, tanpa perencanaan, dan aksi dari bawah bukannya organisasi kemasyarakatan (Mirsel, 2004, hh. 83-84).
- c. Tahap ketiga terjadi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini. Gerakan kemasyarakatan tidak memiliki unsur baku dalam komunitas baik individu maupun sosial sehingga dipandang sebagai tafsir sosial (*socially constructed*) (Mirsel, 2004, h. 19). Kondisi ini mengakibatkan gerakan masyarakat dipandang sebagai manipulasi, termanipulasi, dan berubah-ubahnya identitas kolektif (Mirsel, 2004, h. 22). Gerakan sosial bersekutu dengan tradisi keagamaan yang konservatif untuk menganalisis kekuatan budaya sekuler modern (Mirsel, 2004, hh. 92-93). Pada tahap ini, gerakan kemasyarakatan melawan kapitalisme

tidak menggunakan kekuatan libertarian dan anarkis yang kuat tetapi menyoroti pakar dan teknokrat.

Anarko sindikalisme merupakan gerakan kemasyarakatan yang berlandaskan ideologi untuk melawan kapitalisme. Pemuda menjadi basis gerakan dan anti hierarkis yang melakukan uji coba demokrasi langsung. Namun demikian, organisasi “tanpa kepala (*acephalous*)”, “berkepala banyak (*polycephalous*)”, dan “tanpa bentuk (*amorphalous*)” menjadikan organisasi fleksibel tetapi sulit menciptakan transformasi masyarakat (Mirsal, 2004, h. 99).

Anarko sindikalisme muncul dari penindasan terhadap kaum pekerja dan ekonomi kapitalis. Wehr dan Bartos mengatakan bahwa solidaritas kelompok didorong oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin, dan semangat perlawanan. Solidaritas ini kemudian membentuk organisasi dan memobilisasi massa untuk memenangkan konflik (Susan, 2014, h. 51).

Masalah generasi muda pada era modern ditandai dengan keinginan melawan dan sikap apatis. Sikap melawan didorong oleh ketakutan masyarakat akan hancur karena perbuatan menyimpang sedangkan apatis didorong oleh rasa kecewa terhadap masyarakat (Soekanto, 2005, hh. 371-372). Perlawanan pemuda umumnya didasari oleh permasalahan sosiologis yaitu fase *sense of value* (orang tua berada di lapisan tinggi sedangkan anak-anak berada di lapisan yang lebih rendah dalam masyarakat). Kondisi ini mendorong kemunculan organisasi-organisasi pemuda informal yang tingkah lakunya umumnya tidak disukai masyarakat. Kemudian bergeser pada usaha mengadakan perubahan dalam masyarakat disesuaikan dengan nilai yang dianggap benar oleh kaum muda (Soekanto, 2005, h. 373).

Komunikasi politik dan demokrasi di Indonesia lahir sejak reformasi politik tahun 1998 (Pureklolon, 2016, h. 91). Media massa (*pers*) memegang peranan sebagai *public sphere* yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat. Mochtar Pabotinggi menyatakan bahwa terdapat 4 distorsi bahasa dalam komunikasi politik yaitu: a. “topeng” dengan menampilkan sesuatu yang bukan maksud sebenarnya; b. “proyek lupa” dengan manipulasi, penciptaan, dan perencanaan untuk puluhan hingga ratusan orang; c. “representasi” dengan

melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; dan d. "ideologi" bahwa politik adalah hak istimewa sekelompok orang dan penekanan tujuan tertinggi dari sistem politik (Pureklolon, 2016, h. 96). Bentuk komunikasi politik yang sering digunakan penganut anarkisme adalah agitasi politik dan propaganda. Agitasi politik bertujuan membangkitkan emosi masyarakat sedangkan propaganda berperan dalam mengontrol sikap individu dan kelompok secara psikologis menggunakan sugesti (Pureklolon, 2016, h. 236).

Gerakan mahasiswa di Indonesia didominasi oleh gerakan moral. Karakteristik dari gerakan moral adalah menolak beraliansi dengan gerakan masyarakat atau politik massa, tidak beralih terhadap kepentingan kekuasaan baik pribadi maupun kelompok, mengkritik radikalisme gerakan, dan *agent of change* yang akan menjadi intelektual pembaharu (Novianto, 2016, h. 198). Namun demikian, pergerakan mahasiswa pernah menjadi progresif pada tahun 1990-an dengan gerakan yang berpihak pada rakyat tertindas dan bekerjasama dengan petani dan buruh (Novianto, 2016, h. 215). Hal ini ditandai dengan pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 2 Mei 1994.

Gerakan sosial seringkali digerakkan oleh masyarakat organik yang bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Gerakan sosial revolusioner seringkali dimunculkan oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak mampu melaksanakan perubahan sosial secara berkelanjutan. Mobilisasi gerakan sosial yang efektif adalah aksi spontan dan dari bawah yang dioperasikan oleh ideologi, doktrin, dan semangat perlawanan. Gerakan sosial seringkali merujuk mahasiswa yang muncul melalui organisasi pemuda informal yang menginginkan perubahan sesuai nilai yang dianggap benar. Komunikasi politik juga mengambil peranan krusial dalam membangkitkan emosi dan mengontrol sikap individu. Teori ini akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan pertama yaitu ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung

#### 2.1.4 Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep *welfare state* seringkali distigmakan sebagai *poor law* (UU Anti-Kemiskinan). Konsep tersebut dikaitkan dengan kebijakan sosial pemerintah melalui skema perlindungan sosial (*social protection*) mencakup jaminan sosial dan jaring pengaman sosial. Secara hakikatnya, tujuan *welfare state* adalah mencegah orang menjadi miskin bukanlah dirancang untuk orang miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dapat dihapuskan melalui perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui kerjasama antar departemen pemerintahan. Akan tetapi, konsep *welfare state* di Indonesia cenderung dipandang negatif yaitu boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (Suharto, 2008, h. 56).

Pada prinsipnya, *welfare state* berfokus pada upaya mencapai kesejahteraan melalui pelayanan yang universal dan komprehensif terhadap warga negara. Kesejahteraan warga negara diperoleh melalui sikap pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Konsep ini cenderung digunakan oleh negara kapitalis dibandingkan sosialis. Negara Barat memandang konsep *welfare state* sebagai “penawar racun” dari dampak negatif ekonomi pasar bebas. Oleh karena itu, hakekat negara kesejahteraan adalah kesadaran warga negara terhadap hak-hak yang dimilikinya sedangkan negara diberi mandat memenuhi kebutuhan hak-hak warga negara (Suharto, 2008, h. 58).

Konsep *welfare state* terdiri dari beberapa model yaitu model universal, korporasi, residual, dan minimal. Model universal (*the Scandinavian welfare state*) yaitu pemberian pelayanan komprehensif kepada seluruh penduduknya. Model korporasi (*work merit welfare state*) yaitu pemberian pelayanan sosial oleh negara terutama mereka yang bekerja atau memberikan kontribusi terhadap skema sosial seperti pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (buruh). Model residual yaitu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung seperti orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya (Suharto, 2008, h. 57). Kemudian, model minimal yaitu

pemberian pelayanan sosial yang hanya diberikan kepada Pegawai Negeri, anggota ABRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Secara umum, Indonesia menganut model *welfare state* minimal yang didasarkan pada konstitusi UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Suharto, 2008, h. 62).

Pertumbuhan ekonomi berperan besar dalam pemberian pelayanan sosial dan kesejahteraan. Negara dengan perekonomian kuat akan memperkuat akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Berbeda halnya dengan negara berkembang yang perekonomiannya relatif lemah sehingga masih terbatas dalam penerapan skema jaminan sosial (Suharto, 2008, h.64).

Konsep *welfare state* bertujuan mencegah orang menjadi miskin bukanlah untuk orang miskin. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan melalui perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kerjasama antar departemen pemerintahan. Namun demikian, kata “negara” cenderung dianggap musuh oleh beberapa kelompok masyarakat (Suharto, 2008, h. 68).

Konsep negara kesejahteraan bergeser dari konsep sosialisme-radikal kepada demokratis-liberal. Kondisi ini mengakibatkan negara berperan besar dalam penyelenggaraan negara tetapi juga terjadi perpaduan antara peran negara dan swasta (dunia usaha dan LSM) (Kiswanto, 2005, h. 99). Pada prinsipnya, negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar terhadap negara dalam sistem jaminan sosial. Strategi pembangunan tersebut dilakukan secara terencana, terlembaga, dan berkesinambungan. Menurut Giddens, sumber struktural dari *welfare state* terdiri dari: a. institusi yang dibuat merupakan upaya menciptakan masyarakat pekerja khususnya bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam pasar kerja; b. sistem kesejahteraan dikonstruksi sebagai bagian proses pembangunan negara yang faktor utama pendukungnya adalah keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong solidaritas nasional; dan

c. bentuk jaminan sosial sebagai upaya manajemen resiko untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kiswanto, 2005, h. 98).

Indonesia merupakan negara yang menganut *welfare state*. Hal ini didukung oleh pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Namun demikian, kendala yang dihadapi pemerintah adalah belum adanya visi pemimpin bangsa yang jelas mengenai *welfare state*, sistem perpajakan yang belum menunjang, hegemoni kaum global yang mengedepankan nilai liberalism dan kapitalisme, dan kondisi perekonomian yang *volatile* (mudah berubah). Saat ini, Indonesia berada pada sistem *welfare pluralism* (Kiswanto, 2005, h. 101). Menurut Hermawati, *welfare pluralism* adalah konsep jaminan sosial yang diserahkan kepada pasar, swasta, atau kelompok masyarakat yang memberikan jaminan kepada lingkungannya (Kiswanto, 2005, h. 95). Model pengelolaan jaminan sosial di Indonesia melibatkan banyak aktor (pemerintah, masyarakat sipil, swasta, dan institusi agama) tetapi pemerintah mendapatkan porsi yang paling besar (Kiswanto, 2005, h. 102).

Momentum hari buruh umumnya digunakan untuk mengajukan tuntutan buruh terhadap pemerintah dan pemilik modal. Pasca reformasi 1998, tuntutan hari buruh sebagai libur nasional pertama kali diajukan pada tahun 2001 (Liputan6, 2001). Pada masa Orde Lama, hari buruh ditetapkan sebagai hari libur nasional. Akan tetapi, hari buruh dilarang dan dibredel pada masa Orde Baru karena dianggap dimanfaatkan oleh PKI. Namun demikian, tuntutan buruh tentang menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional dikabulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2013.

Isu kesejahteraan merupakan hal pokok yang diperjuangkan pada peringatan hari buruh internasional di Indonesia. Berikut tuntutan dan kegiatan hari buruh internasional di Kota Bandung pada tahun 2014-2019:

Tabel 2.1 Tuntutan Hari Buruh 2014-2019 di Kota Bandung

Tahun	2014	2015
<b>Aktor Aksi</b>	Buruh termasuk Serikat Pekerja	Buruh termasuk Serikat Buruh dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
<b>Lokasi</b>	Gedung Sate dan GOR Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Gedung Sate
<b>Aktivitas</b>	Istigasah dan Doa Bersama di GOR KONI Bandung. Pertunjukkan kesenian Sunda Kuda Lumping dan teatrikal di Gedung Sate. <i>Longmarch</i> dari Braga dan Mesjid Pusdai ke Gedung Sate	Gedung Sate: Orasi, nyanyi-nyanyian, dan jalan kaki dari Monumen Perjuangan ke Gedung Sate. 15 Buruh Industri Manufaktur menulis buku berjudul "Buruh Menuliskan Perlawanannya"
<b>Tuntutan</b>	<b>Buruh:</b> Jaminan pensiun ditetapkan Juli 2015, calon Presiden dan wakil presiden yang pro buruh, penghapusan sistem kontrak kerja dan <i>outsourcing</i> , penolakan pekerja <i>outsourcing</i> terutama BUMN, naikan upah minimum 30% tahun 2015, perbaikan kesejahteraan wartawan, revisi KHL (Kebutuhan Hidup Layak) menjadi 8 item, jalankan jaminan kesehatan dengan mencabut Permenkes 69 Tahun 2013, transportasi publik dan perumahan rakyat untuk buruh, beasiswa anak buruh hingga perguruan tinggi, 1 juta/bulan dari APBN untuk guru honorer, revisi UU Perlindungan TKI, audit BPJS, dan pengangkatan pegawai dan guru honorer menjadi PNS. <b>Aliansi Mahasiswa Papua:</b> kesejahteraan, hak menentukan nasib bagi warga Papua "Hak menentukan nasib sendiri, solusi demokratis bagi rakyat Papua	<b>Buruh:</b> melaksanakan jaminan pensiun berdasarkan amanat UU No.40 Tahun 2004, tolak kenaikan UMK yang dilakukan 5 tahun sekali, menolak <i>outsourcing</i> termasuk BUMN, kenaikan UMP/K sebesar 32%, akhiri keserakahan korporat dan mewujudkan negara kesejahteraan, peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan, penambahan jaminan kesehatan Rp. 30 Triliun dari APBN, penurunan harga BBM, Elpiji, dan Tarif Dasar Listrik sesuai harga pasar, turunkan harga barang pokok, stop tindakan union busting (pemberangusan serikat buruh) dan kekerasan kepada aktivis buruh, angkat guru honorer menjadi PNS tanpa jalur tes, revisi UU (Perlindungan TKI, Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, dan Perlindungan Buruh), dan buruh korban PHK massal. <b>AJI:</b> kesejahteraan jurnalis, upah layak, dan jaminan sosial.

Tahun	2016	2017
<b>Aktor Aksi</b>	<b>Buruh termasuk Serikat Buruh dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</b>	<b>Buruh termasuk Serikat Buruh Massa aksi Kolektiva:</b> Pembebasan Kolektif Kota Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua, BEM ISBI Bandung, Daunjati, LPIK UIN SGD Bandung, dan Komunitas Literasi Anak Semua Bangsa
<b>Lokasi</b>	Gedung Sate	Gedung Sate dan Beberapa Ruas Jalan di Bandung
<b>Aktivitas</b>	Penyampaian Tuntutan Buruh dan membentangkan bendera Merah-Putih 100 meter. Selain itu, diselenggarakan deklarasi “Rumah Rakyat Indonesia” yang terdiri dari guru, kaum perempuan, pemuda, buruh, petani, mahasiswa. Terdapat 500 massa buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang mengikuti Mayday di Jakarta.	<b>Buruh:</b> unjuk rasa damai, sewa alat tradisional Sunda dan Benjang. <b>Kolektiva (atribut hitam-hitam):</b> Vandalisme dan perusakan Pos Polisi Jalan Cikapayang Dago, Jalan Sentot Alibasyah, dan rumah di bawah Jembatan Pasupati dengan huruf “A” dalam lingkaran simbol anarkis; melakukan pembakaran ban dan spanduk proyek Hotel Pullman. Aksi anarkis terjadi juga di Surabaya dan DKI Jakarta.
<b>Tuntutan</b>	<b>Buruh:</b> hapuskan <i>outsourcing</i> , menolak upah rendah, membludaknya tenaga kerja asing terutama Tiongkok, gaji pensiun, menolak upah murah, penolakan larangan berserikat dan kriminalisasi aktivis buruh, kritik keberpihakan pemerintah terhadap investor, pencabutan PP 78/2015 Tentang Pengupahan, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, tabungan perumahan rakyat. <b>AJI:</b> mendorong perusahaan menghentikan pelanggaran ketenagakerjaan, pengawasan perusahaan media, dan audit ketenagakerjaan media.	<b>Buruh:</b> hapuskan <i>outsourcing</i> , peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, penerbitan upah sektoral yang disetujui Gubernur, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan (13/2003), pencabutan PP No. 78 Tahun 2015, kesejahteraan guru honorer serta TNI dan Polri setingkat bintang dan tamtama, realisasi janji walikota (perumahan, bis, dan sembako <i>delivery</i> ), lindungi buruh migran, laksanakan hak buruh perempuan, tolak privatisasi dan bangun industri nasional, turunkan harga BBM dan sembako, stop (PHK, <i>Union Busting</i> , dan kriminalisasi serikat buruh), penolakan tenaga kerja asing, pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga buruh min. SLTA, dan tunjangan hari raya dan hari libur untuk jurnalis.
		<b>Kolektiva:</b> kesejahteraan buruh.

Tahun	2018	2019
<b>Aktor Aksi</b>	<b>Buruh termasuk serikat buruh dan AJI Kelompok non-buruh</b> (gunakan atribut hitam-hitam)	<b>Buruh termasuk Serikat Buruh Kelompok non buruh/Penyusup massa buruh:</b> (Anarko Sindikalisme, Gerakan Rakyat Anti Kapitalis (GERAK), mahasiswa, pers mahasiswa, Aliansi Pelajar Bandung, dan anggota komunitas gerakan di Bandung)
<b>Lokasi</b>	Gedung sate dan beberapa ruas jalan di Bandung	Gedung Sate dan beberapa ruas jalan di Bandung
<b>Aktivitas</b>	<b>Kelompok atribut hitam-hitam:</b> vandalism kawasan Jalan Diponegoro hingga Ir. H. Juanda meliputi fasilitas umum, dinding rumah warga di bawah jembatan Pasupati, toko (starbucks dan polo), dan gedung pemerintahan (jalan raya DPRD Provinsi Jabar) dan Pos Polisi di Jalan H. Juanda berupa huruf "A" symbol anarkis, "Rajin Membaca jadi Pandai, malas baca jadi Polisi" dan "ACAB ( <i>All Cops Are Bastard</i> )"	<b>Buruh:</b> aksi damai dan penyampaian tuntutan buruh. <b>Kelompok non-buruh:</b> mobilisasi masyarakat melalui media sosial, penyusupan mobilisasi buruh dari Cikapayang ke Gedung Sate, perusakan mobil dan motor, pemukulan terhadap masyarakat, dan aksi vandalism dengan huruf "A" di dalam lingkaran symbol anarkis, "ACAB", dan "Happy Mayday" di SLB-C Plus Jalan Singaperbangsa, taman Dago, dan rumah dibawah jembatan Pasupati.
<b>Tuntutan</b>	<b>Buruh:</b> penggantian Presiden pada tahun 2019, penolakan penerbitan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan tolak penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	<b>Buruh:</b> Revisi Pergub Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum, melengkapi Perda tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, pembentukan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan Jabar, dan pencabutan Permenkes 51 Tahun 2018 Tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.
		<b>GERAK:</b> stop pemberangusan serikat pekerja, penghapusan sistem kerja kontrak, <i>outsourcing</i> , dan magang, mencabut PP Pengupahan (78/2015), hentikan PHK buruh secara sepihak, hak maternitas bagi perempuan, cuti melahirkan 14 minggu, pemenuhan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), ruang tanpa diskriminasi buruh, perlindungan bagi buruh migran, kebebasan berserikat termasuk pegawai pemerintah non-

		<p>pegawai negeri, cabut izin perusahaan nakal yang merusak lingkungan, setiap perusahaan mendaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi buruh, stop kekerasan seksual, pengangkatan guru honorer menjadi PNS, penetapan upah minimum bagi guru honorer, waktu kerja menjadi 6 jam/hari, dan jaminan pendidikan gratis anak buruh hingga perguruan tinggi.</p>
--	--	--

Sumber: diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel diatas, aksi hari buruh cenderung berlangsung damai dan kondusif pada tahun 2014-2016. Aksi buruh dilakukan melalui pertunjukan kesenian, nyanyian, dan *longmarch*. Akan tetapi, aksi buruh bergeser menjadi aksi vandalisme, perusakan fasilitas publik pada tahun 2017-2019 karena disusupi oleh kelompok beratribut hitam-hitam yang berafiliasi pada paham anarkis. Tuntutan yang dibawa oleh buruh diantaranya penolakan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, penghapusan *outsourcing*, kontrak kerja, dan magang.

Konsep *welfare state* merupakan upaya mencegah orang menjadi miskin bukanlah dirancang untuk orang miskin. Berdasarkan konsep ini, Negara dipandang memiliki mandat untuk memenuhi hak-hak warga negara. Akan tetapi, Indonesia cenderung memandang konsep *welfare state* sebagai pemborosan, tidak kompatibel dalam pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya. Kegagalan negara mewujudkan kesejahteraan dimanfaatkan penyusup yang diasumsikan sebagai aktor penganut anarko sindikalisme untuk menciderai aksi damai hari buruh internasional seperti halnya Kolektiva dan Gerakan Rakyat Anti Kapitalis (GERAK). Konsep negara kesejahteraan digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan kedua yaitu ancaman anarko sindikalisme dan strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalisme dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.

### 2.1.5. Konsep Anarko Sindikalisme

Anarkisme merupakan paham yang mulai dikenal pada abad ke-18. Namun demikian, anarkisme dipengaruhi oleh pemikiran Epikuros di Yunani abad ke-3 (gagasan cosmopolitan, hidup di luar *polis/kota*, dan identifikasi gerakan internasional) dan fenomena *seccesio plebis* abad ke-4 (pembentukan pemerintahan otonom di pegunungan) (Suryajaya, 2020). Pada abad ke-19, tokoh anarkisme yaitu William Godwin tentang gagasan *a stateless society*, Joseph Proudhon dengan gagasan anarko pasifis (menolak perjuangan fisik), Max Stirner dengan gagasan penolakan penghormatan terhadap negara secara sadar dan sengaja, dan Mikhail Bakunin dengan gagasan revolusioner dengan penghapusan institusi negara termasuk kehakiman (Rocker, 2017).

Berdasarkan sejarah, aktor anarkis merupakan inisiator perlawanan terhadap kolonial Belanda. Semangat perlawanan dipicu oleh penerbitan buku "*Max Havelaar*" karangan Eduard Douwes Dekker/ Multatuli yang berisi perlakuan buruh kolonial Belanda terhadap pribumi Indonesia. Kondisi ini mendorong kedatangan buruh Belanda ke Jawa untuk memberi kesempatan pribumi untuk belajar ke Belanda. Selain itu, pelajar Indonesia yang berkuliah Belanda juga terpapar/ terpengaruh oleh kelompok libertarian yang melakukan aksi propaganda di bidang pendidikan dan pencerahan publik. Tokoh Indonesia yang menganut anarkisme yaitu Sutan Syahrir, E.F.E. Douwes Dekker, Alimin Prawirodirdjo, Semaun, Haji Misbach, Herujuwono, dan Adam Malik. Namun demikian, anarkisme berbeda dengan marxisme karena organisasi massa tidak teratur dan perjuangan melakukan aksi kekerasan (Putra, 2018).

Anarkisme di Indonesia merujuk pada pemikiran Mikhail Bakunin. Penganut anarkisme memandang demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau rakyat yang memerintah daerah mereka sendiri (*self government*) (Putra, 2018). Anarkisme memandang kejahatan paling buruk setiap negara adalah memaksakan keseragaman dari kehidupan sosial baik dari segi skema, konsep, tujuan, maupun kebenaran. Oleh karena itu, pemikiran anarko sindikalisme berorientasi pada menjaga kekuatan sosial yang kreatif sehingga perkembangan intelektual dan sosial berjalan baik (Rocker, 2017, h. 33).

Anarko sindikalisme dilatarbelakangi oleh Revolusi Industri Inggris pada paruh kedua abad ke-18. Buruh di Inggris diperhadapkan dengan pengurangan pekerja manual karena pekerja ditransformasikan oleh mesin produksi serta UU Luddisme. Merespon hal tersebut, buruh membentuk Serikat Dagang dan melakukan beberapa aksi diantaranya perusakan dua ribu mesin tenun di Nottingham, aksi pemogokan, pembakaran gedung, penghancuran property, dan kerusuhan bahkan merencanakan pembunuhan anggota kabinet Inggris “Konspirasi Jalan Cato”. Aksi buruh tersebut disambut dengan aksi represif pemerintah diantaranya hukuman gantung dan hukuman penjara ratusan tahun. Akan tetapi, pemerintah menyadari hukuman berat tidak akan menghentikan pergerakan buruh tetapi justru menambah banyak korban sehingga pemerintah mencabut UU Pelarangan Serikat Pekerja pada tahun 1824 (Rocker, 2017, h. 63).

Pasca dicabutnya UU Pelarangan, Serikat Buruh di Inggris sempat meredup. Akan tetapi, pergerakan buruh Inggris muncul kembali pada tahun 1830 dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, kemenangan buruh Inggris “Gerakan Chartis” yang dipicu oleh Revolusi Industri di Perancis sehingga menerbitkan UU Reformasi 1832. Merespon penerbitan UU tersebut, pemilik modal menyewa liga senjata sewaan untuk melindungi diri dan kekayaannya. Kedua, Robert Owen menginisiasi pembentukan *Grand Union Conciliated Trade Union of Great Britain and Ireland* (Serikat Dagang Inggris Raya dan Irlandia yang Terkonsolidasi secara Nasional) pada awal tahun 1834 untuk memperbaiki keadaan pekerja, menggulingkan ekonomi kapitalis, dan terpenuhinya kebutuhan semua orang tanpa mencari keuntungan (Rocker, 2017, hh. 78-79). Akan tetapi, Serikat Dagang tersebut gagal karena pemilik modal mengeluarkan alternatif berupa pengunduran diri dari serikat buruh atau dikeluarkan dari pekerjaannya (Rocker, 2017, h. 85).

Pemikiran anarko sindikalisme menyebar secara internasional. Serikat Buruh dianut oleh berbagai negara diantaranya Belgia, Belanda, Swiss, Jura, Perancis, dan Spanyol, Portugal, Jerman, Swedia, Norwegia, Polandia, Bulgaria, dan negara paling maju di Benua Selatan (Argentina) Namun demikian,

pemikiran ini gagal diterapkan di Rusia karena memandang revolusi hanya dapat dilakukan melalui pemerintahan diktator sosialis yang tidak dapat dilakukan melalui serikat dagang (Rocker, 2017, h. 96).

Anarko sindikalisme modern merupakan kelanjutan dari Internasionale pertama (Rocker, 2017, h. 111). Tugas pertama revolusi sosial adalah pembubaran seluruh lembaga kekuasaan politik (Rocker, 2017, h. 103). Sedangkan tujuan sindikalisme adalah jaminan keselamatan kerja dan peningkatan standar hidup, pemberian kemampuan dan pengetahuan mengenai manajemen teknik produksi, dan kehidupan ekonomi ketika situasi revolusioner muncul sehingga mampu menguasai organisasi sosial-ekonomi dan membentuknya dengan prinsip sosialis (Rocker, 2017, h. 117).

Perjuangan melalui aktivitas parlementer merupakan perjuangan terlemah dan tanpa harapan. Partai politik sosialis belum mampu melaksanakan tujuan sindikalisme karena legislasi tidak memberikan perlindungan buruh untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari (Rocker, 2017, hh. 108-121). Oleh karena itu, pergerakan revolusioner hanya dapat dicapai oleh pekerja yang bebas dari subordinasi pemerintah dan partai politik (Rocker, 2017, hh. 200-202). Sindikalisme memakai prinsip aksi langsung melalui pemboikotan, sabotase, pemberontakan, dan pemogokkan umum yang bertujuan memasukkan perjuangan kelas buruh ke dalam bidang ekonomi (Suseno, 2010, h. 243). Perjuangan politik dan ekonomi anarko sindikalisme terkuat dilakukan melalui pemogokan massal (Rocker, 2017, h. 168).

Anarko sindikalisme dilambangkan dengan bendera Merah dan Hitam. Simbol bendera berwarna hitam merujuk pada anarkisme sedangkan merah merupakan solidaritas dan persatuan komunisme. Penyatuan anarkis dan sindikalis ditetapkan melalui Kongres Internasional di Amsterdam 1907 sehingga anarko sindikalisme turut bergeser pada politik sosialisme (Putra, 2018, h. 27).

Anarko sindikalisme Indonesia berasal dari Belanda. Anarko sindikalisme selalu terdapat di *Vereniging van Spoor-en- Tramwegpersoneel* (VSTP) atau Serikat Buruh Kereta Api dan Trem. Perkembangan anarko sindikalisme pada masa kolonial bersifat unik karena memadukan perjuangan kesadaran kelas,

kemarahan terhadap kolonial, dan peningkatan wawasan kebangsaan. Belanda memberikan bantuan dana dan teknis terhadap pemogokan hari buruh yang diinisiasi PKI, Serikat Buruh Kereta Api dan Trem, dan Serikat Buruh Belanda/*National Arbeids Secretariants* (NAS) (Putra, 2018, h. 28).

Gerakan anarkis dan sindikalis di Indonesia dibagi menjadi dua generasi. Generasi pertama merujuk pada Semaun sedangkan generasi kedua pada Tan Malaka. Tan Malaka menyatakan terdapat tiga gerakan revolusioner yaitu aliran ke-Islaman, kebangsaan, dan keproletaran (sosialisme, komunisme, dan anarko sindikalisme) (Putra, 2018, h. 185). Dirangkulnya anarko sindikalis oleh Tan Malaka didorong oleh alasan pragmatis yaitu memperkuat PKI. Ia menggaungkan slogan “Merdeka 100%” yang kemudian berhasil memperoleh simpatik dari anarko sindikalisme (Putra, 2018. h. 187).

Pemuda memiliki peranan sentral dalam perkembangan anarko sindikalisme. Pemuda berperan dalam aksi pendudukan stasiun bersama pekerja kereta api dan mendukung terbentuknya Barisan Buruh Indonesia (BBI). BBI kemudian membangun kembali jejaring anarko sindikalisme (Putra, 2018, h. 172).

Anarkis dan sindikalisme meredup pasca 1946 terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pasca tragedi berdarah Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), Presiden Soeharto melemahkan hari buruh yang selalu didominasi oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Upaya yang dilakukan pemerintah adalah: a. pelarangan peringatan Hari Buruh internasional 1 Mei dan mengganti dengan peringatan hari buruh Indonesia 20 Februari (bertepatan dengan berdirinya Federasi Serikat Buruh Indonesia/FBSI tahun 1973 yang juga dihadiri Soeharto); b. penggantian nomenklatur “buruh” menjadi “karyawan”, c. penggantian nomenklatur “Departemen Perburuhan” menjadi “Departemen Tenaga Kerja”; dan d. penggantian SOBSI menjadi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) (Matanasi, 2020).

Peringatan hari buruh internasional diperingati setiap 1 Mei dipicu oleh terjadinya Peristiwa Haymarket Affair 1886 di Chicago Amerika. Pada saat itu,

sebanyak 400.000 buruh melakukan pemogokan dan menuntut waktu kerja 8 jam. Aksi buruh tersebut disambut aksi represif Pemerintah AS dengan menjatuhkan eksekusi terhadap 5 tokoh anarkis dengan tuduhan melemparkan bom terhadap polisi. Empat tokoh anarkis yang dieksekusi yaitu Parsons, Angels, Spies, dan Fischer pada tahun 1887 sedangkan Lingg melakukan bunuh diri di penjara (Anjani, 2020, h. 5).

Kebangkitan anarkis Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemuda-pemuda yang merasa terasing oleh kehidupan kota yang konsumeristik dan pemiskinan yang disebabkan oleh kapitalisme. Kalangan pemuda memilih untuk mendekati gagasan Proudhonian (usaha mandiri berupa kafe, kerjasama kolektif, ekonomi mikro, atau alternatif lainnya) yang turut mengakibatkan penurunan minat pemuda bergabung dalam pemerintahan mencapai 80% (Putra, 2018, h. 234). Kedua, anarkisme dapat bekerja untuk mengkritik struktur-struktur negara dan sosial yang menindas. Ketiga, TAP MPR 1965 terkait pelarangan berdirinya partai komunis. Keempat, pandangan otokritik terhadap kegagalan gerakan negara komunis otoritarian internasional, dan semakin menguatnya gerakan anarkisme (Putra, 2018, h. 235).

Anarkis dan Sindikalisme di Indonesia bangkit pada tahun 1990-an melalui punk dan skinhead. Pesan anarkisme dan anti-otoritarian disebarkan melalui aliran musik dan diskusi, mencetak *zine* (media cetak alternatif yang diperoleh melalui fotokopi), dan penyebaran dalam *gigs-gigs* (pertunjukkan musik). Band Anarko-punk pertama di Indonesia adalah Runtah yang dibentuk di Bandung 1995 dibawah Riotic Record. Kondisi ini dimanfaatkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) untuk mendirikan Front Anti Fasis (FAF) pada tahun 1999.

FAF terdiri dari komunitas punk, anak jalanan, pemuda, dan preman (Putra, 2018, h. 216). FAF kemudian menginisiasi kemunculan Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNus) yang didalamnya terdiri dari AFRA Jakarta, SARAF/RI Boots Semarang, Barisan Anti Penindasan Surabaya, dan The Last Palm Community Yogyakarta (Putra, 2018, h. 217). Namun demikian, FAF dibubarkan karena beberapa faktor yaitu tudingan berbau komunisme oleh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan kesadaran JAFNus dimanfaatkan oleh Partai Rakyat

Demokratik (PRD). Namun demikian, eksponen FAF Bandung, Geng Behom masih militan dan aktif melakukan perusakan properti dan vandalisme termasuk supermarket dan pos-pos polisi di Bandung. Namun demikian, gerakan Geng Behom bubar karena pemimpinnya, Behom meninggal akibat overdosis obat-obatan (Putra, 2018, h. 218).

JAFNus kemudian bertransformasi membentuk Jaringan Anti-Otoritarian (JAO) pada tahun 2007. JAO terdiri dari Kolektif Affinitas Yogyakarta, Apokalips Bandung, Jaringan Otonomis Jakarta, Jaringan Autonomous Salatiga, Kontinum Makassar, dan lain-lain. Pembentukan JAO dilatarbelakangi oleh ajang *show off project* untuk mengetahui respon berbagai pihak terhadap kubu anti-otoritarian dengan embel-embel Mayday 2007 yang bertepatan dengan Hari Anti Kapitalisme (HAK).



**Gambar 2.1. Poster Jaringan Anti Otoritarian Mayday 2008**

Sumber: Jaringan Radio Komunitas Indonesia (2008)

Aksi anarkis pertama menggunakan bendera hitam yaitu pada Mayday 2008. Aksi massa yang dilakukan melalui *longmarch* dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas ke Wisma Bakrie 2 (dalang bencana Lapindo di

Sidoarjo) yang kemudian dilanjutkan ke Bundaran HI. Merespon kondisi tersebut, Polisi melakukan aksi pemukulan dan angkut paksa ke Polres Metro Jakarta walaupun akhirnya massa aksi dilepaskan pada tengah malam (Putra, 2018, hh/ 219-220).

Anarkis sindikalisme banyak bergerak di kota-kota pendidikan. Penganut anarkis yang radikal banyak ditemukan di Kota Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Aksi langsung yang dilakukan diantaranya perusakan properti, hotel, kendaraan mewah, dan kendaraan patroli polisi di Makassar. Kondisi ini berimbas pada penutupan kompleks perkantoran dan perbelanjaan untuk menghindari amukan demonstran (Putra, 2018, hh. 222-224). Selain itu, terdapat juga aksi pembakaran ATM di Manado, Bandung, dan Sleman pada tahun 2011.

Penganut anarko sindikalisme memandang penghancuran benda bukanlah kekerasan. Kerusakan dinyatakan sebagai fondasi gerakan bukan suatu kenakalan remaja. Tujuan dari perusakan fisik adalah mempengaruhi siklus kapital dan psikologi pasar secara langsung. Sasaran utama dari aksi langsung adalah pengembangan harapan positif menjalani kehidupan secara maksimal bukan pada tingkat kekerasan dan kriminalitas (Putra, 2018, h. 230).

Teroris dalam perspektif anarko sindikalisme adalah negara, militer, polisi, dan kapitalis. Anarkisme memandang kejahatan paling buruk setiap negara adalah memaksakan keseragaman dari kehidupan sosial baik dari segi skema, konsep, tujuan, maupun kebenaran. Oleh karena itu, pemikiran anarko sindikalisme berorientasi pada menjaga kekuatan sosial yang kreatif sehingga perkembangan intelektual dan sosial berjalan baik (Rocker, 2017, h.33).

Anarkisme termasuk anarko sindikalisme menyatakan diri terafiliasi internasional. Pemenjaraan pelaku pengeboman ATM di Sleman (Billy dan Eat) membentuk solidaritas berbagai negara. Berdasarkan Laporan *Conspiracy of Cell of Fire-Informal Anarchist Federation (CCF-FAI)*, terjadi 22 kasus aksi solidaritas terhadap Billy dan Eat diantaranya pembunuhan polisi dengan senjata di Meksiko; penembakan CEO perusahaan industri di Genoa, Italia; dan pengeboman bank di Roma. Selain itu, aksi serangan bersenjata, pemboman,

pembakaran, dan vandalisme juga terjadi di beberapa negara yaitu Filipina, Ekuador, Inggris, Bolivia, Rusia, AS, dan Indonesia (Putra, 2018, h. 229).

Mansour Fakih menyatakan bahwa anarkisme tidak akan pernah padam. Pernyataan ini dipicu oleh kecenderungan alami manusia untuk memberontak terhadap tekanan hidup. Anarko sindikalisme menjadi alternatif gerakan yang dipicu oleh adanya literatur radikal di perpustakaan jalanan terutama di Kota-Kota Besar, penerbit independen yang menerjemahkan literatur anarkis klasik (Putra, 2018, hh. 235-236). Tantangan terbesar bagi anarkisme di Indonesia adalah kesulitan bersaing dengan dua simpul politik nasional yaitu kubu liberal progresif, pro-demokrasi, dan nasionalisme sipil yang moderat (PDI-Perjuangan dan aliansinya) dan nasionalisme radikal (asumsi anti-pribumi dan bela negara akan melahirkan aliran fasisme di Indonesia) (Putra, 2018, hh. 239-240).

Berdasarkan paparan di atas, aktor Anarko sindikalisme selalu menginterpretasikan diri sebagai gerakan internasional. Tujuan anarko sindikalisme adalah pembubaran lembaga kekuasaan politik. Selain itu juga memberikan jaminan keselamatan kerja, peningkatan standar hidup, pemberian kemampuan untuk menguasai organisasi, sosial-ekonomi, dan membentuknya berdasarkan prinsip sosialis. Pergerakan yang revolusioner hanya dapat dicapai apabila bebas dari subordinasi pemerintah dan partai politik. Oleh karena itu, anarko sindikalis memandang aktivitas parlementer sebagai perjuangan terlemah dan tanpa harapan karena tidak memberikan perlindungan buruh dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Aktor Anarko sindikalisme memandang perusakan fasilitas fisik sebagai simbol bukan kenakalan remaja. Tujuan utama kekerasan dan perusakan fasilitas publik adalah kehidupan yang lebih maksimal bukanlah tingkat kekerasan dan perusakan fasilitasnya. Konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu ancaman anarko sindikalisme dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada hari buruh 2019.

### 2.1.6. Konsep Peperangan Asimetris

Peperangan asimetris merupakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang lemah (*state* atau *sub-state*) terhadap pihak yang kuat dengan memberikan efek mendalam dari berbagai level perang. Strategi dan taktik yang digunakan adalah eksploitasi kerentanan lawan untuk memperoleh keunggulan relatif yang spesifik. Taktik yang digunakan biasanya adalah diluar norma perang dan metode yang benar-benar berbeda (Thornton, 2011, p. 1). Hal ini sejalan dengan *US Military Strategy* yang mendefinisikan tantangan asimetris sebagai pendekatan yang tidak konvensional dan murah yang akan mengalahkan kekuatan kita, mengeksploitasi kerentanan kita, atau menghadapkan kita pada sesuatu yang tidak seimbang (Thornton, 2011, p. 19).

Perang asimetris merupakan perang generasi keempat. Perang generasi keempat merujuk dasar pemikiran bahwa negara superior akan dapat mengalahkan negara yang ekonomi dan militernya kuat bila digunakan secara tepat (Katoch, 2010). Ancaman potensial asimetris melalui operasi informasi memiliki dampak yang mirip dengan senjata nuklir (Katoch, 2010, p. 99).

Perang asimetris dapat dilakukan pada semua domain dan tidak hanya digunakan untuk mencapai satu tujuan seperti halnya kekuatan bersenjata. Perang asimetris dapat digunakan untuk memperoleh berbagai tujuan seperti halnya militer dan non-militer dan sesuatu yang mematikan atau tidak mematikan. Perang asimetris dapat digunakan untuk mengeksploitasi kesalahan musuh, menghasut yang lebih lemah/ orang yang terpinggirkan (*unprivileged section*) dari suatu masyarakat, memanfaatkan suatu isu keburukan politik suatu negara, mengeksploitasi isu perbedaan kelas, kepercayaan, serta komunikasi dan mengekspresikan persamaan etnis terhadap segmen tertentu untuk membangkitkan anti-pemerintah (Katoch, 2010, p. 96).

Roger Barnett mengatakan bahwa musuh akan melakukan tindakan yang tidak dapat kita lakukan atau tidak akan kita lakukan. Teknik asimetris tersebut dapat juga dapat diaplikasikan oleh negara yang kuat (Thornton, 2011, p. 4). Oleh karena itu, pihak yang lemah harus mampu memahami momentum perlawanan

yang menguntungkan melalui keefektifan dan ketepatan terhadap sasaran dan waktu.

Pihak yang lemah cenderung unggul pada aspek mobilitas (kesiapan bergerak) dan fleksibilitas (mudah menyesuaikan diri). Hal ini dikarenakan pihak yang kuat cenderung mempertahankan kondisi yang tetap, organisasi yang konservatif, dan menginginkan pertarungan tertentu (Thornton, 2011, p. 3). Oleh karena itu, pihak yang lemah menggunakan pendekatan asimetris berupa metode yang berbeda dan luar biasa untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat.

Kerentanan lawan merupakan dasar berpikir aktor asimetris. Kelemahan pihak lawan merupakan kesempatan untuk memaksimalkan efek kekuatan dan efek tidak proporsional berupa pendekatan non-tradisional yang tidak terantisipasi seperti aktivitas *crafty diplomacy* (diplomasi licik), *wily espionage* (spionase yang handal), terorisme termasuk terorisme siber, konflik intensitas rendah, atau *proxy war*, pengerjaan senjata pemusnah massal, atau pendekatan asimetris lainnya (Katoch, 2010, pp. 93-94). Kemampuan penguasaan teknologi memberikan dampak *vis-à-vis* (kondisi saling berhadapan) terhadap lawan yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep asimetris, aktor yang merasakan dirinya kuat pada kenyataannya dapat dikatakan lemah.

Aktor asimetris (*asymmetric warrior*) cenderung terdidik, *techno-savvy* (paham banyak terhadap teknologi modern khususnya komputer), dapat mengeksploitasi *cyber space*, dan dapat bergabung dengan lingkungan perkotaan (*urban milieu*) (Katoch, 2010, p. 96). Dalam peperangan asimetris, persahabatan adalah gelombang karena yang permanen adalah kepentingan pribadi. Ancaman yang dinamis merupakan faktor yang tidak terhindarkan dari analisis asimetris. Keberagaman kepentingan merupakan faktor kunci dalam menilai dorongan musuh untuk memakai pendekatan asimetris (Katoch, 2010, pp. 103-104). Oleh karena itu, untuk melawannya diperlukan upaya untuk profil pemimpin, pemahaman bagaimana cara berpikir, beroperasi, asal inspirasi, dan kepentingan mereka.

Keberhasilan strategi aktor peperangan asimetris adalah dukungan populasi. Aktor peperangan asimetris menggunakan operasi psikologis sebagai

senjata dominan dalam operasi dan strategi. Operasi psikologis berkaitan dengan upaya menghilangkan kekecewaan dan membangun ikatan. Globalisasi mempermudah aktor asimetris dalam berkomunikasi, perjalanan, dan pengiriman uang digital, atau hawala/ transaksi narkoba. Oleh karena itu, strategi mengalahkan aktor asimetris adalah pengisolasian dukungan populasi untuk memutus kemampuannya dalam kamuflase (*camouflage*) dan menyangga (*sustain*) (Katoch, 2010, p. 96). Selain itu, penting untuk mengurangi kredibilitas aktor peperangan asimetris melalui media (Katoch, 2010, p. 102). Hal ini dikarenakan media termasuk internet merupakan pendorong semangat pihak yang lemah (Thornton, 2011, p. 12).

Perang asimetris merupakan perang yang meliputi semua domain baik militer dan nonmiliter yang umumnya dilakukan pihak yang lebih lemah. Aktor perang asimetris memiliki kemampuan operasi psikologis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan globalisasi untuk mendapatkan dukungan populasi terutama orang lemah dan terpinggirkan untuk memperkuat pemikiran keburukan politik negara dan membangkitkan anti-pemerintah. Konsep ini akan digunakan peneliti dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua terkait ancaman anarko sindikalisme dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi paham anarko sindikalisme dalam perspektif peperangan asimetris pada peringatan hari buruh 2019.

## **2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan tema penelitian atau permasalahan serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu tersebut bermanfaat bagi peneliti dalam acuan referensi, perbedaan antara penelitian yang hendak diteliti dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

### **2.2.1. Penelitian Grendi Hendrastomo (2010)**

Penelitian berjudul Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Buruh di antara Kepentingan Negara dan Korporasi. Tujuan penelitian adalah

menganalisis dan mengajukan solusi terkait adanya ketimpangan kesejahteraan dan kebijakan yang tidak mengorbankan buruh. Buruh disatu sisi berkontribusi terhadap perekonomian nasional tetapi terbentur oleh masalah klasik yaitu upah buruh, sistem kontrak, *outsourcing*, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan marjinalisasi buruh. Akan tetapi, negara juga diperhadapkan pada posisi dilematis yaitu satu sisi memperjuangkan nasib buruh tetapi disisi lain mempermudah masuk investor dan mempromosikan tenaga kerja murah untuk mengurangi pengangguran. Hal ini mengakibatkan pemerintah cenderung berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dibandingkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Teori yang digunakan adalah hubungan buruh-pengusaha-negara/ tripartit (marjinalisasi buruh dan *labour market flexibility*) dan kesejahteraan buruh. Menurut Marx, buruh terasing (teralienasi) dalam 4 hal yaitu: i) aktivitas kerja (hanya menunaikan kerja tanpa kesempatan mengembangkan potensi diri), ii) produk yang dihasilkan (tidak memiliki eksklusifitas terhadap produk yang dibuat sehingga harga produk yang dibeli sesuai dengan harga pasar), iii) buruh lain (buruh berkompetisi dalam kinerja dan produktivitas untuk mendapatkan bonus besar yang disisi lain menghambat solidaritas dan tidak seluruhnya mendukung serikat buruh), dan iv) potensi diri yang dimiliki (buruh akan menjadi bosan dan produktivitas menurun sehingga pemilik modal dapat menurunkan tingkat kesejahteraan buruh). Bentuk marjinalisasi buruh lainnya adalah sistem kontrak dan *outsourcing*, *bargaining position* yang lemah (buruh terbentur adanya ketakutan PHK dalam perjuangan meningkatkan kesejahteraan), upah minimum-kerja, dan tidak sebandingnya upah dan kebutuhan riil.

*Labour market flexibility* (LMF) menyatakan bahwa hubungan buruh dan majikan diatur dalam mekanisme pasar dan sedikit mungkin campur tangan pemerintah. LMF memungkinkan perusahaan mereduksi atau mencabut peraturan yang melindungi buruh karena prinsipnya adalah kemampuan pasar tenaga kerja menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi. Hal ini juga diperkuat oleh SKB empat menteri yang menyatakan bahwa upah dan kesejahteraan pekerja diserahkan/ disesuaikan kemampuan perusahaan dan

kenaikan upah buruh mengikuti pertumbuhan ekonomi. Bagi pemilik modal, fleksibilitas pasar tenaga kerja merupakan faktor pendorong minat investasi di Indonesia sedangkan bagi buruh dipandang sebagai kekejaman hukum pasar.

Kemudian peneliti menggunakan konsep kesejahteraan buruh. Kesejahteraan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani baik selama maupun diluar hubungan kerja untuk mempertinggi produktivitas kerja. Kondisi ini juga beriringan dengan minimnya jaminan sosial tenaga kerja. Upah minimum dipandang di satu sisi merupakan intervensi negara pada pasar tenaga kerja di negara berkembang.

Buruh diperhadapkan dengan eksploitasi karena bekerja dalam waktu yang panjang tetapi kebutuhan sehari-hari mepet. Pada implementasinya, Pemerintah juga tidak mengontrol optimalisasi upah sehingga pemilik modal bebas menentukan besaran upah. Bahkan, pemerintah dan serikat buruh tidak dapat diharapkan dalam mengakomodir aspirasi buruh dalam penentuan upah. Kondisi ini mengakibatkan buruh seringkali terjebak dalam perangkap rentenir dan terjerumus dalam perangkap hutang. Namun, disisi lain terdapat juga buruh yang mengambil pekerjaan sampingan yang otomatis menambah jam kerja tetapi rentan terhadap masalah kesehatan.

Terdapat beberapa solusi peningkatan kesejahteraan buruh dapat dilakukan dilihat pada tiga perspektif. Pertama, perspektif buruh. Buruh melakukan gerakan perlawanan melalui serikat buruh untuk bernegosiasi dengan pemilik modal. Kondisi ini sulit karena memiliki posisi tawar yang rendah terhadap negara dan pemilik modal serta ketakutan PHK. Solusi nya adalah pembuatan koperasi sebagai jaminan kesehatan dan antisipasi PHK perusahaan untuk meningkatkan posisi tawar buruh dan berkurangnya kesewenang-wenangan pemilik modal karena solidnya serikat buruh, Kedua, perspektif pemilik modal. Buruh dipandang sebagai stakeholder perusahaan bukanlah komoditas dan faktor produksi sehingga mengurangi beban produksi tanpa mengurangi kesejahteraan dan PHK buruh. Selain itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh baik pembangunan rumah buruh, sekolah gratis, dan fasilitas kesehatan. Ketiga,

perspektif negara. Negara melakukan penyempurnaan Upah Minimum Regional (UMR) yang berdasarkan pada tingkat kebutuhan riil, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut harus memenuhi prinsip keadilan dan mampu melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dimana negara tidak menjadi corong dan boneka pengusaha. Solusi-solusi tersebut membutuhkan sinergitas semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan menarik buruh dari marjinalisasi (Hendrastomo, 2010).

### **2.2.2. Penelitian Muhammad Zuhdan (2014)**

Penelitian berjudul *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah “Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia pasca Reformasi”*. Tujuan penelitian adalah melacak isu-isu yang diperjuangkan oleh gerakan buruh pasca reformasi apakah semata-mata pragmatis atau hanya semata-mata hanya kenaikan upah.

Terdapat perbedaan isu buruh yang digiring pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada masa Orde Baru, buruh masih dicap antek PKI dan penghambat pembangunan sehingga eksistensi organisasi Serikat Buruh dilarang. Sedangkan pada era reformasi, buruh mengarahkan isu terhadap tekanan pasar internasional diantaranya Multi National Corporation (MNC), World Trade Organization (WTO), dan World Bank.

Buruh mengenal konsep *New Left* berupa *New Labour* yang disinergikan dengan isu *welfare state*. Kaum buruh memperjuangkan hak-hak publik diantaranya kesehatan, urusan administratif, pendidikan, perumahan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Isu lainnya yaitu *gender* (kesehatan reproduksi, hak cuti hamil tanpa pemberhentian kerja, jaminan kesehatan selama hamil hingga melahirkan, dan kesetaraan gender (buruh laki-laki dan perempuan), neoliberalisme (penentuan upah tanpa invensi negara, fleksibilitas pasar kerja buruh berdasarkan hukum “Keynesian”/ permintaan dan penawaran, pemberian ruang yang lebar bagi serikat buruh dalam pembuatan kebijakan sektor produksi, dan pemotongan biaya pelayanan publik disediakan negara).

Buruh mengkritik strategi Thatcherisme yang menganggap pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan buruh. Pada kenyataannya,

pertumbuhan ekonomi mengeklusi kepentingan buruh dan tidak ada *trickled down effect* (efek menetas ke bawah). Oleh karena itu, buruh menyadari bahwa hak-hak buruh hanya dapat terakomodasi melalui kemitraan publik-swasta yang berorientasi pelayanan publik. Peneliti mengkaji isu buruh pada setiap rezim kepemimpinan Orde Reformasi:

- a. Masa Habibie: mengembalikan hak kebebasan buruh untuk berserikat dan berunding seperti zaman Soekarno 1957. Pada masa itu, satu organisasi buruh membentuk partai buruh dan mengikuti pemilu pada Juni 1999. Selain itu, Habibie melepaskan tokoh pemimpin buruh, Muchtar Pakpahan yang dipenjara pada masa Orde Baru.
- b. Rezim Megawati: buruh menuding PDI-P melupakan dukungan buruh dalam pemilu. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah berupa pengurangan subsidi listrik dan kenaikan harga BBM 30% yang tidak diimbangi kenaikan gaji buruh. Megawati justru meningkatkan anggaran militer. Pada masa itu, buruh memandang perlunya penguatan dan penyatuan serikat buruh, kepemimpinan buruh, dan otonomisasi serikat buruh dari kekuasaan. Pada masa Megawati, buruh bergerak untuk merespon kebijakan pemerintah diantaranya pengesahan UU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan UU Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PPHI). Faktor pemicunya adalah tidak memberikan kesejahteraan kepada buruh, tetapi dibuat untuk melindungi pemilik modal internasional (IMF, ADB, dan Bank Dunia), menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan terutama kerja kontrak, melegalisasi sistem kerja kontrak illegal, melegalisasi upah murah agar investasi dalam negeri berkembang, dan pengembirian hak mogok kerja.
- c. Masa Gus Dur: pemerintah mengakomodasi tuntutan buruh untuk membatalkan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dengan menerbitkan Perpu No. 3 Tahun 2000, merangkul dan mengadakan pertemuan reguler dengan kalangan aktivis buruh dan NGO untuk merumuskan kebijakan perburuhan. Isu lain yang disorot yaitu masalah

buruh migran diantaranya penyiksaan oleh majikan, pemerkosaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), TKI yang menjalani hukuman mati di luar negeri, upah dan pesangon yang dilanggar oleh agen maupun majikan, maupun layanan pemerintah yang kurang humanis dan protektif dalam memenuhi hak-hak buruh migran. Selain itu, Pemerintah juga melegalkan Serikat Buruh melalui UU No. 21 Tahun 2000.

- d. Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Pada masa ini, buruh masih menuntut janji kesejahteraan. Buruh diperhadapkan pada PHK, sistem kontrak kerja, dan *outsourcing* yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Selain itu, buruh juga mengajukan tolak upah murah, menilai adanya manipulasi jaminan sosial menjadi asuransi wajib berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang merupakan induk dan RUU BPJS.

Pada masa ini, buruh memperluas pergerakan melalui bidang politik yaitu *go public*. Hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian perwakilan buruh di legislatif melalui sebuah partai politik, membuat deal/ kontrak politik dengan partai politik untuk bisa meloloskan isu yang diperjuangkan buruh, dan memanfaatkan partai politik. Buruh juga aktif dalam menolak adanya RUU KAMNAS, RUU ORMAS, dan isu kepemimpinan tunggal buruh.

Berdasarkan kajian peneliti, tuntutan buruh bukan hanya kenaikan upah. Gerakan buruh di Indonesia sudah sampai fase gerakan *New Labour* yang tidak hanya berfokus pada masalah upah atau hubungan industrial semata tapi sudah jauh melangkah ke isu-isu yang bersifat politik praktis maupun politik makro (Zuhdan, 2014).

### **2.2.3. Penelitian Zukhrufah Dien Ardlillah (2017)**

Peneliti merupakan alumni S2 Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2017. Judul penelitian yaitu "Fenomena Subkultur Punk di Kota Bandung dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Gerakan Front Anti Fasis 2015-2016)". Peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan SWOT merujuk pada konsep trans budaya, subkultur, gerakan sosial, dan hegemoni masyarakat dalam kerangka ilmu pertahanan dan perspektif peperangan asimetris.

Hasil penelitian adalah kelompok punk di Bandung dipengaruhi oleh globalisasi sehingga mengakulturasi budaya dan membentuk subkultur baru di Kota Bandung. FAF memiliki dampak konstruktif (dimensi sosial budaya dan ekonomi kreatif) dan destruktif (penyebaran ideologi bertentangan dengan Pancasila, unjuk rasa, dan vandalisme) bagi pembangunan Kota Bandung.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah melalui strategi komunikasi dan hegemoni sosial budaya bersama dengan Polrestabes Bandung, dan Kodam III/Siliwangi. Polrestabes Bandung melakukan upaya *preemptive*, deteksi potensi ancaman, dan strategi represif dalam menanggulangi ancaman yang akan datang. Kodam III/ Siliwangi melakukan hegemoni melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Selain itu, Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) melakukan fungsi ideologi dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi ancaman ideologi, sosial budaya, dan keamanan dari aksi FAF. Kemudian, fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi dalam lingkup Bela Negara. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah ketidakpuasan kelompok punk terhadap pemerintah sehingga perlu adanya perhatian khusus dengan melibatkannya dalam program-program yang berkaitan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan, pemberdayaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. (Ardlillah, 2017).

#### **2.2.4. Penelitian Victor Jacob Lucas, Djoko Andreas Novalino, dan Moch. Rofiq (2017)**

Penelitian berjudul Penerapan Komunikasi Sosial (Komsos) dalam Mendeteksi dan Mencegah aksi Terorisme di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Strategi komunikasi sosial (komsos) yang dilakukan

masih bersifat umum dan kurang tepat sasaran dalam mendeteksi dan mencegah aksi terorisme.

Strategi komsos yang dilakukan Kodim 0618/BS yaitu *ideation* dan *encoding*. *Ideation* adalah pemilihan informasi yang hendak dikomunikasikan melalui wawancara, penerangan, dan penyuluhan agar deteksi dini dan cegah dini maksimal. Sedangkan *encoding* adalah penerjemahan informasi/ gagasan dalam wujud kata-kata/lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan memberikan efek kepada orang lain. Komsos ini digunakan pada kegiatan lapor cepat (kebutuhan akan kecepatan dan kerahasiaan melalui peralatan dan perlengkapan satuan sandi TNI AD), *encode* (penyampaian pesan yang telah disandi biasanya dilakukan oleh satuan unit intel), dan *decoding* (penafsiran interpretasi terhadap pesan oleh penerima pesan).

Kemampuan intelektual dan kemampuan fisik dibutuhkan dalam mendeteksi dan mencegah aksi terorisme. Kendala yang dialami yaitu: i) keterbatasan SDM karena kemampuan intelijen dan teritorial Babinsa tidak diatur dalam pusdik intel maupun pusdik teritorial tetapi latihan satuan; ii) ketakutan Babinsa untuk mewawancarai eks-teroris ataupun target operasi karena tidak memiliki pistol, iii) dibutuhkan adanya pengadaan kendaraan motor dan mobil sipil guna melakukan penyamaran, dan penyediaan sarana *cybernet* yang terhubung dengan badan siber yang berada di Kodam, kepolisian, pemerintah daerah, BAIS, dan BIN; iv) penguatan bahasa dan budaya Sunda belum maksimal; v) pengetahuan dan pendidikan dalam berkomunikasi dengan lapisan masyarakat; dan vi) keterbatasan teknologi untuk percepatan informasi. Jadi, komsos Kodim 0618/BS belum maksimal dalam mendeteksi dan mencegah terorisme saat ini (Lopulalan, 2017).

#### **2.2.5. Penelitian Hery Setyawan dan Mochammad Arif Affandi (2017)**

Penelitian berjudul Strategi Perjuangan Serikat Buruh dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang. Peneliti mengkaji strategi Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ)-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dalam

perjuangan kenaikan upah di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus untuk mendapatkan fakta yang terjadi dalam perjuangan kenaikan upah yang dilakukan Serikat Buruh Plywood Jombang. Subjek penelitian dilakukan melalui *purposive sampling*/ pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dan berlangsung terus menerus sampai data tuntas dan sudah jenuh.

Pertentangan antara buruh dan kapitalis tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Hal ini dikarenakan kapitalis tidak rela menyerahkan kekuasaannya (ekonomi, sosial, dan politik) sedangkan di sisi lain buruh melakukan upaya gerakan sosial dan membangun suprastruktur/ bangunan untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Selain itu, strategi advokasi juga digunakan untuk mengkritik kebijakan atau mereformasi sistem reformasi yang berkeadilan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses penetapan upah SBPJ-GSBI menggunakan dan memadukan dua strategi gerakan massa dan advokasi. Gerakan massa digunakan untuk menekan pemerintah dan dewan pengupahan. SBPJ melakukan penggalangan kekuatan baik internal maupun eksternal (masyarakat, mahasiswa, LSM dan akademisi). Advokasi mempunyai kedudukan untuk menguatkan gerakan massa yang nantinya akan sangat mempengaruhi besar kecilnya kenaikan upah (Setyawan, 2017 ).

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Teori, Konsep, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Grendi Hendrastomo (2010)	Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi	<p><b><u>Teori/Konsep:</u></b></p> <p>1. Hubungan buruh-pengusaha-negara/ tripartit</p> <p>2. Konsep Kesejahteraan Buruh.</p> <p><b><u>Metode Penelitian:</u></b></p> <p>Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.</p>	<p>1. Posisi dilematis negara antara memperjuangkan buruh atau menurunkan angka pengangguran dengan menarik investor.</p> <p>2. Buruh masih termarginalisasi dengan fenomena klasik yaitu sistem kontrak, <i>outsourcing</i>, ketakutan PHK, dan upah yang tidak sebanding kebutuhan riil.</p> <p>3. Memiliki solusi dari berbagai perspektif. Perspektif buruh melalui pembuatan koperasi buruh untuk penguatan serikat buruh dan antisipasi PHK dalam perjuangan hak buruh. Kemudian perspektif pengusaha yaitu memandang</p>	Memandang pergerakan buruh disebabkan oleh faktor kesejahteraan.	Peneliti hanya membahas secara umum solusi peningkatan kesejahteraan buruh. Akan tetapi tidak memandang dari perspektif strategi pemerintah dalam menghadapi masalah kesejahteraan.

				<p>buruh sebagai partner bukan faktor produksi dan pemaksimalan kesejahteraan buruh melalui program CSR. Kemudian dari pemerintah yaitu pembuatan penyempurnaan UMR (Upah Minimum Regional)</p>		
2.	Muhammad Zuhdan (2014)	Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah “Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia pasca Reformasi.	<p><b><u>Teori/Konsep</u></b></p> <p>1. New Labour</p> <p><b><u>Metode:</u></b></p> <p>Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus</p>	<p>1. Isu yang disuarakan buruh tidak hanya kenaikan upah</p> <p>2. Isu yang digaungkan buruh berbeda-beda pada setiap rezim pemerintahan di Era Reformasi.</p> <p>3. Isu tuntutan buruh sudah bergeser dari pragmatis ke isu-isu yang bersifat politik praktis maupun politik makro sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.</p>	<p>Mengkaji tentang tuntutan pada gerakan buruh dari pemerintahan Orde Reformasi mulai dari Presiden Habibie sampai dengan Presiden Susilo</p>	<p>Hanya membahas tuntutan dan kondisi buruh selama masa Orde Reformasi. Akan tetapi, peneliti tidak membahas penyusupan paham anarko sindikalisme</p>

					Bambang Yudhoyono.	pada pergerakan buruh.
3.	Zukhrufah Dien Ardlillah (2017)	Fenomena Subkultur Punk di Kota Bandung dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Gerakan Front Anti Fasis 2015-2016)	<b>Teori:</b> 1. Teori dan Konsep Pertahanan Negara 2. Konsep Peperangan Asimetris. 3. Konsep dan Dinamika Kebudayaan 4. Teori dan Konsep Gerakan Sosial	1. Kelompok punk di Bandung dipengaruhi oleh globalisasi sehingga mengakulturasi budaya dan membentuk subkultur baru di Kota Bandung. 2. FAF memiliki dampak konstruktif dan deskriptif bagi pembangunan Kota Bandung. 3. FAF dibagi menjadi punk idealis, punk ideologis, dan punk non-ideologis. 4. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah melalui strategi komunikasi dan hegemoni sosial	Meneliti dan menganalisis keterlibatan pemuda dalam gerakan sosial.	1. Analisis terkait keterlibatan kaum terpelajar dalam Anarko Sindikalisme. 2. Strategi pemerintah Kota Bandung menghadapi Anarko Sindikalisme

		<p>5. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats</i>)</p> <p>6. Konsep Hegemoni</p> <p><b><u>Metode Penelitian:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.</li> <li>- Analisis Data hasil penelitian</li> </ul>	<p>budaya bersama dengan Polrestabes Bandung, dan Kodam III/Siliwangi.</p>		<p>pada momentum <i>mayday</i> 2019.</p>
--	--	--	--	--	--

			menggunakan pendekatan SWOT.			
4.	Victor Jacob Lucas, Djoko Andreas Novalino, dan Moch. Rofiq (2017)	Penerapan Komunikasi Sosial (Komsos) dalam Mendeteksi dan Mencegah Aksi Terorisme di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung.	<p><b>Teori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Komunikasi Sosial.</li> <li>2. Konsep Deteksi dan Cegah Terorisme</li> </ol> <p><b>Metode</b></p> <p><b>Penelitian:</b></p> <p>Kualitatif yang bersifat deskriptif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi komsos masih bersifat umum dan kurang tepat sasaran dalam mendeteksi dan mencegah aksi terorisme.</li> <li>2. Strategi komsos Kodim 0618/BS yaitu <i>ideation, encoding, encode, dan decoding</i></li> <li>3. Kemampuan intelektual dan kemampuan fisik dibutuhkan dalam mendeteksi dan mencegah aksi terorisme.</li> <li>4. Kendala yang dialami yaitu keterbatasan SDM, Babinsa tidak dipersenjatai, perlu adanya pengadaan kendaraan sipil, dan penyediaan <i>cybernet</i> yang</li> </ol>	Analisis terkait komunikasi strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengantisipasi pemikiran radikal.	Berfokus pada Pemerintah Jawa Barat tidak hanya pada TNI.

				terhubung dengan badan cyber yang berada di Kodam, kepolisian, pemerintah daerah, BAIS, dan BIN. Selain itu, penguatan bahasa dan budaya Sunda belum maksimal, pengetahuan dan pendidikan dalam berkomunikasi dengan lapisan masyarakat, keterbatasan teknologi untuk percepatan informasi.		
5.	Hery Setiawan dan Mochammad Arif Affandi (2017)	Strategi Perjuangan Serikat Buruh dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang.	<b><u>Teori/Konsep:</u></b> 1. Konflik dan Gerakan Sosial Buruh 2. Strategi Gerakan Sosial	1. Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ)-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menggunakan strategi gerakan massa dan advokasi. 2. Penggalangan kekuatan dilakukan melalui internal (kalangan buruh) dan eksternal (masyarakat, mahasiswa, LSM, dan akademisi).	Strategi buruh dalam menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah dan pemilik modal. Bagaimana respon	Tidak menyoroti strategi pemerintah dalam menghadapi tuntutan buruh yang anarkis.

			<p><b>Metode Penelitian:</b></p> <p>Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.</p> <p>Penentuan narasumber dilakukan dengan cara <i>purposive sampling</i>.</p> <p>Pencarian data dilakukan secara interaktif, sampai tuntas, dan jenuh.</p>	<p>3. Advokasi memiliki kedudukan yang mempengaruhi besar kecilnya upah.</p> <p>4. SBPJ memiliki perwakilan di Dewan Pengupahan Jombang tetapi posisinya digeser oleh Serikat Buruh Kuning yang kongkalikong dengan pemerintah.</p>	<p>pemerintah terhadap aksi unjuk rasa buruh.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

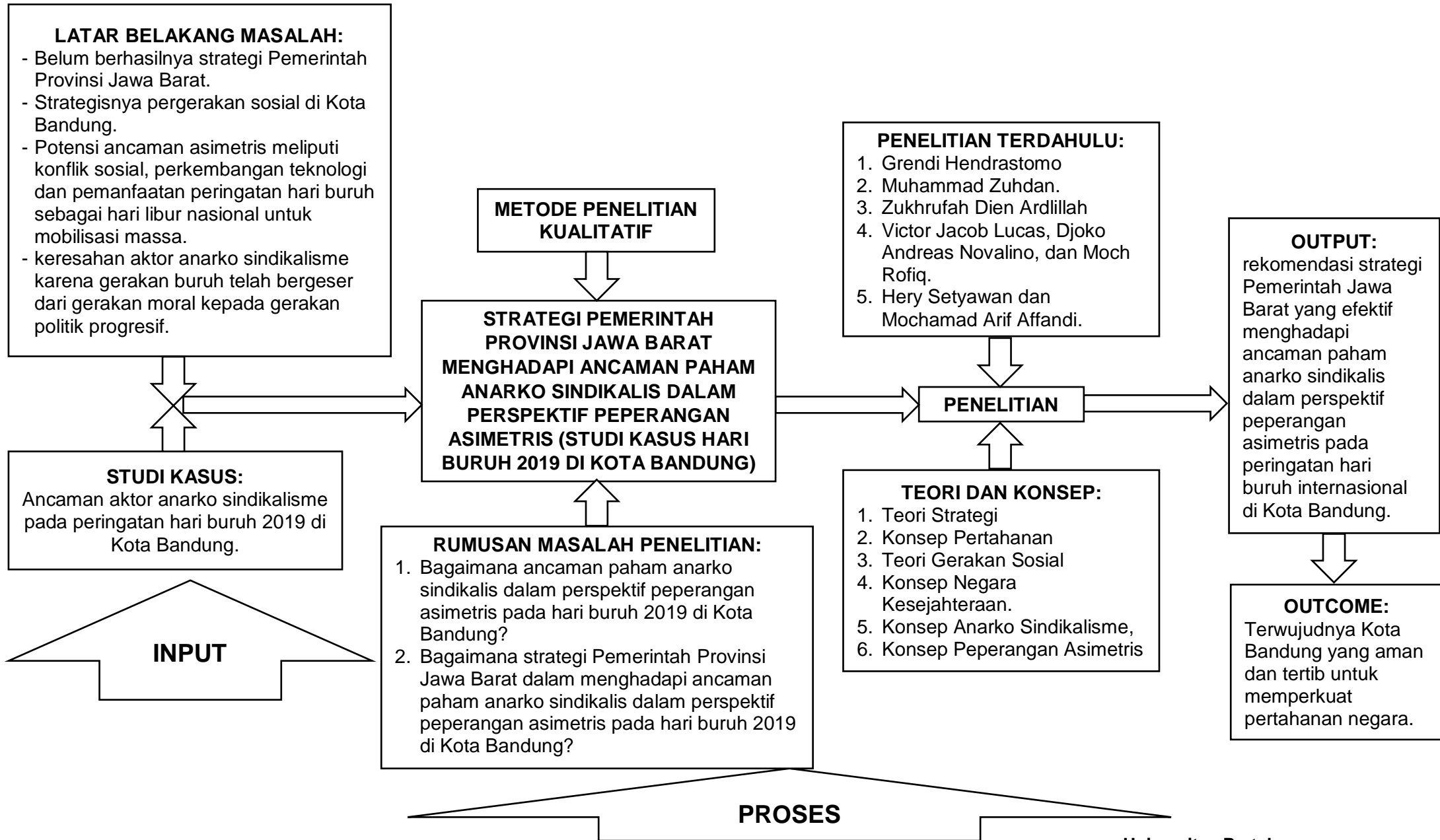
Sumber: diolah peneliti (2020)

### 2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan jalur pikiran peneliti secara logis atau rangkaian penalaran kerangka pemikiran mulai dari munculnya permasalahan, berbagai faktor termasuk teori yang berhubungan dengan masalah, proses analisis sampai dengan kesimpulan (Tim Penyusun Unhan, 2019). Permasalahan penelitian bermula dari penyusupan aktor anarko sindikalisme yang menunggangi peringatan hari buruh internasional 2019 di Kota Bandung. Penyusupan anarko sindikalisme tersebut merupakan ancaman bagi pertahanan nirmiliter yang bersifat asimetris dengan memanfaatkan konflik sosial, isu buruh, dan perkembangan teknologi. Merespon hal tersebut, pemerintah memerlukan strategi pertahanan negara mencakup apa yang dipertahankan (*ends*), dengan apa mempertahankan (*means*), dan bagaimana mempertahankan (*ways*).

Kota Bandung menjadi sasaran strategis bagi kalangan anarko sindikalisme. Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat, tempat berdirinya Front Anti Fasis pada 1995, dan lokasinya berdekatan dengan DKI Jakarta. Selain itu, aktor anarko sindikalisme mengalami keresahan akan melemahnya perjuangan kesejahteraan buruh karena pergeseran gerakan buruh pada politik praktis dan persatuan serikat buruh dan pemerintah yang ditandai dengan pertemuan Serikat Buruh dan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Sudut Pandang Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019 di Kota Bandung)”.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sebelum turun ke lapangan, peneliti mempersiapkan dan mempelajari teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Pasca penelitian, peneliti diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian, mencapai tujuan penelitian (*output*), dan tujuan jangka panjang penelitian (*outcome*)



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti, 2020)

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode dan Desain Penelitian**

##### **3.1.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah merujuk pada kegiatan penelitian yang bercirikan rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2019, h. 2). Rasional merujuk pada cara masuk akal yang terjangkau oleh penalaran manusia berupa penggunaan teori. Empiris merujuk pada cara yang dapat dilihat oleh indera manusia. Kemudian sistematis merujuk pada proses menggunakan langkah-langkah penelitian yang bersifat logis.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya perubahan masalah atau judul penelitian sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Penelitian dimulai melalui pengamatan secara mendetail kepada realitas sosial empiris. (Sugiyono, 2019, h. 33). Realitas sosial tersebut harus dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Peneliti kualitatif harus bersifat "*perspetif emic*" yaitu memperoleh data bukan yang dipikirkan oleh peneliti tetapi sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data (Sugiyono, 2019, h. 283). Realitas sosial dalam penelitian kualitatif mencakup keseluruhan konstruksi dan interpretasi dari keseluruhan data terkait suatu kasus yang terlihat di lapangan termasuk hal dibalik kasus yang terlihat tersebut (Sugiyono, 2019, h. 20). Oleh karena itu, penelitian lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna.

Peneliti bertindak sebagai *human instrument* sehingga harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Pengetahuan tersebut akan digunakan untuk menanyakan, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2019, h. 17). Bagi peneliti kualitatif, teori merupakan panduan dalam mengenali berbagai aspek dari objek yang diteliti dan menganalisis data yang terkumpul untuk menemukan makna, keunikan, membuat kategorisasi, dan mengkonstruksi hubungan antar kategori (Sugiyono, 2019, h. 284). Oleh karena itu, peneliti akan menetapkan fokus penelitian, informan sebagai sumber data, teknik pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan lapangan terkait strategi pemerintah menghadapi aktor anarko sindikalisme pada momentum hari buruh.

### **3.1.2. Desain Penelitian**

Peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Desain penelitian adalah *blue print* (induk) penelitian yang mencakup pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana data relevan, data apa yang harus dikumpulkan, dan bagaimana menganalisis hasilnya (Yin, 2015, h. 28). Penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif yang studi yang mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Peneliti akan menggunakan studi kasus tunggal terkait ancaman paham anarko sindikalisme pada hari buruh 2019 di Kota Bandung (Creswell, 2015, h. 135) Namun demikian, walaupun berfokus pada satu gagasan, kasus tersebut dapat saja berkembang untuk mengeksplorasi dan membandingkan hubungan antar gagasan dalam kasus tersebut (Creswell, 2019, h.136).

## **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan lokasi yang relevan untuk memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tempat atau instansi yang dituju oleh peneliti yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengambil data di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Bakesbangpol) Kota Bandung, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Jawa Barat dan Kota Bandung, serta gerakan sosial yang seringkali dilaksanakan di Gedung Sate, reruntuhan RW 11 Tamansari, dan Jembatan Cikapayang. Peneliti memilih tempat penelitian berdasarkan pertimbangan ketepatan lokasi penelitian, aspek waktu, dan keterjangkauan oleh peneliti.

### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan pedoman waktu penelitian. Penelitian berjudul “Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019 di Kota Bandung)” yang dilaksanakan mulai dari Mei 2020 sampai dengan Maret 2021. Rincian waktu penelitian tesis diuraikan dalam Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Pembuatan Tesis

No	Kegiatan	Waktu Pembuatan Tesis										
		Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021
1	Penentuan Dosen Pembimbing											
2	Penyusunan Proposal											
3	Bimbingan Proposal (Dosen Pembimbing 1)											
4	Bimbingan Proposal (Dosen Pembimbing 2)											
5	Ujian Proposal											
6	Perbaikan Hasil Ujian Proposal											
7	Penelitian dan Penyusunan Data Hasil Penelitian											
8	Seminar Hasil Penelitian											
9	Perbaikan Seminar Hasil Penelitian											
10.	Sidang Tesis											
11	Perbaikan Sidang Tesis											
12	Batas Akhir Pengumpulan Tesis											
13	Wisuda											

Sumber: diolah peneliti (2020)

### 3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif merujuk pada kebaruan informasi dari situasi sosial di lapangan. Peneliti memperoleh fokus penelitian melalui penjelajahan umum di lapangan untuk memperoleh gambaran situasi sosial secara luas dan mendalam. Spradley menyatakan bahwa alternatif dalam penentuan fokus penelitian yaitu fokus terhadap permasalahan yang disarankan informan, fokus terhadap domain-domain tertentu (*organizing domain*), fokus terhadap nilai temuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan fokus terhadap permasalahan dengan teori yang sudah ada (Sugiyono, 2019, h. 2019). Fokus penelitian kualitatif ini adalah Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada peringatan Hari Buruh 2019.

#### 3.3.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan dengan teknik pengambilan sampel untuk memperoleh informasi yang maksimum. Pengambilan sampel dilakukan melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian, apabila informasi tersebut belum memuaskan, peneliti menerapkan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informasi yang semakin besar dan lengkap tentang situasi sosial yang diteliti. Menurut Bondan dan Biklen, unit sampel akan berwujud *continuous adjustment of focusing of the sample* karena semakin lama sampel yang diambil akan semakin terarah dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019, hh 289-290).

Sampel dapat diambil saat peneliti memasuki lapangan dan melaksanakan penelitian (*emergent sampling design*). Sampel dinyatakan memadai apabila berada data sudah jenuh dan tidak memberikan informasi baru yang berarti (*redundant*) (Sugiyono, 2019, h. 290). Namun demikian, penelitian kualitatif tidak mengharuskan informan yang banyak tetapi

keragaman variasi informasi yang diperoleh. Spradley menyatakan bahwa informan yang dipilih memenuhi beberapa kriteria yaitu sampel yang memahami (mengetahui dan menghayati) permasalahan yang hendak diteliti, masih berkecimpung dalam kegiatan yang diteliti, mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi, tidak menyampaikan informasi yang subjektif (kemasan sendiri), dan tergolong cukup asing dengan peneliti (Sugiyono, 2019, h. 291).

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai studi kasus/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi:

- a. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karena itu, Pengumpulan data sebaiknya dimulai dari informan kunci untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih informan yaitu peserta aktif dari suatu kelompok, organisasi, atau budaya; terlibat dalam situasi sosial yang diteliti; memiliki waktu yang memadai; dan menyampaikan informasi secara natural (bahasa sendiri).
- b. Informan utama adalah orang yang memahami secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang dipelajari.
- c. Informan pendukung adalah informan yang memberikan tambahan informasi sebagai pelengkap analisis dan pembahasan yang tidak diperoleh dari informan kunci dan informan utama (Heryana, 2018. h. 4).

Informan penelitian tersebut disesuaikan dengan konteks permasalahan yang hendak diteliti sehingga tidak harus mencakup ketiga jenis informan. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Instansi
<b>Informan Kunci</b>			
1.	Dedi	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
2.	Aan (samaran)	Aparatur Sipil Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
<b>Informan Utama</b>			
3.	Anto (samaran)	Aparat Kepolisian	Polrestabes Bandung
4.	Erry Gandana	Kepala Sub Bidang Ideologi	Bakesbangpol Kota Bandung
5.	Dadang Sobandi	Lurah	Kelurahan Tamansari
6.	Roy Jinto	Ketua	DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat.
7.	Iyus	Wakil Ketua I Bidang Organisasi	Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bandung sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung.
8.	Hardianto	Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas/Divisi	SMK Nasional Kota Bandung

		Dana Usaha-Dunia Industri)	
9	Endang	Warga	Warga RW 11 Penggusuran Tamansari Bandung.
10.	Febri	Salah Tangkap Hari Buruh 2019	Karyawan Swasta.
<b>Informan Pendukung</b>			
11.	Prof Muradi	Dosen Peperangan Asimetris	Universitas Pertahanan
12.	Ando (Samaran)	Mahasiswa Perguruan Tinggi di Bandung	Universitas
13.	Fikri	Mahasiswa	UGM
14.	Appridzani Syahrullah	Mahasiswa (Fokus Bidang Perburuhan)	UGM
15.	Letkol R. Sefi Tribiwiyono	Kasi Envamil dan Nirmil / Mantan Staff Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) Jawa Barat	Kementerian Pertahanan RI

Sumber: diolah peneliti (2021)

### 3.3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial. Menurut Spradley, penelitian kualitatif menggunakan istilah *social situation* yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2019, h. 301). Objek penelitian adalah ancaman paham anarko sindikalis pada peringatan hari buruh 2019 di Kota Bandung.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen atau alat penelitian. Peneliti harus mampu memahami metode penelitian kualitatif, penguasaan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti masuk dalam objek penelitian baik dari segi akademik maupun logistik. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber data seperti lewat orang lain maupun dokumen (Sugiyono, 2019, h. 296). Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

#### 3.4.1. Observasi Terus Terang dan Tersamar

Creswell mengatakan bahwa observasi adalah sebuah proses pengambilan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset (Herdiansyah, 2015, h. 130). Sanifah Faisal (Sugiyono, 2019, h. 297) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terus terang dan tersamar, dan observasi yang tak terstruktur. Observasi terus terang merupakan kondisi dimana pihak yang diteliti mengetahui bahwa ia sedang diteliti. Namun, peneliti juga dapat tersamar/ tidak terus terang untuk menghindari data yang dicari merupakan data rahasia dari informasi yang mendukung penelitian.

Peneliti melakukan observasi terhadap gerakan sosial di Kota Bandung pada tahun 2020 sampai awal tahun 2021 sebagai gambaran memahami anarko sindikalis. Hal ini didasarkan pada informasi berbagai narasumber baik Polrestabes Bandung maupun akademisi yang bergerak dibidang perburuhan dan gerakan sosial. Narasumber tersebut menyatakan bahwa kegiatan anarko sindikalis umumnya berada di Taman Cikapayang yang berada di bawah jembatan layang/ *fly over* Pasopati. Observasi penelitian dilakukan pada Pasar Gratis Kota Bandung, Aksi Kamisan Bandung, dan Forum Juang Tamansari Bandung.

### **3.4.2 Wawancara Semi Terstruktur**

Berdasarkan bentuknya, teknik wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur bertujuan memahami suatu permasalahan tertentu yang menempatkan peneliti pada posisi sebebas-bebasnya dalam bertanya, mengatur alur, dan *setting* wawancara. Namun demikian, *guideline interview* (pedoman wawancara) tetap diperlukan dalam mengatur alur pembicaraan dan prediksi waktu wawancara. Pertanyaan penelitian bersifat terbuka sehingga jawaban dari informan tidak dibatasi asalkan tidak keluar dari konteks pembicaraan. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan catatan kecil sebagai *reminder* (pengingat) alur pembicaraan berupa kontrol waktu dan kecepatan wawancara (Herdiansyah, 2015, hh. 66-69).

### **3.4.3. Analisis Dokumen**

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen yang telah ada akan mendukung hasil penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Selain itu, dokumen yang dapat digunakan yaitu diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan,

logs, pengumuman, dan dokumen pemerintah (undang-undang dan peraturan pemerintah) (Bandur, 2016, h. 109). Dokumen yang dijadikan bahan analisis peneliti yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diperoleh dari Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat.

### 3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas dibandingkan aspek realibilitas. Data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Realitas data bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia berdasarkan latar belakangnya. Pada penelitian ini, realitas data penelitian akan menggunakan latar belakang penelitian peperangan asimetris. Pada aspek realibilitas, realitas bersifat majemuk dan dinamis sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula (Sugiyono, 2019, h. 363). Menurut Sugiyono terdapat beberapa tahap uji keabsahan data yaitu:

- a. Uji kredibilitas. Uji kredibilitas dapat dilakukan melalui triangulasi sumber dan bahan referensi. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai informasi/ data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data. Kemudian, bahan referensi merujuk pada rekaman wawancara, foto-foto, dan dokumen autentik yang akan dijadikan sebagai alat pendukung penelitian agar dapat dipercaya.
- b. *Transferability* berkaitan dengan derajat ketepatan dan dapat atau tidaknya diterapkan pada lokasi pengambilan sampel. Selain itu, laporan hasil penelitian harus disusun secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar dapat diputuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan pada tempat lain.
- c. *Dependability* yaitu audit terhadap “jejak aktivitas lapangan”/ proses penelitian. Auditor atau pembimbing melakukan audit penelitian mulai dari penentuan masalah/fokus, memasuki

lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, menguji keabsahan data, sampai dengan pembuatan kesimpulan.

- d. *Confirmability* yaitu pengujian terhadap hasil penelitian berdasarkan dan proses penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2019, hh. 365-373).

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan agar hasil penelitian dapat dipercaya oleh berbagai pihak diantaranya penguji, pihak yang berkepentingan, maupun masyarakat luas. Peneliti bertugas dalam melakukan uji kredibilitas dan *transferability*. Kemudian, auditor dan penguji mengambil peranan penting dalam *dependability* dan *confirmability* untuk menguji proses penelitian.

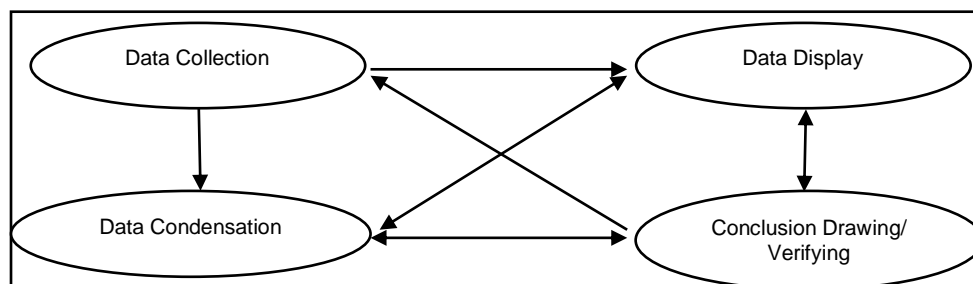
### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang ada dalam proposal penelitian. Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuan tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Kegiatan ini dilakukan melalui pengorganisasian data, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2019, h. 319).

Analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum di lapangan diperoleh melalui studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian (Sugiyono, 2019, h. 320). Kemudian, Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui:

- a. *Data collection* (pengumpulan data) adalah pengumpulan data diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi terus

- terang dan tersamar, wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen.
- b. *Data condensation* (kondensasi data) adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, *interview*, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan.
  - c. *Data display* (penyajian data) yaitu penulisan temuan secara naratif, bagan, hubungan antar kategori, maupun *flowchart* untuk memudahkan pemahaman studi kasus dan rencana kerja selanjutnya.
  - d. *Closing drawing/verification* yaitu temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa kejelasan gambaran suatu objek yang diteliti dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori, deskripsi atau gambaran suatu objek.



**Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/ Model Interaktif**

Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019, h. 330)

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandung**

Secara geografis, Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Kota Bandung memiliki luas sebesar 16.729,65 Ha. Berdasarkan sejarah, Kota Bandung awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung. Bupati Bandung ke-6, Wiranatakusumah II melalui Surat Keputusan 25 September 1810 memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dari Krpyak (Dayeuh Kolot) ke Kota Bandung karena Krpyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan dan rawan banjir bila musim hujan (Admin Bandung.go.id, 2016). Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu: i) sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; ii) sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; iii) sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan iv) sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung (Pemerintah Kota Bandung, 2017).



**Gambar 4.1. Peta Kota Bandung**

Sumber: Kotakita (2016)

Lokasi Kota Bandung cukup strategis dari aspek komunikasi, perekonomian, dan keamanan. Pertama, pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur memudahkan hubungan dengan ibukota negara sedangkan jalan raya Utara dan Selatan memudahkan lalu lintas daerah perkebunan (Subang dan Pengalengan). Kedua, letaknya tidak terisolasi sehingga memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru (Admin Bandung.go.id, 2016).

Iklim Kota Bandung mengalami peningkatan pasca minimnya Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan pencemaran udara. Hasil penelitian Departemen Teknik Lingkungan ITB, peningkatan pencemaran udara berupa kandungan CO sebesar 38%, NO<sub>x</sub> sebesar 59%, dan HC sebesar 50% dilatarbelakangi akibat masuknya masuknya kendaraan melalui gerbang tol Pasteur dan jembatan Cikapayang pasca keberadaan Tol Cipularang. Selain itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung mengatakan bahwa pencemaran Kota Bandung dilatarbelakangi oleh tidak terawatnya mesin kendaraan dimana berdasarkan hasil uji emisi bahwa 60% kendaraan berbahan bakar solar tidak memenuhi baku mutu emisi dan kendaraan berbahan bakar bensin tidak memenuhi baku mutu emisi sebesar 10%-52%.

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung, struktur ruang Kota Bandung dibagi menjadi 2 Pusat Pelayanan Kota dan 6 Wilayah Pengembangan. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di Kota Bandung yaitu:

**Tabel 4.1. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kota Bandung**

No	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1.	Kawasan Perumahan	<p><b>Perumahan kepadatan tinggi:</b> Kec. Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiaracandong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.</p> <p><b>Perumahan kepadatan sedang:</b> Kec. Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru.</p> <p><b>Perumahan kepadatan rendah:</b> Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan.</p> <p>Pengembangan secara vertical diperkenankan pada kawasan</p>

		<p>perumahan kepadatan sedang sampai tinggi.</p> <p>Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara.</p>
2.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	<p><b>Kawasan Jasa:</b>  <b>pengembangan kawasan jasa professional, perdagangan, pariwisata, keuangan</b> ke wilayah Bandung Timur, Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder berdasarkan peruntukannya.</p> <p><b>Pasar Tradisional:</b> peningkatan Pasar Induk Gedebage terpadu; pembangunan kembali Pasar Andir, Pasar Kiaracandong, Pasar Ciroyom, dan lain-lain; pengaturan dan penataan pasar yang sesuai peruntukannya; relokasi pasar lingkungan Kelurahan/Kecamatan; serta pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta.</p> <p><b>Pusat Perbelanjaan:</b>  pengendalian pusat belanja di Bandung Barat, pengembangan pusat belanja ke Bandung Timur, serta pengembangan pusat belanja</p>

		dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan artileri dan kolektor.
3.	Kawasan Perkantoran	Mempertahankan perkantoran pemerintah berskala Nasional, Provinsi, dan Kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan kantor pemerintahan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage
4.	Kawasan Industri dan Perdagangan	<b>Kawasan Industri Ringan dan Pergudangan:</b> mempertahankan industri kecil yang ada dilingkungan perumahan; mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, dan Gedebage; serta kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer/ akses peti kemas Gede Bage. <b>Industri Rumah Tangga:</b> penetapan industri rumah tangga; pengembangan fasilitas Kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; serta revitalisasi bangunan tua/ bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

5.	Kawasan Wisata Buatan	Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah; pembangunan objek wisata di wilayah Bandung Timur, mempertahankan objek wisata pendidikan dan wisata budaya kota; pembangunan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur; serta pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.
6.	Kawasan Pertanian	Mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung, dan Cibiru

Sumber: Pemerintah Kota Bandung (2017)

#### 4.1.2. Gambaran Umum Pemerintahan Jawa Barat

Anarko Sindikalisme menjadi sorotan dalam momentum *mayday* 2019 di Kota Bandung. Kota Bandung menjadi sasaran karena ibukota provinsi Jawa Barat dan lokasi kantor Gubernur Jawa Barat. Namun demikian, walaupun berada di Kota Bandung, massa aksi mengarahkan tuntutan mereka kepada Gedung Sate kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Bandung.

Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Hari Jadi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintah Jawa Barat. Berdasarkan sejarah, Provinsi Jawa Barat dibentuk oleh Hindia Belanda sebagai pelaksana

*Bestuurshervormingwet* pada tahun 1922. Kemudian berdasarkan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 1945, Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu dari 8 provinsi di Indonesia. Pada 27 Agustus 1945, Jawa Barat pernah menjadi Negara Pasundan sebagai salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun demikian, Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020).

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan potensi budaya dan pariwisata yang kaya. Penduduk Jawa Barat terdiri dari 45.340.800 jiwa. Potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki Jawa Barat dalam konstelasi nasional yakni pusat kegiatan manufaktur dan strategis nasional; berbatasan dengan ibukota negara; memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks; memiliki taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam; memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan instalasi vital nasional baik dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan (litbang), dan pertahanan keamanan (hankam) yang diantaranya berkelas dunia (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020).

Pemerintah Jawa Barat memiliki kontribusi yang besar terhadap nasional. Pertama, kontribusi terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) Nasional sebesar 14.33%. Kedua, kontribusi terhadap PDB Sektor Industri Manufaktur 60%. Ketiga, kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 34.46%. Keempat, produk beras nasional sebesar 17.76%. Kelima, provinsi produsen komoditi ekspor nasional yaitu 18.64% ke AS dan 12.52% ke Jepang. Selain itu, kontribusi Jawa Barat terhadap ibukota negara meliputi penyedia air baku, penyedia bahan pangan, dan penyedia lahan dan infrastruktur pendukung.

Pemerintah Jawa Barat bergerak berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi Pemerintah Jawa Barat yaitu **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan**

**Kolaborasi.** Adapun misi yang digunakan untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu:

- a. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa.
- b. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- d. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif.
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020).

#### **4.1.3. Gambaran Umum Peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung**

Tenaga kerja dibagi menjadi pengusaha dan pekerja/buruh. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak yang dimiliki orang perseorangan, persekutuan, ataupun badan hukum baik milik swasta ataupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kategorisasi tenaga kerja bersifat umum bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Serikat pekerja dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan dari pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun. Serikat buruh merupakan wadah untuk memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya. Pengurus serikat pekerja/ serikat buruh umumnya adalah pensiunan atau mantan karyawan yang dipecat walaupun ada yang masih aktif bekerja (Iyus, komunikasi personal, 21 Desember 2020).

Peringatan hari buruh internasional diperingati setiap 1 Mei dipicu oleh terjadinya Peristiwa Haymarket Affair 1886 di Chicago Amerika. Pada saat itu, sebanyak 400.000 buruh melakukan pemogokan dan menuntut waktu kerja 8 jam. Aksi buruh tersebut disambut aksi represif Pemerintah AS dengan menjatuhkan eksekusi terhadap 5 tokoh anarkis dengan tuduhan melemparkan bom terhadap polisi. Empat tokoh anarkis yang dieksekusi yaitu Parsons, Angels, Spies, dan Fischer pada tahun 1887 sedangkan Lingg melakukan bunuh diri di penjara (Anjani, 2020, h. 5).

Tidak ada perbedaan antara peringatan hari buruh sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tahun 2014. Penetapan hari libur didasari oleh Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur. Pada prinsipnya, kegiatan *mayday* meliputi bakti sosial, seminar, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa ke jalan. Perusahaan dapat tidak meliburkan buruh apabila sangat dibutuhkan untuk produksi sehingga dihitung sebagai lembur lembur (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020). Namun demikian, pasca ditetapkan sebagai libur nasional aksi massa buruh tidak hanya dilakukan terpusat di Gedung Sate Kota Bandung tetapi di setiap kota/kabupaten (Dedi, komunikasi personal, 30 Januari 2021).

Unjuk rasa buruh di Kota Bandung hanya dilaksanakan oleh Serikat Buruh. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh pembakaran Gedung Sate oleh 7000 massa buruh pada peringatan hari buruh 2001 (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020). Pada waktu itu, aksi massa aksi selama tiga hari berturut-turut membuat kerusakan sehingga membuat Kota Bandung lumpuh total karena menolak Kepmenakertrans 78 dan 111/Men/2001 yang dianggap kurang atau tidak melindungi pekerja/ buruh karena

memberikan kemudahan pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal yang ditolak meliputi pengusaha lebih mudah mengambil tindakan PHK sebagai jalan pintas penyelesaian masalah industrial, kemudahan PHK mengakibatkan tingginya angka pengangguran, program privatisasi BUMN dengan program pensiun yang dipercepat sebagai cara melakukan PHK massal, dan kurang mewakili rasa keadilan pihak buruh karena tidak adanya peran buruh yang berarti (tidak memperhatikan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas). Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat memberlakukan kembali Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 (Tim Peneliti SMERU, 2002).

Aksi demonstrasi hari buruh (*mayday*) yang disertai aksi anarkis di Kota Bandung pada tahun 2019 menjadi sorotan media dan masyarakat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan industri terbesar di Indonesia diantaranya Bekasi, Karawang, dan Bogor. Namun demikian, Kota Bandung walaupun bukan kota Industri tetapi menjadi sentral bagi demonstrasi *mayday* karena pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan lokasi sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Buruh. Oleh karena itu, puncak peringatan hari buruh pasti dilakukan di Gedung Sate. Di bawah ini terdapat tabel sebaran jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat pertanggal 1 Januari 2021:

**Tabel 4.2. Informasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Tahun 2020 (Data Pertanggal 1 Januari 2021)**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja			
			WNI		WNA	
			Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Kab. Bandung	8260	159202	68473	181	46
2	Kab. Bekasi	7488	301735	126748	3014	162
3	Kota Bekasi	6272	64417	28504	185	16
4	Kab. Bogor	4420	130064	80174	482	53
5	Kab. Karawang	2980	161919	69339	1239	56
6	Kota Depok	2377	28490	15386	82	19
7	Kota Bandung	2273	53754	54029	268	67
8	Kota Bogor	1822	20834	10651	53	11

9	Kab. Cirebon	1605	34001	18587	122	5
10	Kota Cirebon	1357	20458	7709	9	16
11	Kab. Purwakarta	1105	45416	37016	398	73
12	Kab. Bandung Barat	1048	28306	13776	90	36
13	Kab. Garut	943	8727	20635	18	1
14	Kab. Indramayu	935	11521	2912	35	2
15	Kab. Sukabumi	920	36333	75367	172	33
16	Kota Tasikmalaya	815	11121	6385	18	0
17	Kab. Cianjur	755	17616	18006	103	32
18	Kota Cimahi	690	29945	29388	51	22
19	Kab. Subang	667	16527	54106	132	20
20	Kota Sukabumi	598	5512	2536	1	0
21	Kab. Sumedang	576	11331	11331	54	3
22	Kab. Majalengka	527	9940	24017	37	19
23	Kab. Kuningan	518	3303	2044	6	0
24	Kab. Tasikmalaya	370	2337	2043	4	2
25	Kab. Ciamis	279	2673	1417	0	0
26	Kab. Banjar	222	2456	1575	1	0
27	Kab. Pangandaran	178	882	390	1	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (2021)

Peringatan Hari Buruh di Jawa Barat dilakukan melalui *Demo Creation Labour*. Namun demikian, serikat buruh masih melakukan unjuk rasa di Gedung Sate. Pada 1 Mei 2019, sebanyak 2.500 anggota KSPSI akan berkumpul di Monumen Juang pukul 10.30 dan berjalan bersama ke Gedung Sate. Adapun tuntutan buruh yaitu pengesahan segera Upah Minimum Kota/Kabupaten Kawang dan Bogor; revisi Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di Daerah Provinsi Jawa Barat karena lebih menguntungkan industri ketimbang buruh; dan menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melengkapi Perda tentang Pengawasan Ketenagakerjaan karena banyaknya perusahaan sewenang-wenang memberikan upah UMK (Persiana, 2019).

Aksi kekerasan terjadi terhadap dua jurnalis pada peringatan hari buruh 2019 di Bandung. Dua jurnalis Tempo yaitu fotografer Prima Mulia dan jurnalis lepas, Iqbal Kusumadireza mengalami tindakan kekerasan dari Tim Prabu Polrestabes Bandung. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis

Independen (AJI), kedua jurnalis tersebut sedang meliput keributan antara polisi dengan sekumpulan massa berbaju hitam di persimpangan jalan Singaperbangsa, Dipatiukur. Selain itu, kedua jurnalis sudah menunjukkan identitas pers tetapi menerima tindakan kekerasan dari petugas (Edupublik Jabar, 2019). Tim Prabu Polrestabes Bandung adalah tim yang berada dibawah kendali bagian operasi yang diambil dari setiap fungsi. Tugasnya adalah patrol daerah yang dianggap rawan untuk mencegah terjadinya tindakan pidana. Oknum tim Prabu telah didisiplinkan di internal melalui divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sedangkan kamera sudah dikembalikan kepada jurnalis (Anto, komunikasi personal, 22 Januari 2021).

Perwakilan buruh melakukan konferensi pers sebelum peringatan hari buruh 2019. Perwakilan buruh dan aliansi mahasiswa dari Gerakan Rakyat Anti-Kapitalisme (GERAK)) melakukan jumpa pers di Kaka Kafe pada 29 April 2019. Tuntutan yang diangkat adalah aksi langsung di Gedung Sate karena pergantian pemimpin daerah bahkan pemilu 2019 belum mengubah nasib buruh menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang kerja, tidak dipenuhinya hak maternitas, dan diskriminasi upah masih terjadi pada perempuan (Simbolon, 2019).

Aksi anarkis menimbulkan kerugian bagi buruh. Pengerusakan fasilitas umum membuat *framing* negatif bagi buruh, menimbulkan anti pati, dan aura ketakutan dari masyarakat sekitar. Akan tetapi, aksi anarkis tetap dilabelkan kepada buruh walaupun bukan dilakukan oleh buruh karena bertepatan dengan momentum peringatan hari buruh 2019. Roy Jinto menyatakan: “jadi seolah-olah ditanamkan seperti itu karena sebenarnya buruh tidak melakukan tetapi pada momentum gerakan buruh *mayday* ada kejadian itu sehingga disebut bagian dari buruh walaupun kita sudah lelah mengklarifikasi di berbagai media juga sulit karena momentumnya *mayday*” (komunikasi personal, 11 Desember 2020).

Tuntutan Serikat Buruh pada tahun 2019 mengarah pada adanya perwakilan buruh di parlemen. Gerakan buruh cenderung melemah pasca

reformasi karena adanya kebebasan untuk membuat serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal ini mengakibatkan serikat buruh belum memiliki satu partai politik buruh sebagai alat perjuangan agar mampu memasuki sistem pemerintahan dan parlemen untuk membuat kebijakan atau regulasi yang berpihak pada kaum buruh (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020).

Serikat Pekerja/Serikat mulai menyadari bahwa masuknya aktivis buruh sebagai perwakilan buruh di parlemen atau pemerintahan akan mempengaruhi kebijakan terutama yang berkaitan dengan buruh. Namun demikian, masuknya 1 perwakilan buruh di parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 belum maksimal tetapi minimal memiliki orang didalam dan mengetahui informasi terkait proses di parlemen. Berikut kutipan dari Roy Jinto adalah sebagai berikut:

Ya, kalau kita melihat dalam perspektif pembuatan kebijakan/ undang-undang tentu adalah pemerintah dan DPR. Tentu, gerakan kaum buruh secara simultan harus membuat perubahan sehingga ia harus masuk juga mempengaruhi kebijakan di dalam sistem pemerintahan baik di parlemen dan ekstra parlementer di luar sangat diperlukan. Sejak tahun 2019, kita mulai mendorong teman-teman buruh untuk masuk parlemen sehingga dengan leluasa memperjuangkan kebijakan melalui regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah bersama DPR termasuk juga kita ke depan akan merancang/ mencoba menyatukan kekuatan agar kaum buruh bisa menjadi Walikota/ Bupati/ Gubernur walaupun sampai saat ini buruh belum mempunyai partai politik untuk itu. Pada pileg 2019, ada beberapa buruh yang masuk dalam parlemen diantara Obon Tabroni (DPR RI). Sebenarnya efektif belum karena hanya 1 orang, tetapi minimal kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan buruh yang duduk tentang jadwal-jadwal yang selama ini kita tidak tahu dan

aturan yang akan dibuat kita tahu. Jadi, kan kita mendapatkan informasi kayak gitu walaupun 1-3 orang tidak merubah sesuatu, tetapi kita memiliki orang di dalam sehingga kita mengetahui/ mendapatkan informasi bagaimana proses-proses yang akan dilakukan di DPR. Dan pada saat pembahasan UU minimal dia paham tentang perburuhan (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020).

Namun di sisi lain, perjuangan melalui parlemen tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan buruh. Aktivis yang bergabung ke pemerintahan cenderung luntur kekritisannya dan tidak bisa mencegah regulasi yang tidak berpihak pada buruh. Oleh karena itu, aktivis buruh yang secara hati nurani berjuang untuk buruh tidak akan bergabung ke pemerintahan (Iyus, komunikasi personal, 21 Desember 2020).

Serikat Buruh sudah mengantisipasi adanya anarko. Hal ini dikarenakan setiap aksi tidak dapat melarang siapapun untuk turun dan pengalaman keikutsertaan anarko pada *mayday* 2017. Merespon hal tersebut, pada peringatan hari buruh 2019, serikat buruh memenuhi Gedung Sate dan dibarikade oleh laskar-laskar buruh agar tidak diinfiltrasi oleh aktor anarko sindikalis.

Serikat buruh menolak adanya koordinasi dengan anarko pada peringatan hari buruh 2019. Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengakui bahwa koordinator lapangan (korlap) anarko seringkali menemui korlap DPD SPSI Jawa Barat untuk meminta orasi. Hal ini dikarenakan serikat pekerja/serikat buruh telah mempersiapkan mobil komando dan pengeras suara. Akan tetapi, penolakan anarko sindikalis untuk berorasi mengakibatkan aktor anarko sindikalis melakukan pengerusakan kendaraan buruh yang berada di Monumen Perjuangan (titik awal *longmarch* buruh ke Gedung Sate). Serikat pekerja/serikat buruh mengalami kerugian sebesar 270 juta rupiah akibat pencongkelan dan pencoretan kendaraan terutama mobil rental yang

digunakan serikat pekerja/serikat buruh dari Depok dan Bogor. Kerusakan ini telah dilaporkan ke Polrestabes Bandung tetapi belum ada proses tindak lanjutnya (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020).



**Gambar 4.2. Vandalisme Mobil Buruh pada peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung**

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Barat (2019)

Buruh membentengi anggota organisasi serikat pekerja/serikat buruh agar tidak terkontaminasi oleh anarko. Pemerintah melakukan koordinasi agar serikat pekerja/serikat buruh dengan buruh untuk waspada terhadap penyusupan yang mendorong adanya aksi pengerusakan pada unjuk rasa hari buruh 2019 (Aan, komunikasi personal 22 Desember 2020). Selain itu, serikat pekerja/ serikat buruh seringkali berkoordinasi dan diawasi oleh intel dari kepolisian dan tentara sebelum peringatan hari buruh (lyus, komunikasi personal, 21 Desember 2020).

Mahasiswa dilibatkan dalam hari buruh 2019. Serikat Buruh sudah berkali-kali turun bersama mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan tahun 2019 turun bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sepanjang sejalan dalam memperjuangkan aspirasi hak-hak buruh/ masyarakat tetapi aksinya harus damai (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020).

Polrestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap 561 peserta aksi yang diindikasikan aktor dan simpatisan anarko sindikalis. Pada peringatan massa aksi buruh 2019. Massa aksi yang ditangkap umumnya menggunakan baju hitam dan berasal dari kalangan pelajar dan tuna karya. Salah satu simpatisan aksi yang tertangkap, Febri mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan massa aksi adalah cuti hamil dan cuti

melahirkan bagi perempuan, dan jam kerja (Febri, komunikasi personal, 17 Januari 2021).

Infiltrasi anarko sindikalis dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Momentum hari buruh dimanfaatkan sebagai perjuangan revolusioner untuk melakukan perubahan sosial. Massa aksi yang terjaring umumnya berada pada usia 17-25 tahun. Kelompok *Bandung Supporter Alliance (BSA)* melakukan aksi vandalisme. Kelompok BSA sendiri terdiri dari supporter bola fanatic *club* Persib, anak jalanan, pengamen, punk, antifa, bandung football, hooligan, dan anarki (Polda Jabar, 2019). Namun demikian, massa yang dominan berasal dari kalangan pelajar (Anto, komunikasi personal, 9 Februari 2021).

Kepolisian melakukan tindakan pengecekan dan penggundulan. Pengecekan dilakukan sebagai antisipasi apabila terdapat senjata tajam yang mungkin dapat disalahgunakan. Namun, Febri tidak mengetahui adanya aksi kekerasan atau tidak karena banyaknya orang dan ia beserta kedua temannya tidak mengalami kekerasan (komunikasi personal, 17 Januari 2021). Kemudian, penggundulan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera (Muradi, komunikasi personal, 24 November 2020).



**Gambar 4.3. Penggundulan Massa Aksi pada Peringatan Hari Buruh 2019 di Polrestabes Bandung**

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Barat (2019)

Penggundulan dan kekerasan yang dilakukan Kepolisian sempat diperiksa oleh Komnas HAM. Komnas HAM menyoroti penggundulan yang

dilakukan. Penanggungjawab aksi buruh 2019 sekaligus ketua DPD SPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan bahwa tindakan tersebut bukan masalah karena untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan. Berikut merupakan pernyataan Roy Jinto:

Sempat di periksa Komnas HAM dan saya diperiksa juga di Komnas HAM berkaitan dengan itu. Itu karena adanya laporan anarko ke Komnas HAM, kemudian Komnas HAM datang ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung untuk mempertanyakan itu. Kemudian, karena saya kebetulan sebagai penanggungjawab pada kegiatan aksi buruh 2019 maka saya dimintai keterangan dan itu juga saya sampaikan ke Komnas HAM termasuk yang menggunduli itu juga ditanyakan oleh Komnas HAM terkait “ada aturannya gak”. Sepanjang kerangka pembinaan untuk menimbulkan efek jera, *punishment* walaupun kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat termasuk kaum buruh yang mobilnya dirusak. Saya bilang “ini daftar mobilnya, ini foto-fotonya”. Ya, sebenarnya kalau menggunduli itu, kalau berbicara tentang adil dan tidak adil terhadap korban, ya tidak adil juga. Tetapi karena mereka masih di bawah umur dan hanya boleh dilakukan pembinaan dan besok harus dikembalikan kepada orang tuanya (1X24 jam). Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan itu, mereka menjadi jera dan kemudian tidak melakukan tindakan seperti itu lagi karena kan hanya digunduli kemudian dijemur di halaman Polrestabes. Dan setelah itu, udah besoknya dibawa ke Mako Brimob kemudian di data dan jam 9 pagi dipulangi. Di Mako Brimob hanya di data karena di Polrestabes Bandung tidak tertampung karena tidak mungkin 314 atau 300 lebih. (sambil menunjukkan foto) “ini kan dibotakin itu, saya disana karena dimintai keterangan di Polrestabes (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020).

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Ancaman Anarko Sindikalisme pada Hari Buruh 2019 di Kota Bandung**

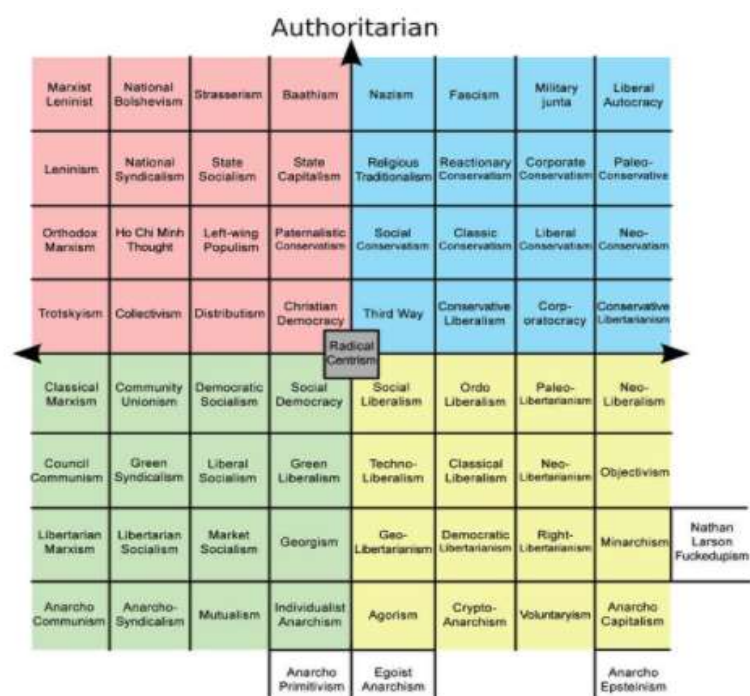
#### **4.2.1.1. Pelabelan Anarko Sindikalisme**

Pemerintah menyatakan aktor dari aksi anarkisme di kota-kota besar pada hari buruh 2019 adalah anarko sindikalis. Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian mengatakan bahwa gerakan anarkisme yang melakukan vandalisme pada hari buruh internasional di Kota Besar adalah anarko sindikalisme. (Puspita, 2019) Pencetusan aktornya anarko sindikalis didasarkan pada masukan peneliti, mahasiswa, mantan anarkis, ahli perburuhan yang dilibatkan oleh pihak kepolisian (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Pemerintah memandang aktor anarko sindikalis merupakan kelompok radikal. Radikalisme dalam perspektif pemerintah adalah bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan secara fisik berupa pengrusakan pagar, melakukan teror, atau mengancam karena menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat tidak dapat dikategorikan radikal. Namun demikian, dalam pengkategorianannya, anarko merupakan ormas radikal malah super radikal (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020).

Anarko sindikalis merupakan kuadran kiri ekstrem. Berdasarkan kompas ideologi dibawah, anarko sindikalis berada jauh dari prinsip authoritarian dan mendekati pada libertarian. Mereka mengasumsikan individu sebagai subjek otonom. Kondisi ini berbeda dengan stalinisme/ marxisme-leninisme yang kiri ekstrem tetapi mendekati pada authoritarian

(partai dan apparatus nya sebagai garda depan) (Fikri, komunikasi personal, 18 November 2020).



**Gambar 4.4. Kompas Ideologi Politik**

Sumber: Political Compass (n.d)

Aksi represif pemerintah bukan dilatarbelakangi memandang anarko sindikalisme sebagai komunisme. Berdasarkan sejarah, pemerintah juga dapat dikatakan trauma terhadap komunisme walaupun memiliki catatan sejarah hitam. Seharusnya anarko sindikalisme dibiarkan saja tetapi ditindak secara hukum apabila melakukan vandalisme karena Indonesia menganut demokrasi (Appridzani, komunikasi personal, 17 November 2020). Namun demikian, pemerintah dalam posisi dilematis karena bila ditindak hukum akan terkena sanksi sosial (pemerintah arogan) dan sanksi hukum (pelanggaran hak asasi manusia). (Erry Gandana, komunikasi personal, 1 Desember 2020). Personil Polrestabes Bandung mempertegas bahwa tindakan represif disebabkan oleh antisipasi vandalisme semakin peluas dan bila paham komunis sudah pasti ditahan. Selain itu, penangkapan telah berkoordinasi dengan ahli hukum, mentor

anarko, dan aktor intelektual (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Pemerintah berpandangan bahwa anarko sindikalis ditunggangi oleh kepentingan politik. Aktor anarko sindikalis yang menggerakkan massa memahami kondisi politik terkini dan dibiayai sehingga terus dapat beroperasi (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020). Aktor anarko sindikalis hanya dimanfaatkan dan memanfaatkan. Dimanfaatkan berkaitan dengan provokasi media sosial tentang isu buruh dan penggusuran rumah deret sedangkan memanfaatkan berkaitan dengan isu buruh diantaranya Omnibuslaw. Sampai saat ini masih melakukan audiensi karena terdapat 2 orang yang dipidana karena melakukan aksi pengerusakan pagar gedung DPR (Anto, komunikasi personal, 10 Februari 2021).

Pemerintah dan kepolisian cenderung memandang anarko secara *simplificatif* (melihat luar saja) yaitu atribut berupa pakai sweater hitam, topi, dan tudung kepala dalam melakukan aksi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya salah tangkap meskipun kepolisian sudah mengukur dan mengetahui siapa barisan anarko dan bukan anarko (masyarakat dan mahasiswa). Akan tetapi, representasi ideologi seharusnya dilihat dari *statement-statement* / pernyataan-pernyataan politik atau tindakan politik (Appridzani Syahfrullah, komunikasi personal, 17 November 2020). Selain itu, Lurah Tamansari, Ahmad Sobandi juga menyatakan bahwa melakukan generalisasi terhadap penggunaan seragam hitam tidak tepat (Dadang Sobandi, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

#### **4.2.1.2. Anarko Sindikalisme Diminati Kalangan Intelektual dan Masyarakat di Kota-Kota Besar**

Anarko sindikalisme merupakan gerakan alternatif terhadap kalangan intelektual dan kapitalisme. Pertama, kampus tidak memiliki kebebasan akademik karena membredel dan memberangus diskusi. Kedua, protes terhadap kampus yang dinarasikan sebagai agen kapitalisme yang mengabsahkan pembangunan yang eksplotatif melalui

artikulasi dan advokasi masyarakat. Ketiga, kekecewaan terhadap alumnus kampus yang dahulunya idealis terutama pemikiran kiri yang berkhianat (Polrestabes Bandung, 2019).

Bandung bisa dikatakan sebagai episentrum di Jawa Barat karena terdiri dari Bandung Raya (Kabupaten Bandung dan Kota Bandung). Kepolisian mengelompokkan anarko 2019 terdiri dari pelajar terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mahasiswa, simpatisan, aktivis, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Penyebaran paham anarko sindikalis yang efektif di kalangan pemuda (pelajar dan mahasiswa) dilakukan melalui music terutama *underground*. Kelompok tersebut tidak memiliki pemimpin tetapi hanya suatu kelompok yang dimotivasi oleh aktivis mahasiswa atau lainnya seperti GERAK (Gerakan Rakyat Anti Kapitalis) yang dipimpin Detti Sofandi alias Clara (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

- a. Pelajar terutama SMK karena pelajar-pelajar tersebut disiapkan sebagai buruh masa depan. Anak sekolah dan mahasiswa dijadikan sasaran dengan pemikiran bahwa mereka akan menjadi buruh masa depan.
- b. Mahasiswa terkait simpati dan solidaritas terhadap kaum buruh karena mayoritas orang tua mahasiswa adalah buruh.
- c. Simpatisan terdiri dari genk motor, anak sekolah/putus sekolah, punk, dan anak jalanan. Kelompok memiliki sifat kebebasan berkreasi, vandalisme, dan music *underground*. Kelompok ini melakukan perusakan mobil dan fasilitas umum karena tidak percaya pemerintah termasuk kehadiran polisi (termasuk TNI yang membantu polisi) melalui tulisan ACAB (*All Corps Are Bastard*). Sebenarnya, pada tahun 2010, genk motor sudah menjadi ormas tetapi yang simpatisan genk motor adalah yang masih labil meliputi anak sekolah atau putus sekolah. Simpatisan ini termasuk *Bandung Supporter Alliance* (BSA) yang terdiri dari simpatisan bobotoh.

- d. Aktivistis yang merupakan aktor utama anarko sindikal baik mahasiswa aktif atau alumni universitas. Aktivistis mahasiswa di dalamnya termasuk aktivis 1998, PBHI (Persatuan Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia), LBH Bandung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI melakukan *blow up* di media sosial yang menyoroti tujuan positif gerakan dan keburukan pemerintah.
- e. AMP berkaitan dengan isu pekerja di pertambangan Papua yang dikucilkan, isu pelanggaran HAM sehingga muncul kesamaan penderitaan kaum buruh oleh kapitalis. AMP perwakilannya sedikit di hari buruh antara 5-10 orang (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Sistem pengorganisasian anarko cenderung diminati pemuda yang tidak begitu ingin dikontrol dengan disiplin. Anarko mengedepankan organisasi horizontal yang tidak terpaku pada tokoh tertentu, pembangunan kesadaran ideologi dengan santai, setara, sederhana, dan mengikuti trend anak muda, penggunaan media mural, music, zine agar nilai-nilai anarkisme mudah dipahami, mengedepankan partisipasi dan menghargai pendapat. Oleh karena itu, anarko merupakan ancaman politik ideologi yang membutuhkan penanganan ekstra (Polrestabes Bandung, 2019).

Kalangan pelajar menjadi aktor dominan yang terjaring pada peringatan hari buruh 2019. Massa aksi yang terjaring umumnya berada didominasi oleh pelajar. Berikut terlampir daftar pengunjung rasa yang diamankan berdasarkan sebaran kota dan jenis pekerjaan pada hari buruh 2019 di Kota Bandung:

**Tabel 4.3. Daftar Pengunjuk Rasa yang Diamankan  
pada Demonstrasi Hari Buruh 1 Mei 2019 di Kota Bandung  
Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Kota/Kab	Pel	B	T	M	W	Ptn	PHL	G	TK	Jumlah
Kota Bandung	160	34	49	31	53	2	1		10	340
Kab. Bandung	63	27	27	12	15			1	8	153
Bandung Barat/ Cimahi	7	9	2	4	4					26
Garut/ Tasik	1	6	1		2				2	12
Bogor/ Sukabumi/ Bekasi/ Tangerang/ Kota Lain	2	3	2	18	4	1				30
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>561</b>

Sumber: diolah peneliti berdasarkan data Kepolisian Resort Kota Besar Bandung (2019)

**Keterangan tabel:**

Pel: Pelajar

B: Buruh

T: Tuna Karya

M: mahasiswa:

W: Wiraswasta

Ptn: petani

PHL: PHL kelurahan

G: Guru

TK: Tanpa Keterangan

#### 4.2.1.3. Agitasi Politik dan Pengenalan Paham Anarko Sindikalis

Pengenalan anarko sindikalisme dapat dilakukan melalui vandalisme dan media sosial. Anarko sindikalisme menggunakan lambang A dikelilingi oleh lingkaran. Huruf “A” menandakan Anarki sedangkan huruf “O” merujuk pada Order. Oleh karena itu bila digabungkan yaitu “Anarchy is Order” yang merupakan kutipan Pierre-Joseph Proudhon (Polrestabes Bandung, 2019).



**Gambar 4.5. Lambang Anarko Sindikalis**

(Sumber: Polrestabes Bandung (2019))

Anarko sindikalis mengkritik kegiatan hari buruh yang digiring pada acara senang-senang. Seperti halnya Sarasehan di Pangandaran yang dilakukan Disnaker Kota Bandung dan program Demo Creation Labour (DCL) yang dilakukan Disnakertrans Jawa Barat. Penganut anarko sindikalis mengirimkan pesan melalui vandalisme dengan narasi “Mayday not Holiday” dan “Mayday Bukan Eksistensi Tetapi Insureksi”.



**Gambar 4.6. Vandalisme “Mayday Not Holiday” dan “Mayday Bukan Eksistensi tetapi Insureksi”**

Sumber: dokumen peneliti (2020)

Anarko seringkali melakukan vandalisme dengan ACAB (All Corps Are Bastard) atau sandi “1312” (huruf pertama (A), huruf ketiga (C), huruf pertama (A), dan huruf kedua (B)). Polisi menjadi aktor yang dibenci oleh anarko sindikalis karena melakukan pemburuan dan penangkapan anarko sindikalis (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020). Kebencian terhadap polisi ini direpresentasikan melalui vandalisme salah satunya ditembok rumah di bawah Jembatan Pasopati.



#### 4.7. Vandalisme di Tembok Rumah Penduduk

Sumber: dokumentasi Peneliti (2020)

Anarko sindikalis memandang bahwa serikat pekerja/serikat buruh sudah bersatu dengan pemerintah untuk menindas buruh. Terlebih pada tahun 2019, serikat pekerja/serikat buruh mendorong aktivis buruh untuk masuk ke parlemen. Serikat pekerja/ serikat buruh yang sibuk dalam mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada dibandingkan menjadi saluran aspirasi buruh menjadi sasaran empuk bagi anarko sindikalis untuk *memframming dan masuk dalam* anggota serikat. Bahkan bila berkaca pada kondisi di Jakarta dimana kelompok anarko membuat spanduk “jangan mau dikibuli serikat” yang akhirnya terjadi perkelahian antara anarko dengan Garda Metal (sayap pengamanan SPSI) (Fikri, komunikasi personal, 18 November 2020).



**Gambar 4.8. Vandalisme “Lawan Serikat Elite”  
di Jembatan Pasopati.**

Sumber: dokumentasi peneliti (2020)

#### **4.2.1.4. Kegiatan Anarko Sindikalis di Kota Bandung**

##### **a. Pengorganisasian Anarko Sindikalis**

Pengorganisasian anarko sindikalis bersifat desentralis dan non-hierarkis. Desentralis menekankan pada pengambilan keputusan didasarkan keputusan seluruh anggota kolektif. Sedangkan non-hierarkis menekankan pada aktivitas dilakukan atas dasar inisiatif, partisipasi individu, dan menghapuskan batas divisi kerja. Adapun aktor yang bertindak aktif dinarasikan sebagai kepemimpinan ide. Anggota kolektif biasanya merupakan orang yang memiliki pandangan yang sama dan orang-orang yang hidup relatif berdekatan (sumber: Instagram@rbu.bekasi, 2021).

Anarko sindikalis tidak memiliki struktur birokrasi (Anto, komunikasi personal, 9 Februari 2021). Anarko sindikalis tidak memiliki pemimpin tetapi memiliki informal leader/ yang dituakan tetapi tidak sebagai leader (Muradi, komunikasi personal, 24 November 2020). Berdasarkan kolektif, aktor yang bertindak lebih aktif tidaklah dikatakan kepemimpinan ide yang mendorong proses belajar dalam kolektif, katalis, dan penyalur/ pembagi informasi terhadap kolektif. Dengan demikian, kolektif akan membentuk kepemimpinan bersama yang revolusioner yang memiliki rasa saling memiliki dan bertanggung jawab.

(sumber: Instagram@rbu.bekasi, 2021). Oleh karena itu, kelompok ini bergerak secara terorganisir walaupun tidak mengenal hierarki karena terdapat pembagian tugas yang kontradiktif dengan klaim tidak memiliki struktur (Fikri, komunikasi personal, 16 November 2020).

Penggiringan opini di media sosial dimanfaatkan untuk menghimpun simpatisan dan hadir dalam peringatan buruh 2019. Lurah Tamansari, Dadang Sobandi memandang bahwa anarkisme tidak hanya dari fisik tetapi juga melalui penggiringan opini untuk mengikuti aksi buruh 2019 di kantor pemerintahan Jawa Barat, Gedung Sate yang berlokasi di Kota Bandung. Opini anarko sindikalis efektif dan diterima kalangan pemuda sehingga banyak simpatisan yang mengikuti aksi buruh 2019 (komunikasi personal, 30 Desember 2020). Pernyataan ini didukung oleh personil Polrestabes Bandung yang menyatakan massa aksi digiring oleh media sosial sehingga ketika aksi hanya mengenal orang tertentu tetapi kemudian bersatu apabila berhadapan dengan polisi (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

**b. Gerakan dan Taktik Anarko Sindikalis**

Gerakan dan taktik anarko yang digunakan yaitu *do it yourself*, *feed not bombs*, dan *direct action* (aksi langsung), *gig* (pertunjukan music), *zine*, literasi mural, dan *hacker*. *Do it yourself* yaitu menawarkan alternative budaya yang menentang konsumerisme. *Food not bombs* yaitu gerakan otonomi tanpa kekerasan untuk berbagi makanan vegetarian di tempat publik terutama pada masyarakat miskin. Dan *direct action* melalui vandalisme, sabotase, ataupun deskriptif suatu sistem operasi yang hierarkis, koersif, dan dominatif (Polrestabes Bandung, 2019).

Pola dan strategi anarko sindikalis dilakukan secara terorganisir meliputi persiapan, pembagian tim, dan aksi. Persiapan meliputi tanpa identitas, tanpa membawa smartphone kecuali dokumentasi (biasanya menyamar sebagai wartawan kampus lengkap dengan baju kampus), pakaian tertutup dan membawa baju ganti berbeda, membawa *pleer* (bom asap), palu, molotov, tidak boleh membawa senjata tajam dan narkoba (kondisi harus fit), dan menghapus semua aplikasi media sosial dan hapus kontak. Kemudian pembagian kerja tim yaitu *border*, bom asap/*pleer*, molotov, ketapel, palu, dan tim penjinak gas air mata. Aksi dilakukan selalu berubah-ubah yang dipastikan adalah jalur evakuasi, *save house*, dan satu komando; taktik *black bloc* yaitu taktik yang berubah-ubah setiap aksi tetapi tujuan utamanya tetap yaitu menguatkan solidaritas menghadapi represifitas polisi; serta melakukan aksi provokatif dan konfrontatif.

Pendanaan anarko sindikalis seadanya. Anto menyatakan bahwa pendanaan dilakukan secara urunan anggota: “tidak ada dana, pendanaan bersifat udunan/urunan kelompok saja sehingga seadanya” (komunikasi personal, 2 Desember 2020). Kondisi ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa pendanaan kolektif dilakukan secara urunan dan penjualan stiker ataupun atribut dengan slogan “rakyat bantu rakyat”.



**Gambar 4.9. Penjualan Stiker dan Atribut untuk Dana Kolektif**

sumber: dokumentasi peneliti (2021)

### c. Gerakkan Sosial di Kota Bandung.

Anarko sindikalis berkumpul di Tamansari Kota Bandung. Anarko berafiliasi dengan ormas-ormas yang menentang kebijakan pemerintah. Anarko saat ini masuk dalam kasus pengusuran Tamansari. Selain itu, kepolisian sudah mengetahui adanya aktivitas anarko perpustakaan jalanan di Taman Pasopati. Mereka menjajakan buku dan pakaian gratis termasuk aksi kamisan di dalamnya. Namun demikian, kepolisian tidak menganggap aktivitas tersebut sebagai ancaman asalkan tidak mengganggu fasilitas umum (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Pemerintah tidak dapat melarang perkumpulan pemuda. Demokrasi membuka ruang dan kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat di muka umum termasuk aksi demo yang damai. Oleh karena itu, perkumpulan massa dan aksi demonstrasi tidak memerlukan perizinan tetapi pemberitahuan kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh menolak karena bertentangan dengan Undang-Undang. Namun demikian, aparat berada di lokasi kegiatan massa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan meliputi

provokasi oleh pihak anti pemerintah untuk membenturkan pengunjuk rasa dan aparat pengamanan.

Penamaan anarko dipandang bermakna negatif. Lurah Tamansari, Bapak Dadang Sobandi mengatakan penggunaan kata anarko tidak tepat bila tujuannya adalah kepedulian dan mengangkat derajat masyarakat yang tertindas (Dadang Sobandi, komunikasi personal, 30 Desember 2020). Warga terdampak penggusuran, Bapak Endang yang kebetulan berada di Kelurahan Tamansari mengatakan bahwa perjuangan walaupun mengedepankan kepedulian tetap tidak akan melepas identitas dirinya dan justru malah membuat warga yang dibelanya menjadi korban (komunikasi personal, 30 Desember 2020).

kalau itu sih kayak gini, label aja, misalnya di music labelnya rock, metalica, dangdutkan udah pasti backgroundnya gak mungkin yang label rock menyanyikan lagu dangdut. Kalau menurut saya, ini perlawanan kok labelnya anarko sudah pasti gak akan lepas dari sana. Kalau perjuangan mungkin baik, tapi dalam perjalanannya itu identitas dirinya. Lagian kalau saya lihat dari kejadian seperti Kiara Condong. Mereka berjuang totalitas tetapi karena judulnya labelnya itu akan muncul apalgi mereka ada oknumnya. Nah, yang ujung-ujungnya kasihan itu warga yang dibelanya sama kayak buruh. Buruh berjuang untuk apa yang mereka dia inginkan, masuk oknumnya (seperti yang kita tahu). Belum tentu anarko pasti rusak, gak juga akan. Pasti ada juga tindakan yang tidak kita kehendaki. Mereka berjuang tidak ada beban, mereka hanya memperjuangkan aja sampai berakhir. Kan warga gak tahu ujungnya bakal gimana. Rata-rata kan hilang apa

yang diperjuangi seperti di Tamansari dan Kiaracondong. Mereka kan pergi, warga kan hilang segalanya jadi korban. Nah, itulah kalau memang identitasnya yang muncul disana. Kalau memang membela. Yang kelas kalau tanpa dialog gak mungkin bisa tercapai suatu permasalahan. Ujung-ujungnya kan dia berbenturan kalau bisa ikutin aja ngobrolnya sama pemerintah mungkin gak seperti itu. Mungkin ya itu lah (Endang, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Anarkis zaman sekarang bukan hanya berkaitan dengan fisik tetapi konten-konten penggiringan opini yang negatif juga dapat dikatakan anarkis. Namun demikian, semakin banyaknya simpatisan pemuda yang terekrut dalam anarko menjadi indikasi bahwa pemuda tersebut melihat organisasinya baik, memiliki pemikiran yang sama atau “amperemeternya pas” (Dadang Sobandi, 30 Desember 2020). Namun demikian, pemuda sendiri harus kritis dan nasionalis.

Generasi muda harus kritis tetapi tetap nasionalis. Zaman sekarang, anarkis tidak hanya berkaitan dengan fisik tetapi juga konten-konten penggiringan opini. Penggiringan opini ini berhasil sehingga banyak simpatisan pemuda yang terekrut. Namun demikian, aksi pengerusakan fasilitas umum yang dilakukan pemuda malah menciderai pergerakan buruh sendiri sehingga dikatakan bikin rusuh dan tuntutan buruh minim disorot oleh media dan masyarakat (Dadang Sobandi, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Pergerakan pemuda menamakan kelompoknya solidaritas bukan anarko. Pergerakan didasari oleh ketidakpedulian

pemerintah terhadap warganya. Selain itu juga disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran. Namun demikian, sudah terdapat control sosial berupa keberadaan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (IsM), media, dan kritikan dari pelajar dan mahasiswa. Akan tetapi, yang disayangkan adalah penggunaan anarkis:

anarkis itu kurang pas kalau untuk menyempurnakan dari kekurangan pemerintah kecuali tidak ad acara yang lebih baik lagi, apalagi Indonesia itu demokrasi. Kadang miris gini “belum menghadapi tantangan dunia luar di dalamna oge riweuh, sok rek solid kumaha”. Kumaha lamun tetangganya nyerang, bisakah kita bersatu” wargana ge teu bersatu” (Dadang Sobandi, komunikasi personal, 30 Desember 2021).

Warga tidak mengetahui anarko berada di lokasi penggusuran Tamansari. Dalam tinjauan lapangan, polisi sampai saat ini belum mengetahui siapa anarko di Tamansari. Selain itu, warga juga tidak mengetahui adanya anarko.

sekarang polisi kan gak tahu kenapa identitasnya gak kelihatan “ada tapi gak ada”. Nah, ini kan gak ada, tapi semua pada anarko. Makanya waktu polisi mencari anarko, kami gak pernah lihat karena tidak ada yang pakai tulisan anarko gitu. Gak ada yang tahu, mungkin dia iya, tapi kan gak bisa kita judge “kamu anako” kan gak enak juga. Sampai sekarang saya masih kenalnya mah si itu mahasiswa, banyak yang kenal cuma gak pernah tanya “kamu anarko?” Itu urusan mereka aja kalau nama itu disebut. Setiap polisi kesana gak pernah dapat jawaban

karena kitanya (warga) tidak tahu (Endang, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti pergerakan sosial di Bandung. Peneliti mencoba untuk menggambarkan pada solidaritas Pasar Gratis Bandung, Aksi Kamisan Bandung, dan Forum Juang Tamansari Bandung berhasilkkan pengamatan langsung peneliti dan media sosial Instagram. Namun demikian, berdasarkan pengamatan, peneliti tidak bisa mengidentifikasi suatu gerakan sosial sebagai anarko karena anarko sindikalis sendiri merupakan aliran pemikiran.

### **1) Pasar Gratis Bandung**

Pasar gratis merupakan gerakan sosial yang menentang konsumerisme dan ketimpangan sosial di masyarakat. Pasar gratis melakukan tindakan protes terhadap kegagalan negara memenuhi kebutuhan warga negaranya terutama kalangan tunawisma. Nilai-nilai yang dianut pasar gratis dekat dengan pemuda yang peduli terhadap ketimpangan sosial dan peduli terhadap lingkungan sekitar dengan slogan “Not for Charity, This is Protest!”. Berikut merupakan narasi yang disebarakan melalui akun media sosial Instagram:

seperti kesepakatan awal kami membangun gerakan bahwa pasar gratis bukanlah gerakan amal yang didasarkan pada rasa kasihan – ini bentuk protes! Kita sedang mengkritik ketimpangan dimana jutaan orang harus berjuang keras untuk bisa makan sementara segelintir orang onggang-onggang kaki namun hidup berlimpahan harta.

Kami menyatakan bahwa yang memberi tidak lebih mulia daripada yang diberi, aksi ini tidak mengenai kelas sosial dan sekat identitas, dan bahwa sandang pangan yang layak adalah hak seluruh manusia tanpa terkecuali – yang hari ini gagal dipenuhi negara.

Semua orang dapat berpartisipasi dengan kemampuan dan kesadaran masing-masing dengan komitmen bahwa, tidak ada presensi heroik, agenda politik, dan narsisme media.

Bagi anda yang memiliki barang untuk dibagikan, anda dapat membawanya untuk kemudian diberikan. Anda yang memiliki kendaraan dan bisa mengemudi dapat membantu dengan menemukan titik membuka lapangan, anda yang mempunyai informasi persebaran tunawisma dapat membantu menentukan sasaran distribusi. Lebih dari itu, anda juga dapat berpartisipasi dengan cara lain yang tidak terbatas.

Ini adalah gerakan kesadaran kolektif yang bertujuan untuk menyediakan dan mempersenjatai tunawisma dengan selimut, pakaian layak, alas tidur, makanan, dan barang lainnya.

Organize Now! (sumber: Instagram @pasargratis.bdg, 17 Januari 2021).

Pasar gratis diminati oleh pemuda melalui pendekatan “jangan segan karena kita kawan”. Simpatisan pasar gratis berasal dari berbagai kalangan meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, anak jalanan, pengamen jalanan, dan berbagai elemen masyarakat. Umumnya, motivasi simpatisan mengikuti pasar gratis yaitu

menambah jejaring pertemanan dan kepedulian terhadap masyarakat Kota Bandung.

Pasar gratis semakin masif menyebar di berbagai titik di Kota Bandung. Pasar gratis yang ada di Kota Bandung diantaranya pasar gratis bandung, pasar gratis kopo, pasar gratis margaasih, pasar gratis cimahi, pasar gratis cijerah, dan pasar gratis bandung timur. Namun demikian, pasar gratis di beberapa titik tersebut terkadang melapak bersama-sama.

Pasar gratis seringkali bergabung dengan gerakan sosial lainnya. Gerakan sosial tersebut meliputi perpustakaan jalanan, feed not bomb, aksi kamisan. Perpustakaan jalanan menyediakan buku-buku bacaan dan *zine*. *Zine* merupakan semacam majalah yang jumlah halamannya sedikit dan dicetak melalui fotokopi.



**Gambar 4.10. Contoh Zine Cucukrowo Mekgejin**

Sumber: dokumentasi peneliti (2021)

Feed not bomb merupakan gerakan pemberian makanan bagi kucing liar yang berada di sekitar lokasi dilaksanakannya pasar gratis. Gerakan feed not bomb menyatakan bahwa jika kita memberi tidak lebih baik daripada yang diberi dan jangan melupakan lingkungan sekitar yang telah memberikan kehidupan. Selain itu, pasar

gratis juga turut menambah massa yang hadir dalam kegiatan kamisan yang berfokus pada isu pelanggaran hak asasi manusia.

Pasar gratis memiliki program rutin dan tidak rutin (tentatif) dalam setiap kegiatannya. Agenda rutin meliputi pakaian dan celana gratis, lapakan buku sekaligus berbincang dengan tunawisma ataupun masyarakat yang datang ke lapak pasar gratis. Sedangkan agenda tentatif meliputi makanan gratis, tensi gratis, dan cukur rambut gratis.



**Gambar 4.11. Dokumentasi Pasar Gratis  
10 Januari 2021**

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Kegiatan pasar gratis seringkali dipantau oleh kepolisian. Berdasarkan pantauan peneliti selama periode penelitian. Kepolisian telah melakukan pembubaran pasar gratis di antaranya di Braga pada 17 Januari 2021. Alasannya adalah karena berkerumun. Pembubaran ini dikritik karena kepolisian tidak membubarkan mall, dan tempat lain di sekitar braga yang lebih mengundang kerumuman ketimbang dijalanan tetapi tetap beroperasi dan tidak dibubarkan.



**Gambar 4.12. Pembubaran Pasar Gratis oleh Kepolisian di Braga**

Sumber: Instagram @pasargratis.bdg (2021)

Pasar gratis menolak konsumerisme dan sistem ekonomi kapitalis terutama besar-besarnya diskon setiap akhir tahun. Konsumerisme merupakan budaya masyarakat untuk berbelanja walaupun barang yang dibelanjakan tersebut tidak dibutuhkan. Pasar gratis menggunakan tema “Buy Nothing Day” yang ditujukan untuk meminimalisir ketergantungan pada kapitalisme dan budaya konsumerisme.



**Gambar 4.13. Kegiatan Buy Nothing Day 30 Desember 2020**

Sumber: dokumentasi peneliti (2020)

Kegiatan yang dilakukan bersifat rutin dan non rutin. Kegiatan rutin yaitu pakaian gratis meliputi baju, celana, sepatu, tas, lapakan baca, berbincang dengan tunawisma. Sedangkan non rutin yaitu tensi gratis, cukur rambut, membagi makanan kepada tunawisma.

Solidaritas merupakan kekuatan bertahan hidup tanpa negara. Gerakan menekankan untuk mempercayai bahwa solidaritas dimana setiap individu mempunyai kesadaran untuk bersolidaritas, tanpa negara pun kita bertahan hidup. Oleh karena itu, gerakan menekankan slogan “negara tidak peduli, kita harus saling membantu”.



**Gambar 4.14. Vandalisme Kill**

### **Konsumerisme**

Gerakan pasar gratis optimis menciptakan hidup baru yang bersama, hubungan bebas, saling menguntungkan, dan setara. Dalam perspektif pergerakan pasar gratis, kelas sosial harus dihapuskan agar dapat menciptakan masyarakat tanpa sekat yang setara. Tunawisma, anak jalanan, kaum miskin kota, atau siapapun kelompok yang dianggap sampah oleh negara adalah manusia. Oleh karena itu, pasar gratis akan terus membuka ruang sampai tidak ada orang yang mengatakan itu tidak mungkin.



**Gambar 4.15. Capaian Hanya Satu: Masyarakat Tanpa Kelas**

Sumber: Instagram @pasargratis.bdg

## 2) Aksi Kamisan

Aksi kamisan merupakan gerakan yang mengkritik belum diselesaikannya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Di Bandung, aksi kamisan dilakukan secara terbuka pada hari kamis sore di depan gerbang Gedung Sate Kota Bandung. Aksi kamisan Bandung dimulai sejak 18 Juli 2013. Atribut yang sering digunakan adalah payung hitam. Kegiatan yang dilakukan diantaranya orasi, penampilan musik, dan puisi. Peneliti melakukan penelitian pada hari HAM (10 Desember 2020) dan Kamis 7 Januari 2021.

Aksi kamisan memandang Negara tidak mementingkan rakyat dan ruang demokrasi sulit didapatkan kebanyakan masyarakat Indonesia. Aparat negara selalu membungkam aspirasi dan perasaan yang hendak disampaikan warga negara. Presiden Jokowi tidak memenuhi janji kampanye Pilpres 2014 untuk menyelesaikan/ menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan 2 periode kepemimpinan, Jokowi tidak berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu, rakyat

sudah dibodohi dan seharusnya tidak mempercayai pemerintah.



**Gambar 4.16. Aksi Kamisan pada Hari HAM  
10 Desember 2020**

Sumber: dokumentasi peneliti (2020)

Slogan selalu digelorakan oleh orator berkaitan dengan “Pemerintahan terus berganti, pelanggaran HAM terus terjadi” dan “jangan diam. Lawan!”. Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang disorot diantaranya pembantaian sekitar 3 juta orang PKI tahun 1965-1966 tanpa pengadilan, penculikan dan pembantaian aktivis 1998, penembakan misterius (petrus) pada masa Orde Baru, tragedy Trisakti, Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II, tragedy DOM Aceh, dan Tragedi Talangsari Aceh.

Penggerak aksi kamisan memandang bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi pasca reformasi. Pelanggaran HAM tersebut diantaranya pembunuhan aktivis Munir 2004, pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil 2015, serta penembakan Randi dan Yusuf Kardawi pada aksi “Reformasi Dikorupsi 2019”, dan kematian Papua karena ditembak kepolisian pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat.

Selain itu, orator juga menyoroti pembunuhan aktivis diantaranya Munir, Marsinah, Salahudin, dan Salim Kancil.

Orator menyatakan bahwa pergantian orde pemerintahan tidak menggantikan pucuk kepemimpinan negara. Hal ini merujuk pada jenderal-jenderal pelaku pelanggaran HAM seperti Prabowo, Wiranto, Luhut, dan Moeldoko yang terus duduk di gedung kekuasaan diantaranya. Narasinya digiring pada negara akan lebih mudah lagi merenggut hak kita sebagai manusia.

Isu Papua menjadi sorotan banyak orator pada Hari HAM 10 Desember 2020. Pihak yang berorasi diantaranya aksi kamisan, LBH Kota Bandung, Pembebasan Bandung, Tamansari Melawan, dan Aliansi Mahasiswa Papua, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Papua dinyatakan telah dijajah Indonesia sejak 1961. Selain itu, aksi penembakan dan pembunuhan, pelecehan seksual, dan kekerasan masih sering terjadi di Papua.

Pasca orde baru, Papua diperhadapkan dengan peristiwa pelanggaran HAM diantaranya Wamena Berdarah (1998-2000), pembakaran yang mengakibatkan banyak mahasiswa Papua meninggal (2006), dan pelanggaran HAM di Paniai (2014). Pelanggaran HAM Paniai merupakan pelanggaran HAM pertama pada era pemerintahan Joko Widodo. Selain itu, ada momen dimana ibu-ibu hamil dan anak-anak dikumpulkan untuk melindungi dari gangguan di Paniai tetapi akhirnya ada ibu yang gagal melahirkan, meninggal, atau bayi-bayi yang turut juga mati setelah melahirkan. Kemudian, narasi digiring pada Papua tidak memiliki masa depan bila bergabung dengan pemerintahan Indonesia.

Selain itu, tanah Papua semakin tergerus. Sudah 14.000 hektar tanah di Papua dikuasai investor. Tanah adat milik Papua juga terancam oleh kekuasaan kapitalis. Sagu dan ikan yang menjadi sumber makanan Papua akan hilang punah digantikan beras dan dikuasai perusahaan. Selain itu, pemerintah Papua (Majelis Rakyat Papua/MRP) dan Gubernur tidak memiliki kekuasaan tetapi diatur oleh Jakarta “kepalanya sudah diberikan tetapi ekornya masih dipegang dikendalikan Jakarta”.

Penggusuran menjadi elemen pelanggaran HAM karena merampas ruang hidup. Hal ini merujuk pada penggusuran di Kendeng dan Kulon Progo yang dinarasikan pembangunan yang dilakukan menguntungkan pemodal dan investor. Orator Tamansari Melawan menyatakan bahwa Kota Bandung ramah HAM (Hotel, Apartemen, dan Mall), kaum miskin kota dimiskinkan dan menyengsarakan.

Pemerintah akan melakukan segala cara untuk melindungi aset-aset pribadi di tengah krisis Indonesia akibat pandemic Covid-19 Pemerintah melakukan pelemahan Undang-undang diantaranya RUU yang melemahkan KPK, pembahasan kembali RKUHP (Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengesahan UU Minerba pada tahun 2020 yang akan merusak lingkungan, pengesahan UU Omnibuslaw, dan banyak lagi revisi UU yang akan dilakukan pemerintah.

Indonesia masih belum merdeka pasca proklamasi 75 tahun yang lalu. Negara semakin otoriter dengan meluncurkan pasukan baru polisi siber untuk mengawasi di media sosial. Demokrasi sudah terancam di dunia nyata dan akan terancam pula di dunia maya. Oleh karena itu,

kita harus menyadarkan bahwa negara yang sakit dan semakin waktu tidak baik-baik saja. Merespon banyak isu tersebut, perwakilan PBHI mendorong untuk melakukan advokasi, memperluas narasi, dan mengorganisir organisasi lingkungan sekitar.

### **3) Forum Juang Tamansari Bandung**

Polemik pembangunan rumah deret RW 11 Tamansari disebabkan sengketa tanah. Dasar hukum pembangunan yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Peraturan Walikota Bandung Nomor 665/2017 Tentang Relokasi Sementara Warga yang Terkena Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari, dan SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pemakaman (SK DPKP3) Nomor 538.2/ 1325A/ DPKP3/ 2017 Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari tahun anggaran 2017. Namun demikian, masalahnya adalah tanah belum jelas sedangkan kompensasi dan regulasi telah digulirkan ditambah lagi warga terdampak belum menyetujui kebijakan tersebut.

Tanah di RW 11 diklaim pemerintah Kota Bandung sebagai milik pemerintah melalui skema pembelian tahun 1924-1941. Pemkot Bandung melakukan klaim dengan menerbitkan sertifikat dengan nomor 593/268-BKPA yang dikeluarkan BKPA (Badan Konsorsium Pembaruan Agraria) padahal Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berwenang mengeluarkan surat terkait lahan. Selain itu, pembangunan deret tidak disertai AMDAL (Analisis

Dampak Lingkungan) sebagai syarat utama pembuatan Izin Mendirikan Bangunan/ IMB (Prasetyo, 2018).

Forum Juang Tamansari Melawan merupakan wadah perjuangan warga yang menolak pembangunan rumah deret. Penggusuran telah dilakukan pada 12 Desember 2019. Warga terdampak pembangunan rumah deret, Bapak Endang menyatakan bahwa dirinya sudah berpindah sejak tahun 2018. Kemudian, warga yang menolak penggusuran sebanyak 2% (Endang, komunikasi personal, 30 Desember 2020). Akan tetapi pemberitaan seakan-akan semuanya. Namun demikian, pada saat penggusuran benar terdapat benturan antara anak kecil dan aparat karena siapa yang berjihad harus mau berdarah-darah (Endang, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Jadi, konten beritanya kalau Cuma lihat di pemberitaan media pasti pemahamannya tanpa tahu dilapangan, gitu. Kurang lebih 98% setuju dan 2% nya gak. Berarti kan 2% nya ini menjadi objek yang dibelanya itu. Tapi pemberitaan seakan semuanya. Setuju untuk dibangun (kalau digusur moal aya nu daekkeun)” (Dadang Sobandi, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Kepolisian menyatakan anarko sindikalis berkumpul di reruntuhan Tamansari. Polemik penggusuran Tamansari terjadi di RW 11. Namun demikian, Lurah Tamansari, Dadang Sobandi menyatakan tidak tahu persis apakah itu anarko karna pengorganisasian mereka gak tahu dan tidak bisa diindikasikan karena menggunakan atribut serba hitam (komunikasi personal, 30 Desember 2020). Selain itu, salah satu warga RW 11 Tamansari menyatakan kepolisian

pernah datang kesana tetapi warga tidak mengetahui siapa anarko.

warga RW 11 Tamansari Sekarang aja polisi kan gak tahu karena identitasnya gak keliatan “ada tapi gak ada”. Nah ini kan gak ada, tapi semua pada anarko. Makanya waktu polisi mencari anarko, kami gak pernah lihat karena tidak ada yang pakai tulisan anarko gitu. Gak ada yang tahu, mungkin dia iya, tapi kita gak bisa judge “kamu anarko” kan gak enak juga (Endang, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Banyak mahasiswa yang mendukung warga sebelum terjadi penggusuran di Tamansari. Keberadaan mahasiswa tidak dari awal polemik program rumah deret. Namun demikian, warga tidak menyatakannya anarko karena berbuat baik kepada warga.

kalau saya pribadi, bukan lihat labelnya, saya lihat banyak yang berbuat kebaikan kepada warga seperti memasak (mendapatkan donasi), beli aqua, saya lihat sendiri ada yang masak, nawarin kita, utamanya buat warga yang terdampak. Jadi kan ada baiknya Cuma dalam perjuangan itu labelnya. Kalau diganti aja dengan “belas kasih” mungkin perjuangannya akan lebih indah lagi. Selain itu, pernah membantu adik saya sakit dan mendanai sampai ke rumah sakit. Tapi saya tidak bisa mengatakan anarko, yang jelas adalah warga disana dengan rekan-rekan mahasiswa (Endang, komunikasi personal, 30 Desember 2020).

Tamansari melawan juga hadir dalam aksi kamisan pada hari HAM 10 Desember 2020 di Gedung Sate. Kota Bandung terbukti sebagai Kota Ramah HAM (Hotel,

Apartemen, dan Mall). Kami warga RW 11 Tamansari Melawan bahwa kebenaran harus ditegakkan dan tirani harus mati.

Gerakan sosial Tamansari Melawan dilihat peneliti melalui acara 1 tahunan pengusuran. Tema yang diusung yaitu Menolak Lupa Tragedi Kemanusiaan Tamansari 12.12.19. Kegiatan yang dilakukan melalui pesan dan kesan dari warga terdampak dan tausiyah yang dibawakan oleh Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK).



#### 4.17. Poster 1 Tahun Pengusuran Tamansari

Sumber: Instagram @tamansarimelawan (2020)

Malam Sastra Menolak Pengusuran merupakan agenda yang dilakukan pasca pembongkaran paksa oleh kontraktor. Kegiatan dilaksanakan melalui pembacaan puisi. Alerta disebarkan pasca pembongkaran tersebut terjadi pada 13 Januari 2021 yang dilakukan sekitar pukul 14.15. Kontraktor menyatakan sudah mengirimkan surat pemberitahuan pada 3 Oktober 2020, tetapi sudah direspon melalui advokasi PBHI kepada satpol PP dan executive review ke 54 instansi di kota hingga nasional.



**Gambar 4.18. Pembongkaran oleh Kontraktor  
13 Januari 2020**

Sumber: Instagram @tamansarimelawan)

Kontraktor berpandangan bahwa pembongkaran merupakan spontanitas warga. Warga yang pro rumah deret yang secara keperdataan telah melepaskan haknya dijadikan sebagai tameng oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun, yang tetap diperjuangkan adalah lahan tamansari masih sengketa walaupun saat ini warga yang berjuang tersisa semakin sedikit. Namun demikian, dengan adanya solidaritas, visi perjuangan di jalan yang benar, dan pengalaman mengalami kekalahan. Untuk menutup dan membakar semangat juang dan solidaritas peserta, pembawa acara mengajak peserta untuk menyanyikan Internasionale.

#### **4.2.2. Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Paham Anarko Sindikalis pada Hari Buruh 2019 di Kota Bandung**

Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat merupakan titik aksi anarkis pada peringatan hari buruh 2017-2019. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat dilakukan dua minggu sebelum peringatan hari buruh 2019. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Gubernur dan dihadiri oleh Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Jawa Barat, Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) III/ Siliwangi termasuk

Bupati/ Walikota (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020). Rapat koordinasi hanya membahas tentang aspek keamanan yaitu apabila terjadi anarkis atau ditunggangi orang (Dedi, komunikasi personal, 13 Januari 2021). Anarko sindikalis tidaklah dipandang sebagai ancaman tetapi tetap ditangani melalui keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020).

Pengamanan dilakukan melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi deteksi intelijen, pre-emptive, preventif, penegakkan hukum, dan pemulihan. Namun demikian, kegiatan pengamanan dilakukan oleh berbagai elemen pemerintahan bukan hanya Polrestabes Bandung.

#### **4.2.2.1. Strategi Deteksi Intelijen**

Deteksi intelijen dilakukan melalui berbagai komponen intelijen baik intelijen pengawas daerah (Wasda) pemerintah provinsi Jawa Barat, TNI, Polrestabes, dan Badan Intelijen Daerah (Binda). Deteksi intelijen merupakan deteksi kerawanan ditengah kehidupan masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional. Deteksi intelijen ini dilakukan oleh seluruh intelijen di Jawa Barat. Adapun hasil deteksi dini adalah sama karena sifatnya koordinasi (Aan, komunikasi personal, 11 Februari 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan deteksi dini dengan berkoordinasi dengan intelijen di daerah. Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Korkominda) rutin dilakukan sekali sebulan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Deteksi dini dilakukan terhadap tempat, waktu, dan orang. Kendala yang dialami adalah faktor waktu, ketepatan situasi, dan kondisi objek (Aan, komunikasi personal, 11 Februari 2021).

Deteksi intelijen dari Polrestabes Bandung dilakukan melalui deteksi aksi dini dan deteksi aksi. Deteksi dini dilakukan melalui kalender Kamtibmas yang berisi hari-hari besar dan momen kebijakan pemerintah

yang ditolak oleh buruh. Deteksi dini dilakukan pada H-1 melalui pencegahan (bukan pengawasan) terhadap buruh, aktor anarko, dan mahasiswa. Selain itu, deteksi dini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang diperoleh dari Pembentukan Jaringan (TukJar) dan Pembinaan Jaringan (BinJar). Deteksi dini ini meliputi titik kumpul, koordinator lapangan (korlap), titik aksi, jumlah massa aksi, dan tempat aksi (Anto, komunikasi personal, 9 Februari 2021). Namun demikian, kendala yang dialami diantaranya medan yang jaraknya jauh yang terjauh berada di Kabupaten Bandung, cuaca (hujan), sarana prasarana yang belum mencukupi, dan bahasa daerah yang belum memahami (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Deteksi aksi dilakukan melalui penggalangan dan kontra intelijen. Deteksi aksi dilakukan setelah mendapat informasi hasil dari deteksi dini. Deteksi aksi dilakukan melalui penggalangan dan kontra intelijen. Penggalangan dilakukan melalui pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan kontra intelijen dilakukan melalui deteksi, investigasi, eksploitasi, dan negasi (Anto, komunikasi personal, 9 Februari 2021). Tahap deteksi meliputi mengidentifikasi dan menetapkan masalah, menyusun rencana deteksi, mengumpulkan petunjuk, menganalisis data petunjuk, dan pengakhiran deteksi bila telah ditemukan petunjuk/fakta. Investigasi dilakukan melalui pembuntutan, penjajakan, penyadapan, penyurupan, elisitasi, dan penyadapan. Eksploitasi dilakukan melalui negosiasi, kontribusi, penekanan, *brainwash*/indoktrinasi, dan *whistle blower*. Kemudian, negasi yaitu meniadakan, menghentikan, atau menetralsir melalui langsung (penegakan hukum oleh pihak berwenang) dan tidak langsung (mencegah orang melakukan tindakan criminal melalui publikasi dan atau penyebarluasan pengakuan criminal (Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018, 2018, hh. 76-77).

#### 4.2.2.2. Strategi Preemptive

Strategi preemptive dilakukan oleh berbagai komponen diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, Polrestabes Bandung, dan pemerintah Kota Bandung. Strategi pre-emptive merupakan upaya pembinaan dan penataan masyarakat agar memiliki daya tangkal yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh ancaman serta mendorong terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas nasional. Strategi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Kepolisian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.

Kesbangpol Jawa Barat melakukan penggalangan kepada serikat pekerja/serikat buruh. Koordinasi dilakukan terhadap ketua buruh, organisasi masyarakat, dan kelompok pemuda. Selain itu, Kesbangpol Jawa Barat juga melakukan lobi-lobi kepada aktivis tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis dalam mengajukan tuntutan (Aan, komunikasi personal, 11 Februari 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua I Bidang Organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bandung bahwa terdapat koordinasi dengan intel dari kepolisian dan TNI sebelum peringatan hari buruh terkait imbauan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi pengerusakan (Iyus, 21 Desember 2020). Namun demikian, kendalanya adalah tidak mengetahui aktor anarko sindikalis sulit dideteksi dan liar karena tidak memiliki sekretariat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya penanaman bela negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan program bela negara terhadap buruh, pelajar, mahasiswa, dan organisasi masyarakat terutama perwakilan serikat pekerja/serikat buruh (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020). Sedangkan Pemerintah Kota Bandung melakukan program penanaman nilai-nilai Pancasila melalui program Bela Negara, Kemah Pancasila, Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan, 4 Konsensus Dasar Negara, dan Jambore (Erry Gandana, komunikasi personal, 1 Desember 2020)

Polrestabes melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melakukan imbauan terutama karena keterlibatan kaum pelajar. Selain itu, Ketua Genk Motor terutama simpatisan yang umumnya masih sekolah/putus sekolah terhadap empat organisasi kepemudaan meliputi Brigez, XTC, Moonraker, dan Gabirez (GBR) (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020). Kendala yang dialami kepolisian adalah tokoh yang dituju tidak dapat ditemui. (Anto, komunikasi personal, 10 Februari 2021).

#### 4.2.2.3. Strategi Preventif

Strategi Preventif umumnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengeliminir berkembangnya potensi gangguan menjadi ambang gangguan. Hari buruh sebenarnya adalah hari ulang tahun buruh tetapi diselewengkan dengan unjuk rasa. Hal ini ditandai dengan pemasangan spanduk “selamat *mayday*”, dan “*mayday* itu ulang tahun Serikat Pekerja Internasional”. Mediator Hubungan Industrial, Dedi mengatakan bahwa buruh sebenarnya tidak boleh unjukrasa tetapi hanya boleh mogok kerja. Aksi anarkis seringkali disebabkan oleh tidak langsung dipanggilnya perwakilan massa aksi untuk audiensi dengan pemerintah (Dedi, komunikasi personal, 13 Januari 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba konsep *Demo Creation Labour* (DCL) yang bertemakan *Mayday is Creative Day, Together We Grow*. Konsep ini merupakan upaya untuk mengubah persepsi hari buruh selalu ricuh menjadi aksi unjuk rasa kreatif dan damai. DCL dibagi menjadi 4 kuadran aktivitas yaitu: (i) *demo plus kratie* yaitu peserta bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan cara lomba orasi; (ii) *demo plus art* yaitu buruh menampilkan seni ataupun bakat yang hendak ditampilkan; (iii) *demo plus cullinary* yaitu menampilkan hasil pelatihan kuliner yang diikuti keluarga pekerja; dan (iv) *demo plus solution* berkaitan dengan berbincang bersama tentang solusi permasalahan ketenagakerjaan (Humas Bappeda

Jabar, 2019). Program ini merupakan tradisi baru peringatan hari buruh yang didasari kesepakatan antara pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan asosiasi pengusaha di Jawa Barat. Namun demikian, massa serikat pekerja/serikat buruh tetap melakukan unjukrasa di Gedung Sate terlebih dahulu sebelum bergabung di Disnakertrans Jawa Barat untuk acara liburan.

Pemerintah Kota Bandung melakukan Outbond Character Building *Mayday* 2019 di Hotel Laut Biru, Pantai Barat Kabupaten Pangandaran pada 29-30 April 2019. Namun demikian, serikat pekerja/ serikat buruh lebih menginginkan audiensi dibandingkan sarasehan: “Berkontribusi tidak? itu hanya habisin anggaran aja dimanfaatkan untuk buruh dengan bahasa sarasehan. Apakah menjadi wadah buruh untuk mengajukan aspirasi ke pemerintah? jadi, kita kalau lebih aktualnya kalau kita mengadakan audiensi. Itu lebih mengena, kalau sarasehan itu porsinya tujuannya untuk buruh tetapi isinya kurang gitu” (Iyus, komunikasi personal, 21 Desember 2020)

Operasi preventif Polrestabes Bandung dilakukan melalui *cyber troops* dalam kontra narasi di media sosial dan berita. Media sosial dijadikan alat untuk mendatangkan massa aksi. Hal ini ditandai dengan massa aksi yang tidak memahami alasan datang pada hari buruh 2019. Selain itu, kepolisian juga melakukan kontra opini melalui media sosial anarko sindikalis. Sedangkan kemampuan *take down* (menutup akses) berada ditingkat Polda/Mabes) (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

#### **4.2.2.4. Strategi Penegakkan Hukum**

Polrestabes Bandung memegang peranan utama dalam penegakan hukum pada demonstrasi hari buruh 2019 di Kota Bandung. Demonstrasi di kantor pemerintahan Jawa Barat, Gedung Sate merupakan wilayah operasi Polrestabes Bandung. Hal ini berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2019 bahwa operasi ditingkat Polres diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dan Polda bertindak sebagai *back up*. Permintaan

*back up* didasari oleh perkiraan intelijen bahwa konflik akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh kesatuan wilayah setempat.

Polrestabes Bandung berkoordinasi dengan TNI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada Mayday 2019. TNI bersifat *back up* sehingga diturunkan apabila keadaan terdesak. Berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2019, permintaan bantuan TNI merupakan upaya untuk memelihara situasi kamtibmas intensitas dan skala besar. Pada 1 Mei 2019, Polri dan TNI mengikuti apel siaga yang berisi *Technical Work Game (TWG)* yang dipimpin oleh Kapolrestabes sehingga memahami titik pengamanan (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Penegakkan Hukum dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini didasari oleh fungsi kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat. Personil kepolisian dapat melakukan Diskresi kepolisian dalam kondisi darurat (*urgent*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didasari oleh Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu bertindak sesuai wewenangnya dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.

Kepolisian melakukan penggundulan dan pengecekan terhadap massa aksi yang terjaring pada hari buruh 2019 untuk menimbulkan efek jera. Pihak yang diwawancarai peneliti mayoritas setuju dengan tindakan penggundulan merupakan pendekatan polisi untuk menimbulkan efek jera. Aksi penggundulan ini sempat disoroti oleh Komnas HAM tetapi telah diselesaikan melalui keterangan dari penanggungjawab aksi buruh 2019, Roy Jinto bahwa tindakan tersebut bukan masalah karena untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2021).

Kepolisian sudah memahami resiko di lapangan apabila cenderung dilihat dari sudut pandang negatifnya. Berkaca pada hal tersebut, kepolisian

juga melakukan kontra opini melalui aparat kepolisian yang ahli hukum dan humas (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020). Aksi represif pemerintah dan kepolisian tidak dilatarbelakangi ketakutan terhadap komunisme. Aksi represif dilakukan karena paham dan pergerakannya vandalisme yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan vandalisme meluas. Selain itu, urjensi aksi represif adalah menjaga kondusifitas dan keamanan Kota Bandung. Penangkapan yang dilakukan telah berkoordinasi dengan ahli hukum, mentor anarko, dan aktor intelektual (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020). Selain itu, Kesbangpol Kota Bandung dan Kesbangpol Jabar mempertegas bahwa pemerintah tidak takut terhadap komunisme.

Terdapat perbedaan jumlah peserta aksi yang terjaring pada aksi peringatan hari buruh 2019. Berdasarkan data yang tersebar di media, jumlah massa yang ditangkap adalah 619 orang yang 293 diantaranya merupakan anak-anak (Bernie, 2019). Berbeda dengan data Polrestabes Bandung yang berjumlah 561 orang yang 223 diantaranya adalah pelajar. Namun demikian, data yang benar adalah dari Polrestabes Bandung tetapi mungkin ada yang didata Polda sebagian.(Anto, komunikasi personal, 30 Januari 2021). Selain itu, peserta aksi tidak ada yang ditahan tetapi semuanya dipulangkan setelah 1X24 jam (Anto, komunikasi personal, 11 Februari 2021)

Berdasarkan pendataan kepolisian, peserta aksi tidak memiliki tuntutan terkait buruh tetapi hanya ingin-ramai-ramai saja. Selain itu, kepolisian masih memandang anarko sindikalis bukan suatu ancaman asalkan tidak mengganggu fasilitas umum dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, kepolisian tidak melarang adanya aktivitas gerakan sosial yang dilakukan pemuda di Bandung. (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

#### 4.2.2.5. Strategi Pemulihan

Pemulihan dilakukan oleh berbagai elemen diantaranya kepolisian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, institusi pendidikan, dan orang tua. dilakukan dengan bekerjasama dengan orang tua dan Dinas Pendidikan. Pemulihan adalah suatu kondisi untuk memulihkan kondisi yang terganggu agar kembali seperti keadaan normal. Kepolisian melakukan pendekatan moral. Kepolisian membebaskan peserta aksi yang dijemput orang tuanya sedangkan yang tidak dijemput diantarkan ke orang tua sekaligus sekaligus meminta dukungan orang tua untuk mengawasi anaknya. Selain itu, kepolisian juga mengirimkan data ke Dinas Pendidikan agar turut membantu kepolisian dalam membina dan mencegah pelajar agar tidak terlibat terpengaruh melakukan aksi anarkis. Polrestabes memandang pendekatan melalui orang tua efektif karena dapat langsung melakukan penekanan kepada anak (Anto, komunikasi personal, 2020). Berikut merupakan pernyataan salah satu pihak yang terjaring pada peringatan hari buruh 2019:

aku dianter polisi ke rumah. Kata polisi ke orang tua “kalau bisa jangan lagi ikut-ikutan soalnya gak semua organisasi itu bagus” intinya gitu. Jadi, bisa lebih ngeliat aja mana organisasi bagus, lihat apa yang kamu lakuin terus akibatnya apa aja. Gitu mulai dikontrol juga anaknya, mulai diajarin juga jangan sampe ikut ke hal yang gak baik (Febri, komunikasi personal, 17 Januari 2021).

Pasca kerusuhan hari buruh 2019, Pemerintah Jawa Barat memiliki Program Ajegan Masuk Sekolah (AMS) untuk menangkal radikalisme. Pemerintah Jawa Barat merencanakan adanya Ajegan Masuk Sekolah (AMS) yang mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti termasuk penangkalan anti pemerintah (anarko) (Anjani, 2020, h. 16). AMS merupakan program yang langsung berada di bawah Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun demikian, program Ajegan Masuk Sekolah terhenti akibat pandemic Covid-19 (Aan, komunikasi personal, 1 Februari 2021).

Organisasi kemasyarakatan menginisiasi dan membuat spanduk penolakan anarko. Spanduk tidak dibuat oleh Pemerintah tetapi organisasi masyarakat (Dedi, komunikasi personal, 13 Januari 2021). Namun demikian, pembuatan spanduk merupakan upaya agar tidak terjadi kekisruhan sehingga Bandung tetap kondusif (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).



**Gambar 4.19. Spanduk Penolakan Aksi Anarkis di Kota Bandung**

Sumber: dokumentasi peneliti (2020)

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Hari Buruh 2019 di Kota Bandung**

##### **4.3.1.1. Pelabelan Anarko Sindikalis**

Aksi anarkis pada peringatan hari buruh di Gedung Sate telah terjadi sejak tahun 2017. Massa aksi melakukan aksi vandalisme dan kerusuhan. Akan tetapi, peringatan hari buruh 2019 masif disoroti karena adanya pergesekan antara buruh dan aktor anarko sindikalisme secara langsung berupa vandalisme kendaraan di Monumen Perjuangan Bandung. (Roy Jinto, komunikasi personal, 2021). Terdapat empat alasan penyebutan anarko sindikalis yaitu a. pendekatan 2019 lebih masif dibandingkan tahun 2017 karena mengambil alih berbagai unjuk rasa di Bandung, b. memang sudah menargetkan tahun 2019 dan memandang penangkapan anggota merupakan konsekuensi dari ideologi yang diyakini, c. menargetkan dan telah berkonsolidasi dengan kota-kota besar, serta d.

meleburnya anarko anti-gerakan buruh dan anarko gerakan buruh (Muradi, komunikasi personal, 24 November 2020).

Kalangan pelajar menjadi massa aksi dominan yang terjaring pada peringatan hari buruh 2019. Ancaman potensial asimetris melalui operasi informasi memiliki dampak yang mirip dengan senjata nuklir (Katoch, 2010, p. 99). Pihak sekolah memandang sikap media yang menyudutkan siswa sebagai bullying sosial. Padahal, pendidikan di Indonesia bertujuan membentuk *good citizenship*. Tindakan siswa seharusnya dipandang dari sisi tingginya kepedulian, kesadaran politik siswa, dan terpanggil karena orangtuanya buruh (Hardianto, komunikasi personal, 23 Desember 2020). Namun, disisi lain, ada juga pihak yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa cenderung didesain karena anak dibawah umur hanya boleh ditahan 1X24 jam dan tidak membawa identitas baik KTP/ kartu pelajar saat aksi (Roy Jinto, komunikasi personal, 11 Desember 2020).

#### **4.3.1.2. Anarko Sindikalis Diminati Kalangan Intelektual dan Masyarakat di Kota-Kota Besar**

Anarko sindikalis menggunakan pendekatan asimetris untuk menjangkau kalangan pemuda dan masyarakat perkotaan. Dalam konsep peperangan asimetris, pihak yang lemah cenderung unggul pada aspek mobilitas dan fleksibilitas karena pihak yang kuat cenderung mempertahankan kondisi tetap, konservatif dan menginginkan pertarungan tertentu (Thornton, 2011, p. 3). Kondisi ini tampak dari taktik pendekatan yang cair, horizontal, tidak terpaku pada tokoh tertentu, dan pembangunan nilai ideologi dengan santai mengikuti tren (gaya terbaru) anak muda termasuk media mural, music, dan zine. Kemudian digiring pada aksi militant melalui partisipasi dan penghargaan pendapat. Oleh karena itu, anarko merupakan ancaman politik ideologi yang membutuhkan penanganan ekstra (Polrestabes Bandung, 2019).

Anarko sindikalis cerdik dalam memanfaatkan media sosial untuk menggiring dukungan populasi. Wehr dan Bartos mengatakan bahwa

solidaritas kelompok didorong oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin, dan semangat perlawanan. Solidaritas ini kemudian membentuk organisasi dan mobilisasi massa untuk memenangkan konflik (Susan, 2014, h. 51). Aktor anarko sindikalis membawa bendera lambang pada peringatan hari buruh 2019 tetapi sulit dibedakan karena massa aksi berkumpul (Febri, komunikasi personal, 17 Januari 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan anggota Polrestabes Bandung, Anto bahwa “pada saat aksi, hanya mengenal kelompoknya saja tetapi tidak mengenal kelompok lainnya (termasuk tidak mengetahui tujuan kehadiran dan atribut yang digunakan). Akan tetapi, pada saat berhadapan dengan polisi kelompok anarko yang tidak mengenal tersebut bersatu” (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

Anarko sindikalis berkembang di kalangan pelajar dan masyarakat perkotaan. Durkheim membagi masyarakat dalam masyarakat mekanik dan masyarakat organik. Masyarakat organik adalah masyarakat yang bergerak atas dasar kebutuhan sebagai masyarakat modern (Susan, 2014, h. 30). Kondisi ini mengakibatkan anarko sindikalis cenderung berkembang di Kota Besar. Kaum anarkis umumnya terdidik, dengan akses informasi luas, dan sepenuhnya sadar akan jalan yang mereka pilih. Penganut anarkisme memahami ide-ide anarkis melalui membaca atau kesenian kemudian langsung berjejaring (Cahyana, 2019). Kecenderungannya berada di Kota karena tiga hal yaitu hidup di kelas menengah atas (suka membaca), dalam posisi transformasional (kondisi hitam atau putih), dan memiliki waktu untuk membandingkan dan memperkirakan masa depan dan sekarang. (Muradi, komunikasi personal, 24 Desember 2020)

#### **4.3.1.3. Agitasi Politik dan Pengenalan Paham Anarko Sindikalis**

Pergerakan anarko sindikalis ditimbulkan oleh keinginan serikat pekerja/serikat buruh untuk masuk dalam pemerintahan atau parlemen. Gerakan buruh sudah bergeser pada *new labour* yang tidak berkuat pada masalah upah atau hubungan industrial tetapi gerakan politik praktis

maupun makro (Zuhdan, 2014). Berdasarkan konsep anarko sindikalis, pergerakan revolusioner hanya dapat dicapai oleh pekerja yang bebas dari subordinasi pemerintah dan partai politik (Rocker, 2017, hh. 200-202). Oleh karena itu, muncul pertentangan anarko sindikalis dengan vandalisme “lawan serikat elite”, pencoretan mobil serikat buruh pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.

Anarko sindikalisme merupakan ancaman nonmiliter. Pada hakikatnya, ancaman merupakan setiap usaha dari dalam negeri dan luar negeri untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara, ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor non militer bedimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, dan keselamatan umum. Peneliti berpandangan bahwa, anarko sindikalis merupakan ancaman non militer yang berdimensi ideologi, sosial, dan teknologi.

- a. Dimensi Ideologi. Anarko sindikalisme merupakan salah satu ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ideologis dapat berupa kekerasan dan anarkis yang dilakukan kelompok-kelompok berpaham radikal dengan alasan keagamaan atau golongan politik fundamental anti kemapanan (Kementerian Pertahanan RI, 2014, h. 31). Anarko sindikalis merupakan organisasi yang terikat pada kedekatan ideologi, keyakinan politik, dan menganggap negara tidak ada (Muradi, komunikasi personal, 24 November 2020).

Anarko dipengaruhi oleh pemikiran Bakunin sehingga tidak mengenal organisasi tetapi kolektif (Appridzani Syahfrullah, komunikasi personal, 17 November 2020). Anarko memiliki pola dan strategi insureksi (aksi langsung) meliputi tahapan persiapan aks, pembagian tim, dan aksi. Aksi vandalisme dan kekerasan tetap dipertahankan sebagai bentuk *repertoire* bahwa gerakan masih ada dan menimbulkan keterkejutan kepada otoritas

negara dan aparat keamanan (Fikri, komunikasi personal, 19 November 2020). Tujuan aksi kekerasan adalah mempengaruhi siklus capital dan psikologi pasar bukan dari tingkat kekerasan dan kriminalitasnya (Putra, 2017, h.230).

- b. Dimensi Sosial. Ancaman dimensi sosial ini ditandai dengan permasalahan keadilan dan pemerataan (Kementerian Pertahanan RI, 2014, h. 35). Anarko hadir dilatarbelakangi kejelian membaca ketidakhadiran negara dan isu kesejahteraan masyarakat sipil (Fikri, komunikasi personal, 19 November 2020). Kondisi ini berkaitan juga dengan misi kelima pemerintah Jawa Barat 2018-2023: “meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil”. Namun demikian, apabila negara mampu memenuhi kesejahteraan dan kepastian tidak menghilangkan anarko sindikalis tetapi hanya membuatnya tidak populer.

Kondisi ini dapat dikaitkan dengan gerakan sosial di Bandung. Gerakan Sosial Pasar Gratis yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan menolak konsumerisme. Kemudian, aksi kamisan yang mengkritik tidak diselesaikannya pelanggaran HAM, dan Forum Juang Tamansari Melawan yang hendak melawan kesewenang-wenangan pemerintah. Bila berkaca dari anarkisme di internasional, terdapat beberapa lokasi yang menerapkan anarkisme walaupun tidak sempurna seperti masyarakat Christiania Denmark yang mengatur komunitas sendiri secara musyawarah dan polisi tidak memiliki peran, anarkis Rojava yang ikut berperang melawan ISIS, dan keberhasilan Mondragon Corporation Spanyol yang pengambilan keputusan dan struktur gaji paling demokratis (Cahyana, 2019).

- c. Dimensi Teknologi. Penggunaan media sosial memudahkan aktor anarko sindikalis memobilisasi massa. Ancaman dimensi teknologi juga berkaitan dengan penggunaan jejaring media sosial

yang menyebarkan informasi tendensius pembentuk opini salah yang mendorong gerakan sosial bermotif politik (Kementerian Pertahanan RI, 2014, h. 37). Anarko menggunakan media sosial merupakan salah satu metode peperangan asimetris. Media sosial digunakan aktor peperangan asimetris untuk menggunakan operasi psikologis untuk mendapatkan dukungan populasi terutama pihak yang lemah dan terpinggirkan untuk memperkuat pemikiran keburukan politik negara dan membangkitkan sikap anti-pemerintah (Katoch, 2010, p. 102). Media sosial berupa whatsapp dan facebook paling cepat untuk menanamkan sikap anti pemerintah (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020). Hal ini seperti aktivitas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang melakukan *blow up* (meledakkan) informasi tentang benturan antara kepolisian dan buruh serta ajakan merusak di media sosial. Selain itu menunjukkan bahwa keburukan pemerintah dan tujuan positif gerakan. Informasi ini dijadikan alat mendatangkan massa aksi walaupun banyak massa aksi yang setelah ditangkap tidak memahami alasan datang pada hari buruh 2019 (Anto, komunikasi personal, 2 Desember 2020).

#### **4.3.1.4. Kegiatan Anarko Sindikalis di Kota Bandung**

Anarko sindikalis tidak hanya dianut oleh kalangan buruh. Prinsip yang digunakan dalam pergerakan buruh adalah solidaritas pekerja (*workers solidarity*), aksi langsung (*direct action*), dan manajemen mandiri buruh (*workers self-management*). Pada perkembangannya, anarko sindikalis juga berkembang di kalangan seniman, aktivis kampus, dan kaum miskin kota. Namun demikian, kelompok anarko sindikalis seringkali dimanfaatkan oleh kelompok anarkis lainnya dalam pergerakan massa melawan negara, pemerintah, atau lainnya (Ali, 2013, h. 19). Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa anarko sindikalis dimanfaatkan dan

memanfaatkan melalui provokasi media sosial terkait itu buruh dan rumah deret Tamansari. (Anto, komunikasi personal, 10 Februari 2021)

Nilai-nilai anarko sindikalis tercermin melalui gerakan sosial di Bandung. Kebangkitan anarko sindikalisme didorong oleh faktor keterasingan pemuda terhadap kehidupan kota yang konsumeristik, struktur negara yang menindas, TAP MPR 1965 yang melarang pendirian partai komunis, dan kegagalan gerakan negara komunis otoritarian dan semakin menguatnya anarkisme (Putra, 2018, h. 235). Hal ini terwujud dari gerakan sosial seperti pasar gratis yang melawan konsumerisme dan kapitalisme dan ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Kemudian aksi kamisan yang mengkritik pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan dan menuntut ruang-ruang demokrasi yang selalu dibungkam. Sedangkan Tamansari Melawan yang menunjukkan kepedulian terhadap sikap kesewenang-wenangan yang dibuat pemerintah kota Bandung dan membantu rakyat yang tertindas.

Gerakan sosial tidak dapat disamaratakan berpaham anarko sindikalis. Media cenderung *gebyah uyah* (menyamarkan) padahal anarko di Indonesia cenderung merujuk pada isu buruh tetapi isu penindasan masyarakat kecil (Fikri, komunikasi personal, 18 November 2020). Selain itu, Dosen UGM, A.B. Widyatama menyatakan bahwa anarkisme bukanlah gerakan tunggal karena ada yang menggunakan kekerasan dan ada yang anti terhadap kekerasan sedangkan vandalisme bertujuan memperoleh perhatian publik. Namun demikian, anarko sindikalis tidak pernah menganjurkan vandalisme (Cahyana, 2019).

Anarko sindikalis tidak akan padam walaupun kesejahteraan dipenuhi oleh pemerintah. Hakikat negara kesejahteraan adalah kesadaran warga negara terhadap hak-hak yang dimilikinya sedangkan negara diberi mandat memenuhi kebutuhan hak-hak warga negara (Suharto, 2008, h. 58). Masour Fakhri menyatakan bahwa anarkisme tidak akan padam karena kecenderungan alami manusia untuk memberontak atas tekanan hidup (Putra, 2017, hh. 234-236). Namun demikian, aliran pemikiran hilang tetapi

tidak populer dan berpotensi digunakan kembali sebagai alternatif gerakan menghadapi kapitalis dan konsumerisme (Fikri, komunikasi personal, 16 November 2020).

#### **4.3.2. Strategi Pemerintah Jawa Barat dalam Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Hari Buruh 2019.**

##### **4.3.2.1. Strategi Deteksi Intelijen**

Anarkisme dinyatakan sebagai salah satu tantangan Indonesia tahun 2021. Guru Besar Intelijen dan Hukum, Jendral Hendropriyono menyatakan terdapat 4 tantangan bagi Indonesia tahun 2021 yaitu anarkisme, *organize crime* (kriminalitas terorganisir), separatism, dan subversi. Anarkisme akan dimanfaatkan oleh orang-orang sakit hati, orang yang tidak mendapat tempat, dan tidak kebagian kue dalam pemerintahan Jokowi (Hendropriyono, 2021). Hal ini sejalan dengan potensi dan arah gerakan bernegosiasi di kalangan elite walaupun secara prinsipnya anti otoritas terutama lembaga negara dan agama (Fikri, komunikasi personal, 19 November 2020).

Keberhasilan strategi peperangan asimetris ditandai oleh dukungan populasi yang biasanya digunakan melalui media. Aktor anarko sindikalis berkembang tidak hanya dikalangan buruh tetapi juga seniman, aktivis kampus, dan akum miskin kota melalui *tabing* (kursus politik informal) diberbagai tempat terutama emperan pertokoan dan kolong jembatan (*fly over*) (Ali, 2013, h. 20). Kondisi ini sejalan dengan deteksi kepolisian bahwa anarko seringkali berkumpul di Taman Pasopati yang letaknya berada di bawah *fly over* Pasopati Bandung

Kepolisian sulit mengantisipasi gerakan anarko sindikalis yang selalu berubah-ubah. Dalam aksinya, dalam praktik asimetris pihak yang lemah cenderung unggul pada aspek mobilitas dan fleksibilitas karena pihak yang kuat cenderung mempertahankan kondisi tetap, konservatif dan menginginkan pertarungan tertentu (Thornton, 2011, p. 3). Hal ini dipraktikkan anarko yang setiap aksinya menggunakan metode yang

berubah-ubah, taktik *black bloc*, dan provokatif untuk menguatkan solidaritas dalam menghadapi represifitas polisi.

#### 4.3.2.2. Strategi Pre-emptive

Anarko merupakan orang-orang yang paham terhadap teknologi dan memiliki kemampuan menguasai media sosial sehingga mampu mendiskusikan dan mendialetiskan situasi terkini dan fenomena dunia (Appridzani Syahfrullah, komunikasi personal, 17 November 2020). Aktor asimetris (*asymmetric warrior*) cenderung terdidik, *techno-savvy* (paham banyak terhadap teknologi modern khususnya komputer), dapat mengeksploitasi *cyber space*, dan dapat bergabung dengan lingkungan perkotaan (*urban milieu*) (Katoch, 2010, p. 96). Merespon hal tersebut, Polrestabes Bandung sudah memiliki satuan *cyber troops* yang akan membantu dalam mengatasi konten-konten anti pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan pemerintah harus fleksibel, memahami cara berpikir dan beroperasi, asal inspirasi, dan kepentingan anarko sindikalis.

Strategi untuk mengalahkan aktor peperangan asimetris dilakukan dengan pengurangan kredibilitas melalui media. Globalisasi mempermudah aktor anarko sindikalis untuk melakukan operasi psikologis untuk memperoleh dukungan populasi. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi kredibilitas aktor anarko sindikalis melalui media. (Katoch, 2010, p. 102) Namun demikian, Pemerintah kesulitan dalam melakukan kontra narasi terhadap whatsapp: “kemudian *whatsapp* itu sulit karena orang yang membikannya bahwa whatsapp tidak bisa di hack. Itu salah satu kendalanya karena harus melalui penggandaan nomor telepon tetapi sulit juga kalau misalnya untuk mendapatkan whatsapp grup apa” (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020).

#### 4.3.2.3. Strategi Preventif

Pemerintah Jawa Barat berupaya mengubah konsep peringatan hari buruh 2019 yang selalu dikatakan rusuh melalui program *Demo Creation*

*Labour* (DCL). Strategi pemerintah harus dilakukan secara fleksibel dan adaptif dalam menghadapi lingkungan strategis dan menciptakan sinergitas antara *ends* (objektif), *ways* (konsep strategis), dan *means* (sumber daya) (Yarger, 2006, p. 42). Namun demikian, program *DCL* yang dijadikan wadah penyampaian aspirasi buruh secara damai dan kreatif belum efektif karena masih adanya unjuk rasa di Gedung Sate yang kemudian diinfiltrasi oleh anarko sindikalisme.

Kota Bandung merupakan lokasi strategis karena ibukota Jawa Barat, lokasi sekretariat DPD Serikat Buruh Jawa Barat, dan lokasinya berdekatan dengan ibukota negara (Jakarta). Strategi tidak bersifat prediktif tetapi antisipatif dan proaktif. Strategi diperoleh melalui fakta, asumsi, dan kemungkinan. Ahli strategi dapat melakukan upaya paksaan (*coercive*) atau ajakan (*persuasive*) menggunakan *instrument of power* untuk mencapai tujuan nasional (Yarger, 2006, p. 67). Tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusifitas dan keamanan di Kota Bandung pada peringatan hari buruh 2019. Kepolisian berperan dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Sumber daya (*means*) yaitu Polrestabes Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertugas untuk menjaga kondusifitas di Kota Bandung. Polrestabes Bandung membentuk Tim Prabu yang berada di bawah kendali bagian operasi untuk melakukan patrol di daerah yang dianggap rawan untuk mencegah tindakan pidana.

Konsep strategis (*strategic concept*) dilakukan berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2019. Polrestabes Bandung dapat meminta *back up* kepada Polda Jabar apabila dalam keadaan terdesak dan meminta bantuan TNI dalam situasi kamtibmas dalam skala besar. Kapolrestabes Bandung berperan sebagai ahli strategi yang akan mempertimbangkan, memprioritaskan, dan menetapkan *instrument power* yang utama (dominan) dan sekunder (*subordinate*) yang disesuaikan dengan lingkungan strategis dan tujuan strategis. Hal ini dibahas dalam apel siaga

bersama antara Polri dan TNI tentang *Technical Work Game* (TWG) agar memahami titik pengamanan

#### 4.3.2.4. Strategi Penegakkan Hukum

Sikap represif kepolisian pada peringatan hari buruh 2019 cenderung tidak disetujui oleh pemerintah, serikat buruh, dan masyarakat. Dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemerintah bertanggungjawab dalam melindungi hak asasi manusia, asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan tindak hukum terhadap pelaku yang melakukan aksi vandalisme (Appridzani Syahfrullah, komunikasi personal, 17 November 2020).

Konsolidasi gerakan dilakukan berdasarkan musyawarah secara desentralisasi dan kemudian disebarkan melalui media sosial. Aktor anarko sindikalis cenderung terdidik, *techno-savvy* (paham banyak terhadap teknologi modern khususnya komputer), dapat mengeksploitasi cyber space, dan dapat bergabung dengan lingkungan perkotaan (*urban milieu*) (Katoch, 2010, p. 96). Aksi vandalisme dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai anarko sindikalisme. Pelajar menjadi aktor dominan terjaring pada peringatan hari buruh 2019 karena masih labil dan ingin senang-senang saja. Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Barat belum bisa mendeteksi tokoh penggeraknya karena organisasi liar (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2021).

Indonesia menganut bentuk pemerintahan demokrasi. Penganut anarkisme memandang demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau rakyat yang memerintah daerah mereka sendiri (*self government*) (Putra, 2018). Pemikiran anarko sindikalisme berorientasi pada menjaga kekuatan sosial yang kreatif sehingga perkembangan intelektual dan sosial berjalan baik (Rocker, 2017, h. 33). Oleh karena itu, diperlukan adanya peranan dari intelektual progresif untuk memberikan pendidikan terutama kalangan pelajar agar tidak terasa digurui.

Aksi penggundulan tidak akan membuat jera. Aktivis anarko sindikalis yang digunduli bahkan terkena pukul, terlempar, dibawa ke kantor polisi, dan diinterogasi tidak akan jera justru bangga karena dapat diceritakan kepada juniornya (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020). Namun demikian, dari massa aksi yang ikut-ikutan cenderung jera. Oleh karena itu, pendekatan moral melalui orang tua dan Dinas Pendidikan dapat efektif terutama kepada simpatisan anarko sindikalis.

#### **4.3.2.5. Strategi Pemulihan**

Pemerintah mengkonotasikan radikal terhadap paham anti-Pancasila. Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis (ideologi Pancasila) dan fisik (kemampuan bela negara yang tinggi) (Kementerian Pertahanan RI, 2014, hh. 74-75). Serikat pekerja/serikat buruh belum pernah mengikuti program bela negara tetapi pendidikan terkait ideologi Pancasila dan Lemhannas (bagi pemimpin serikat pekerja/serikat buruh). Penanaman nilai Pancasila penting untuk disesuaikan dengan arus globalisasi sehingga nilai kebudayaan dan kearifan lokal tidak luntur serta memiliki kebanggaan terhadap Indonesia (Erry Gandana, komunikasi personal, 1 Desember 2020). Oleh karena itu, program bela negara baik bagi buruh, pelajar, mahasiswa, maupun elemen masyarakat lainnya dapat menjadi salah satu senjata psikis pemerintah dalam lingkup pertahanan negara. Tujuannya adalah masyarakat yang tidak mudah terprovokasi dan turut membantu pemerintah dalam melawan paham anarko sindikalis.

Pendidikan moral dapat melalui pendidikan politik di tingkat sekolah. Pendidikan politik diperlukan agar siswa tidak mudah di provokasi oleh kelompok/pribadi yang berkepentingan politik (Dedi, komunikasi personal, 13 Januari 2021). Pesatnya perkembangan teknologi informasi turut mendorong adanya persamaan pengetahuan antara siswa dan mahasiswa (Appridzani Syahfrullah, komunikasi personal, 17 November 2020). Oleh karena itu, pelibatan intelektual progresif untuk melakukan kontra wacana

secara pertimbangan psikologis lebih efektif untuk melakukan pendekatan dengan kalangan pelajar agar tidak terkesan digurui (Fikri, komunikasi personal, 19 November 2020).

Pemerintah sudah memandang anarko sindikalis sebagai radikal. Radikal dari perspektif pemerintah yaitu bertentangan dengan Pancasila (Aan, komunikasi personal, 22 Desember 2020). Wehr dan Bartos mengatakan bahwa solidaritas kelompok didorong oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin, dan semangat perlawanan. (Susan, 2014, h.51). Oleh karena itu, gerakan sosial seperti Forum Juang Tamansari Bandung, Aksi Kamisan, dan Pasar Gratis walaupun mengkritik negara penting untuk dikaji dan tidak bisa disamaratakan beraliran anarko sindikalis. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan gerakan dan kelompok secara hati-hati dari sampai simpul terkecil (desa/kelurahan) melalui pelatihan dari akademisi bagi pegawai Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), dan Bhabin (Pembinaan Ketertiban dan Keamanan) (Fikri, komunikasi personal, 19 November 2020).

Penyediaan layanan dasar berkaitan dengan *welfare state*. *Welfare state* adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peranan besar kepada negara dalam sistem jaminan sosial secara terencana, terlembaga, dan berkesinambungan. Penyediaan layanan dasar karena ormas atau kelompok seperti anarko memiliki kejelian dalam membaca ketidakhadiran negara dan isu-isu kesejahteraan di masyarakat sipil (Fikri, komunikasi personal, 19 November 2020). Kondisi ini menjadi salah satu pendorong munculnya gerakan pasar gratis dengan slogan “negara tidak peduli, kita harus saling membantu”. Gerakan ini merupakan bentuk protes terhadap negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan ketimpangan sosial.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1. Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Peringatan Hari Buruh 2019**

Anarko sindikalis menggunakan pendekatan asimetris untuk menanamkan nilai-nilai ideologinya. Sasaran populasinya adalah pemuda, masyarakat perkotaan, dan rakyat terpinggirkan. Narasi anti-pemerintah dilakukan melalui media sosial, vandalisme, dan budaya tren (gaya modern) anak muda yang cair dan tidak ingin diatur. Selain itu, gerakan bersifat terorganisir dan mudah digiring oleh aktor berkepentingan khususnya isu yang menempatkan pada posisi bertentangan dengan negara.

##### **5.1.2 Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung**

Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan berbagai elemen diantaranya pemerintahan, masyarakat, TNI, Polrestabes Bandung dan orang tua. Tujuannya adalah menciptakan kondusifitas dan keamanan di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan meliputi deteksi intelijen, pre-emptif, preventif, penegakkan hukum, dan pemulihan. Namun demikian, strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif menghadapi gerakan anarko sindikalis yang liar, taktik berubah-ubah, dan terbentuknya simpatisan anarko sindikalis tidak terprediksi.

## 5.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan terhadap strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris adalah:

### a. Teoretis

Ancaman anarko sindikalis sudah dideteksi dini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kepolisian termasuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- 1) Universitas Pertahanan sebagai rekomendasi tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam strategi menghadapi ancaman asimetris dari anarko sindikalis.
- 2) Akademisi sebagai rujukan penelitian berikutnya yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu terciptanya strategi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman asimetris anarko sindikalis.

### b. Secara praktis, peneliti merekomendasikan strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi ancaman anarko sindikalis secara optimal yaitu:

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat: kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sejalan dengan misi ke-5 Gubernur-Wakil Gubernur 2018-2023 yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat: pendekatan moral dan pendidikan politik melalui intelektual progresif sehingga tidak terkesan digurui.
- 3) Kementerian Pertahanan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat: penanaman nilai bela negara sebagai

senjata psikis agar tidak terprovokasi bahkan menjadi senjata untuk melawan paham anarko sindikalis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ali, As'ad Said. (2013). *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metode, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Creswell, John. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dolman, Everett Carl. (2005). *Pure Strategy: Power and Principle in the Space and Information Age*. Abingdon: Taylor & Francis e-Library.
- Herdiansyah, Haris. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Katoch, P.C. (2010). Asymmetric Warfare. In D. Singh, *Intelligence, Security, and Asymmetric Warfare* (pp. 93-104). New Delhi: Manas Publication.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan RI*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Mirsel, Robert. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Novianto, Arif. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik terhadap Gerakan Moral. In A. d. Pramusinto, *Indonesia Bergerak 2: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016* (hh. 195-227). Yogyakarta: MKP-MAP Fisipol UGM.
- Pureklolon, Thomas Tokan. (2016). *Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Bima Satria. (2018). *Peperangan yang Tidak akan Kita Menangkan: Anarkisme & Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948)*. Yogyakarta: CV Fajar Utama Offset.
- Rocker, Rudolf. (2017). *Anarko Sindikalisme: Filsafat Radikal Kaum Pekerja*. Salatiga: Pabel.

- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susan, Novri. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suseno, Franz Magnis. (2010). *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. SUN.
- Thornton, Rod. (2011). *Asymmetric Warfare: Threat and Response in The Twenty-First Century*. Malden: Polity Press.
- Tim Penyusun Unhan. (2019). *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Bogor: Unhan Press.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018. (2018). *Fungsi Teknis Intelijen Keamanan*. Jakarta: Badan Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2018.
- Yarger, Harry. R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. United State: United State Government.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

**Sumber Tesis:**

- Zukhrufah Dien Ardlillah. (2017). *Fenomena Subkultur Punk di Kota Bandung dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Gerakan Front Anti Fasis 2015-2016)*. Program Magister Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

**Sumber Jurnal:**

- Anjani, Kirana. (2020). "Kaus Hitam dan Paranoia Negara: Stigmatisasi dan Pelanggaran Hak Kelompok Anarko-Sindikalis". *Lokataru Foundation*, 1-20.

- Hendrastomo, Grendi. (2010). "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi". *Jurnal Informasi*, 1-17.
- Kiswanto, Eddy. (2005). "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 91-108.
- Lopulalan, Victor Jacob Lucas, Djoko Andreas Novalino, dan Moch. Rofiq. (2017). "Penerapan Komunikasi Sosial (Komsos) dalam Mendeteksi dan Mencegah Aksi Terorisme di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 59-75.
- Tim Peneliti SMERU. (2002). "Hubungan Industrial di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat". Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Zuhdan, Muhammad. (2014). "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah "Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia"". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 272-290.

#### **Sumber Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan  
UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian  
Pendapat di Muka Umum

#### **Sumber Instansi Penelitian:**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (2021). Informasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Tahun 2020 (Data Pertanggal 1 Januari 2021). Bandung: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. (2019). Daftar Nama-Nama Pengunjuk Rasa yang Diamankan pada saat Demo Hari Buruh Tanggal 01 Mei 2019. Bandung: Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.

Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. (2019). Mengenal Anako. Bandung: Kepolisian Resort Kota Besar Bandung

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat. (2019). *Anarcho Syndicalism di Jawa Barat*. Bandung: Kepolisian Daerah Jawa Barat.

**Sumber Internet:**

- Adhey. (2019). "Kapolres Bandung: May Day Kondusif, Agar Orang Lain Menikmati Hari Libur". Retrieved from Pojoksatu.id: <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/05/01/kapolres-bandung-may-day-kondusif-agar-orang-lain-menikmati-hari-libur/>, diakses pada 23 September 2020
- Admin Bandung.go.id. (2016). "Sekilas Sejarah Kota Bandung". Retrieved from Bandung.go.id: <https://portal.bandung.go.id/sekilas-sejarah-kota-bandung>, diakses 15 November 2020
- Bappeda Provinsi Jawa Barat. (2019). "Ridwan Kamil Kukuhkan Pengurus LKS Tripartit Jabar 2018-2021". Retrieved from <http://bappeda.jabarprov.go.id/>: <http://bappeda.jabarprov.go.id/ridwan-kamil-kukuhkan-pengurus-lks-tripartit-jabar-2018-2021/>, diakses pada 24 September 2020
- Bappenas. (2011). "Bab 9 Pertahanan dan Keamanan". Retrieved from Bappenas.go.id: [https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/bab-9-pertahanan-dan-keamanan\\_20111025152402\\_3351\\_9.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/bab-9-pertahanan-dan-keamanan_20111025152402_3351_9.pdf), diakses pada 29 Januari 2021
- Bernie, M. (2019). "KontraS Laporkan Kekerasan Polisi Saat May Day ke Komnas HAM". Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kontras-laporkan-kekerasan-polisi-saat-may-day-ke-komnas-ham-dF9o>, diakses 22 Oktober 2020
- Cahyana, Budi. (2019). "Memahami Anarko-Sindikalis: Berdasarkan Penuturan Figur Sentral Gerakan dan Penjelasan dari Pengamat". Retrieved from Harian Jogja: <https://news.harianjogja.com/read/2019/05/10/500/991178/memahami-anarko-sindikalis-berdasarkan-penuturan-figur-sentral-gerakan-penjelasan-dari-pengamat>, diakses 31 Januari 2021
- Dinillah, Mukhlis. (2019). "Jejak Vandalisme Massa 'Hitam-hitam' di Aksi May Day Bandung". Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/foto-news/d-4533123/jejak-vandalisme-massa-hitam-hitam-di-aksi-may-day-bandung/1>, diakses pada 23 September 2020
- Edupublik Jabar. (2019). "Imbas May Day di Bandung, Dua Pewarta Dipiting & Foto Dihapus Polisi". Retrieved from Edupublik Jabar: <http://www.edupublikjabar.com/2019/05/01/imbasmaydaydi-bandung-dua-pewarta-dipiting-foto-dihapus-polisi/>, diakses 22 Januari 2021

- Fisandra, H. B. (2019, Mei 15). "Polisi Dilaporkan Komnas HAM Terkait Kekerasan di Hari Buruh". Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1205703/polisi-dilaporkan-ke-komnas-ham-terkait-kekerasan-di-hari-buruh/full&view=ok>, diakses 10 Februari 2021
- Fardiensyah, Achmad. (2016). "Kapan Unjuk Rasa Buruh Anarkis?" Retrieved from Oke News: <https://megapolitan.okezone.com/read/2016/04/29/338/1376045/kapan-unjuk-rasa-buruh-anarkis>, diakses 25 September 2020
- Heryana, Ade. (2018). "Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif". Retrieved from Researchgate: [https://www.researchgate.net/publication/329351816\\_Informan\\_dan\\_Pemilihan\\_Informan\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif), diakses 4 November 2020
- Humas Bappeda Jabar. (2019). "May Day is a Creative Day". Retrieved from Bappeda Provinsi Jawa Barat: <http://bappeda.jabarprov.go.id/may-day-is-a-creative-day/>, diakses 22 Januari 2021
- Jaringan Radio Komunitas Indonesia. (2008, April 24). "Hari Anti-Kapitalisme". Retrieved from JKRI: <https://jrki.wordpress.com/2008/04/24/hari-anti-kapitalisme/>, diakses 11 Februari 2020
- Kotakita.com. (2016). "Kota Bandung Meliputi 30 Kecamatan". Retrieved from Kotakita.com: <http://info-kotakita.blogspot.com/2016/05/kota-bandung-meliputi-30-kecamatan.html>, diakses 16 November 2020
- Lazuardi, Iqbal Tawakal. (2019). "Mengintip Anarko Sindikalis yang Mencuat Setelah Hari Buruh". Retrieved from TEMPO.CO.: <https://fokus.tempo.co/read/1202387/mengintip-anarko-sindikalis-yang-mencuat-setelah-hari-buruh>, diakses pada 28 Juli 2020
- Liputan6. (2001). "Pemerintah Dinilai Lambat Menyelesaikan Kasus Buruh". Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/12220/pemerintah-dinilai-lambat-menyelesaikan-kasus-buruh>, diakses 25 September 2020
- Matanasi, Petrik. (2020). "Sejarah Orde Baru Melarang Peringatan Hari Buruh". Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-orde-baru-melarang-peringatan-hari-buruh-ePji>, diakses pada 25 Juli 2020
- Nainggolan, Robinsar. (2019). "Kelompok Anarko: Kami Bukan Pelaku Kriminal!". Retrieved from Law-Justice.co: [https://www.law-](https://www.law-justice.co/)

[justice.co/artikel/67175/kelompok-anarko-kami-bukan-pelaku-kriminal/](https://justice.co/artikel/67175/kelompok-anarko-kami-bukan-pelaku-kriminal/), diakses 8 November 2020

Pemerintah Kota Bandung. (2017). "Kondisi Geografi Kota Bandung". Retrieved from Portal Resmi Kota Bandung: <https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/14/njnv-KONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf>, diakses 14 November 2020

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2019). "Buruh Netral Dalam Pilpres". Retrieved from [jabarprov.go.id: https://jabarprov.go.id/index.php/news/31817/Buruh\\_Netral\\_Dalam\\_Pilpres](https://jabarprov.go.id/index.php/news/31817/Buruh_Netral_Dalam_Pilpres). diakses 9 Oktober 2020

Prasetyo, F. A. (2018, Juni 29). "Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung". Retrieved from [Kampungnesia.org: http://kampungnesia.org/berita-rudetnya-rumah-deret-tamansari-bandung.html](http://kampungnesia.org/berita-rudetnya-rumah-deret-tamansari-bandung.html), 25 Januari 2020

Pratiwi, G. (2018). "Hari Buruh 2018, Ini Seruan Aksi Pekerja di Bandung dan Jakarta". Retrieved from [Pikiran Rakyat: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01296543/hari-buruh-2018-ini-seruan-aksi-pekerja-di-bandung-dan-jakarta-423643](https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01296543/hari-buruh-2018-ini-seruan-aksi-pekerja-di-bandung-dan-jakarta-423643), diakses 25 September 2020

Persiana, G. (2019, April 29). "Hari Buruh 2019, KSPSI Jabar Tuntut 3 Permintaan Ini pada Pemerintah". Retrieved from [IDN Times Jabar: https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/hari-buruh-2019-kspsi-jabar-tuntut-3-permintaan-ini-pada-pemerintah/4](https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/hari-buruh-2019-kspsi-jabar-tuntut-3-permintaan-ini-pada-pemerintah/4), 22 Januari 2021

*Political Compass*. (n.d.). "Political Compass" Retrieved from <https://knowyourmeme.com/photos/1614316-political-compass>, diakses 30 Januari 2021

Puspita, R. (2019, Mei 2). "Polri Petakan Kelompok Anarko Sindikalisme di Indonesia". Retrieved from [Republika.co.id: https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/05/02/pqva7f428-polri-petakan-kelompok-anarko-sindikalisme-di-indonesia](https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/05/02/pqva7f428-polri-petakan-kelompok-anarko-sindikalisme-di-indonesia), diakses 22 Januari 2021

Redaksi KSN. (2019, April 29). "GERAK – Bandung: Kita Semua Adalah Buruh!". Retrieved from [ksn.or.id: http://ksn.or.id/gerak-bandung-kita-semua-adalah-buruh/](http://ksn.or.id/gerak-bandung-kita-semua-adalah-buruh/), 29 Januari 2021

Simbolon, H. (2019, April 30). "Jalan Tanpa Joget-Joget". Retrieved from *Liputan 6*:

<https://www.liputan6.com/regional/read/3953197/mayday-buruh-di-bandung-akan-turun-ke-jalan-tanpa-joget-joget>, 22 Januari 2021

Tempo.co. (2017, Mei 1). "Kelompok Berbaju Hitam Lakukan Perusakan saat May Day Bandung". Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/871254/kelompok-berbaju-hitam-lakukan-perusakan-saat-may-day-bandung/full&view=ok>, diakses 20 November 2020

Tim detik.com. (2019). "Tentang Anarcho-Syndicalism yang Gerakkan Massa Baju Hitam di Hari Buruh". Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4532993/tentang-anarcho-syndicalism-yang-gerakkan-massa-baju-hitam-di-hari-buruh>, diakses 16 Februari 2020

Wahyono, Edi. (2020). "Anarko Sindikalis dan Jejak Anarkisme di Indonesia". Retrieved from Detik X: <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20201013/Anarko-Sindikalis-dan-Jejak-Anarkisme-di-Indonesia/>, diakses 17 Oktober 2020

#### **Sumber Non Cetak dan Film:**

Fristian Griec. (News Anchor). 21 Juni 2020. Kompas TV Live: Jakarta

Bonnie Triyana. (Pemimpin Redaksi Historia.ID. 2020. Jejak Sejarah Gerakan Anarko di Indonesia. PT Media Digital Historia, Jakarta.

A. Sudrajat. (Presenter). 6 Januari 2021. FPI, CIA, dan Nasib Papua: Jakarta

## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian

		<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI</b> <b>UNIVERSITAS PERTAHANAN</b> Terakreditasi BAN-PT "A"
Nomor	: B/2020/XI/2020	Bogor, 25 November 2020
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	Kepada
		Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat
		di
		Bandung

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Talolo Muara NIM. 120190102014, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pemerintah Kota Bandung Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019)*".

3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisioner. *Contact Person*: e-mail: [talolo.muara@idu.ac.id](mailto:talolo.muara@idu.ac.id) dan HP. 082120055596.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warak III Bid. Kerjasama dan Kelembagaan Unhan


  
Benny Rijanto Rudy S., M.B.A  
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN**  
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : *BI 2752-IXI/2020*  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, *9* November 2020

Kepada  
Yth. Kepala Polrestabes Bandung  
di  
Bandung

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Kepala Polrestabes Bandung, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Talolo Muara NIM. 120190102014, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pemerintah Kota Bandung Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalisis dalam Perpektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019)*".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisioner. *Contact Person*: e-mail: [talolo.muara@idu.ac.id](mailto:talolo.muara@idu.ac.id) dan HP. 082120055596.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.



a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

*Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., MA., M.Sc., CIQnR., CIQaR*  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN**  
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : *BJ 2702/IX/2020*  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 9 November 2020

Kepada

Yth. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik  
(Bakesbangpol) Kota Bandung

di

Bandung

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Talolo Muara NIM. 120190102014, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pemerintah Kota Bandung Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perpektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hari Buruh 2019)*".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisioner. *Contact Person*: e-mail: [talolo.muara@idu.ac.id](mailto:talolo.muara@idu.ac.id) dan HP. 082120055596.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.



a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Karo Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., MA., M.Sc., CIQnR., CIQaR  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pedoman Wawancara untuk Masyarakat dan Akademisi.**

#### **Means**

1. Siapa saja yang dikategorikan buruh? apakah hanya pekerja kasar atau termasuk kalangan manajer dan pemimpin perusahaan?
2. Kapan pertama kali digunakan anarko sindikalisme? apakah baru semakin masif diklaim sejak hari buruh 2019?
3. Apa latar belakang terpapar anarko sindikalisme? Apa berkaitan dengan kegagalan negara menjalankan fungsi kesejahteraan? Kemudian apa latar belakang kemunculan organisasi pemuda informal?
4. Apa anarko sindikalisme mendapat dukungan internasional (bantuan atau pergerakan) pada hari buruh 2019? Adakah bantuan dari aktor dalam negeri untuk pendanaan atau memiliki usaha kolektif?
5. Siapa saja kalangan yang terpapar anarko sindikalisme? Apakah mahasiswa menjadi sumber utama anggota penganut anarko sindikalisme? Apakah hal ini yang mengakibatkan trend di Kota Pendidikan dibandingkan Kota Industri?
6. Apakah terdapat ciri-ciri dan atribut khusus kelompok anarko sindikalisme?
7. Apa saja isu konflik sosial dan kekecewaan yang dimanfaatkan untuk mobilisasi sikap anti-pemerintah pada peringatan hari buruh 2019? Mengapa tidak hanya memfokuskan diri pada isu seputar buruh?
8. Bagaimana pandangan terkait anarko sindikalisme diasumsikan sebagai kenakalan remaja, dorongan aktualisasi diri kalangan pemuda terutama dalam momentum hari buruh? Respon terhadap penangkapan 619 peserta aksi yang 293 orang diantaranya anak-anak?
9. Adakah tokoh yang dijadikan panutan/inspirasi dalam pergerakan anarko sindikalisme di Indonesia? Apakah terdapat akademisi/ aktivis yang berperan dalam mengadvokasi? Bagaimana memupuk solidaritas kelompok?
10. Bagaimana efektivitas aksi vandalisme dan kekerasan yang dilakukan anarko sindikalisme? apakah dipandang positif atau hanya sekedar menunjukkan keberadaannya?
11. Apa yang dikritik dari buruh, serikat buruh, dan pemerintah?
12. Anarko Sindikalisme apakah gerakan kiri atau kanan?

#### **Ways**

1. Bagaimana peran media sosial dan perkembangan teknologi dalam memobilisasi massa? Bagaimana menciptakan kesadaran eksploitasi dan penindasan oleh pemilik modal/serikat buruh/pemerintah?
2. Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat? apakah melalui kerusuhan atau media sosial untuk menyerang psikologis dan emosi masyarakat? Apakah terdapat penanaman nilai-nilai bela negara di pabrik dan sekolah/ universitas di Kota Bandung?

3. Bagaimana tabing/ kurus politik informal dilakukan?
4. Bagaimana komunikasi atau pertemuan dengan jejaring anarko sindikalisme di Kota Bandung dan lintas kota? Apakah pada momen/ agenda tertentu saja? Hal ini dikaitkan dengan organisasi tanpa kepala/ketua (*anephalous*).
5. Bagaimana penganut anarko sindikalisme menyusup dalam gerakan buruh? Apakah telah berkoordinasi dengan buruh/ serikat buruh?
6. Apakah praktik pemogokkan massal dan sabotase alat produksi masih dipraktikkan untuk mengajukan tuntutan pada hari buruh?
7. Teknik komunikasi politik efektif untuk mobilisasi massa secara spontan dan tanpa terorganisir pada peringatan *mayday* 2019? Apakah dilakukan melalui sosial/ pertemuan informal?
8. Bagaimana pandangan terhadap adanya perjuangan memperoleh tuntutan buruh melalui jalur parlemen atau bergabung dengan pemerintahan (contoh: Pertemuan Jokowi dan Serikat Buruh pada 26 April 2020)? Apakah melemahkan atau melumpuhkan perlawanan buruh atau bahkan berdampak positif bagi buruh?
9. Apakah perjuangan buruh relatif melemah pasca reformasi? Hal ini dikarenakan masih terpecahnya tujuan dari buruh itu sendiri?
10. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan penindasan yang terjadi di masyarakat?
11. Apakah serikat buruh berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan buruh dan sesuai dengan kebutuhan buruh?
12. Apakah penetapan hari buruh sebagai hari libur nasional menjadi salah satu faktor pergeseran gerakan buruh dari gerakan sosial menjadi gerakan politik?

### **Ends**

1. Apa kepentingan penganut anarko sindikalisme terhadap aksi vandalisme dan kekerasan di Kota Bandung?
2. Bagaimana respon masyarakat umum terhadap pergerakan sosial anarko sindikalisme?
3. Apa saja upaya meningkatkan kesejahteraan buruh ditambah dengan kondisi Covid-19 berupa PHK, perumahan buruh, dan pelemahan ekonomi?
4. Apakah upaya represif pemerintah efektif dalam menghilangkan paham anarko sindikalisme? Apakah surat edaran imbauan penolakan anarko sindikalisme efektif? Kalau tidak bagaimana upaya pemerintah seharusnya?
5. Saran dan program yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan buruh dan masyarakat untuk meminimalisir adanya pergerakan sosial pada hari buruh?

## **Pedoman Wawancara untuk Pemerintah**

### **Means**

1. Siapa saja yang dikategorikan buruh? apakah hanya pekerja kasar atau termasuk kalangan manajer dan pemimpin perusahaan?
2. Apa latarbelakang pemerintah menyatakan bahwa anarko sindikalis terlibat dalam pengerusakan dan vandalisme aksi buruh 2019? Mengapa baru dinyatakan demikian padahal sejak 2017 telah terjadi aksi serupa yang diinisiasi oleh GERAK (Gerakan Rakyat Anti Kapitalis)? Sejak kapan pemerintah menangkap adanya aktivitas dari penganut anarko sindikalis?
3. Apakah Bandung merupakan episentrum (pusat) dari anarko sindikalisme di Indonesia? Atau ini dikarenakan media cenderung menyorot kasus di Bandung?
4. Bagaimana efektivitas aksi vandalisme dan perusakan fasilitas publik dalam menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah atau hanya sekedar menunjukkan eksistensi? Bagaimana reaksi masyarakat terhadap aksi anarko sindikalis?
5. Apakah penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional menjadi momentum pergerakan politik? Hal ini dikaitkan dengan isu yang diangkat tidak sekedar isu buruh tetapi juga isu lain diantaranya pembebasan Papua dan penggusuran perumahan Tamansari Bandung?
6. Mengapa latar belakang terpapar anarko sindikalisme? Siapa saja pihak yang terpapar? Mengapa justru lebih populer di Kota Pendidikan dibandingkan Kota Industri?
7. Bagaimana respon Pemerintah terhadap adanya kegiatan pemuda yaitu tabing/kursus politik informal melalui kegiatan perpustakaan jalanan, pasargratis, penyebaran zine? Apakah hal ini dikarenakan kurangnya ruang kreativitas bagi pemuda?
8. Bagaimana pandangan pemerintah tentang pernyataan keterlibatan pemuda merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau aktualisasi diri? Respon terhadap penangkapan 619 peserta aksi yang 293 orang diantaranya anak-anak? Bagaimana pemerintah mendorong keterlibatan orang tua dan pendidikan moral anak?
9. Apakah terdapat tokoh atau pergerakan inspiratif anarko sindikalis di Indonesia? Bagaimana kelompok anarkis berhubungan antar daerah?
10. Adakah keterkaitan pergerakan anarko sindikalisme dengan jejaring internasional baik secara pergerakan maupun pendanaan pada hari buruh 2019? Adakah bantuan dari aktor dalam negeri untuk pendanaan atau memiliki usaha kolektif?
11. Apakah terdapat atribut khas dari kelompok anarko sindikalisme pada aksi hari buruh 2019 maupun kehidupan bermasyarakat?

### **Ways**

1. Apa saja program yang dilakukan pemerintah untuk mencegah ketidakkondusifan hari buruh 2019? Bagaimana kerjasama antara

- perangkat daerah, pengusaha, dan serikat buruh dalam melakukan upaya komunikasi persuasif dan peningkatan kesejahteraan buruh?
2. Apakah terdapat rapat koordinasi antar Pimpinan Daerah Kota dan Provinsi termasuk Kepolisian dan TNI dalam menghadapi peringatan hari buruh 2019?
  3. Apakah terdapat penanaman nilai-nilai bela negara di pabrik dan sekolah/ universitas di Kota Bandung?
  4. Perkembangan teknologi merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Bagaimana pemerintah menghadapi cepatnya arus propaganda melalui media sosial, penggunaan sandi-sandi tertentu dari anarko sindikalis, dan anarkisme yang organisasinya bersifat tanpa bentuk?
  5. Apa pemerintah mengetahui akun media sosial yang digunakan untuk menanamkan sikap anti pemerintah? Apakah telah dilakukan patrol siber, deteksi dini, dan cegah dini? Apakah kendala yang dihadapi?
  6. Bagaimana Pemerintah memanfaatkan *pers/media* massa untuk membentuk *public sphere* (mendorong partisipasi publik)? Bagaimana efektivitas pemasangan spanduk penolakan anarko sindikalisme?
  7. Apa saja kelemahan atau celah strategi pemerintah yang mengakibatkan aksi buruh 2019 diciderai oleh aksi anarko sindikalisme?
  8. Bagaimana pemerintah memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki (aparatur, masyarakat, ormas dan akademisi) untuk menghadapi anarko sindikalisme?
  9. Apakah urgensi sikap represif pemerintah (kepolisian) terhadap demonstran di Bandung seperti halnya penggundulan ataupun pemukulan? Apakah upaya tersebut efektif dalam menjerakan aktor anarko sindikalis?

### **Ends**

1. Bagaimana strategi dan pendekatan pemerintah yang efektif dalam menghadapi paham anarko sindikalis?
2. Bagaimana pemerintah menciptakan keamanan dan ketertiban dari aksi yang diinisiasi oleh kelompok anarko sindikalis?
3. Apakah pemenuhan kesejahteraan buruh dan pemenuhan tuntutan demonstran akan menghilangkan pemikiran anarko sindikalis?
4. Apakah urgensi Pemerintah untuk melakukan aksi represif terhadap anarko sindikalisme? Adakah trauma terhadap kemunculan kembali komunisme?
5. Apa upaya dan program yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan buruh dan masyarakat untuk meminimalisir adanya pergerakan sosial pada hari buruh?

## **Pedoman Wawancara untuk TNI/Polri**

### **Means**

1. Siapa saja yang dikategorikan buruh? apakah hanya pekerja kasar atau termasuk kalangan manajer dan pemimpin perusahaan?
2. Apa latarbelakang pemerintah menyatakan bahwa anarko sindikalis terlibat dalam pengerusakan dan vandalisme aksi buruh 2019? Mengapa baru dinyatakan demikian padahal sejak 2017 telah terjadi aksi serupa yang diinisiasi oleh GERAK (Gerakan Rakyat Anti Kapitalis)? Sejak kapan pemerintah menangkap adanya aktivitas dari penganut anarko sindikalis?
3. Apakah Bandung merupakan episentrum (pusat) dari anarko sindikalisme di Indonesia? Atau ini dikarenakan media cenderung menyorot kasus di Bandung?
4. Bagaimana efektivitas aksi vandalisme dan perusakan fasilitas publik dalam menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah atau hanya sekedar menunjukkan eksistensi? Bagaimana reaksi masyarakat terhadap aksi anarko sindikalis?
5. Apakah penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional menjadi momentum pergerakan politik? Hal ini dikaitkan dengan isu yang diangkat tidak sekedar isu buruh tetapi juga isu lain diantaranya pembebasan Papua dan penggusuran perumahan Tamansari Bandung?
6. Mengapa latar belakang terpapar anarko sindikalisme? Siapa saja pihak yang terpapar? Mengapa justru lebih populer di Kota Pendidikan dibandingkan Kota Industri?
7. Bagaimana respon Pemerintah terhadap adanya kegiatan pemuda yaitu tabing/kursus politik informal melalui kegiatan perpustakaan jalanan, pasar gratis, penyebaran zine? Apakah hal ini dikarenakan kurangnya ruang kreativitas bagi pemuda?
8. Bagaimana pandangan pemerintah tentang pernyataan keterlibatan pemuda merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau aktualisasi diri? Respon terhadap penangkapan 619 peserta aksi yang 293 orang diantaranya anak-anak? Bagaimana pemerintah mendorong keterlibatan orang tua dan pendidikan moral anak?
9. Apakah terdapat tokoh atau pergerakan inspiratif anarko sindikalis di Kota Bandung? Bagaimana komunikasi kelompok anarkis di Kota Bandung dan antar daerah?
10. Adakah keterkaitan pergerakan anarko sindikalisme dengan jejaring internasional baik secara pergerakan maupun pendanaan pada hari buruh 2019? Adakah bantuan dari aktor dalam negeri untuk pendanaan atau memiliki usaha kolektif?
11. Apakah terdapat atribut khas dari kelompok anarko sindikalisme pada aksi hari buruh 2019 maupun kehidupan bermasyarakat?

12. Apakah urjensi Pemerintah untuk melakukan aksi represif terhadap anarko sindikalisme? Adakah trauma terhadap kemunculan kembali komunisme?

### **Ways**

1. Program yang dilakukan Polisi/ TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada hari buruh 2019 di Kota Bandung? Apakah terdapat penanaman nilai-nilai bela negara di pabrik dan sekolah/ universitas di Kota Bandung?
2. Perkembangan teknologi merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Bagaimana pemerintah menghadapi cepatnya arus propaganda melalui media sosial, penggunaan sandi-sandi tertentu dari anarko sindikalis, dan anarkisme yang organisasinya bersifat tanpa bentuk untuk menanamkan sikap anti pemerintah? Apakah TNI/Polri mengetahui akun media sosial yang digunakan untuk propaganda tersebut? Apa upaya deteksi dini dan cegah dini yang dilakukan Kodim 0618, Polrestabes Bandung, dan Polda Jabar? Apa kendala yang dihadapi?
3. Bagaimana Pemerintah memanfaatkan *pers/media* massa untuk membentuk *public sphere* (mendorong partisipasi publik)? Bagaimana efektivitas pemasangan spanduk penolakan anarko sindikalisme? Bagaimana TNI/Polri memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki (aparatur, masyarakat, ormas dan akademisi) untuk menghadapi anarko sindikalisme?
4. Apakah urjensi sikap represif pemerintah (kepolisian) terhadap demonstran di Bandung seperti halnya penggundulan ataupun pemukulan? Bagaimana respon terhadap pelanggaran HAM dan perlindungan anak dibawah umur? Apakah upaya tersebut efektif dalam menjerakan aktor anarko sindikalis?

### **Ends**

1. Bagaimana strategi dan pendekatan yang efektif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam menghadapi hari buruh 2019? Apakah terdapat rapat koordinasi antar Pimpinan Daerah Kota dan Provinsi termasuk Kepolisian dan TNI dalam menghadapi peringatan hari buruh 2019?
2. Apakah keterlibatan anarko sindikalisme telah diprediksi? Bagaimana pemerintah menciptakan keamanan dan ketertiban dari aksi yang diinisiasi oleh kelompok anarko sindikalis?
3. Apakah pemenuhan kesejahteraan buruh dan pemenuhan tuntutan demonstran akan menghilangkan pemikiran anarko sindikalis?
4. Apa upaya dan strategi yang sebaiknya diterapkan dalam menghadapi paham anarko sindikalis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada hari buruh 2019 dan selanjutnya?

### **Pedoman Wawancara Untuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Means**

1. Siapa saja yang dikategorikan buruh? apakah hanya pekerja kasar atau termasuk kalangan manajer dan pemimpin perusahaan?
2. Kapan pertama kali digunakan anarko sindikalisme? Mengapa diklaim sebagai anarko sindikalisme padahal pada tahun 2017 sudah mulai terjadi aksi kekerasan dan vandalisme yang diinisiasi oleh GERAK?
3. Apa anarko sindikalisme mendapat dukungan internasional (bantuan atau pergerakan) pada hari buruh 2019? Adakah bantuan dari aktor dalam negeri untuk pendanaan atau memiliki usaha kolektif?
4. Siapa saja kalangan yang terpapar anarko sindikalisme? Apakah mahasiswa menjadi sumber utama anggota penganut anarko sindikalisme? Apakah hal ini yang mengakibatkan trend di Kota Pendidikan dibandingkan Kota Industri?
5. Apakah terdapat ciri-ciri dan atribut khusus kelompok anarko sindikalisme? Respon terhadap adanya penangkapan beberapa pemuda karena memiliki buku berideologi kiri diantaranya Soekarno dan Tan Malaka?
6. Apa saja isu konflik sosial dan kekecewaan yang dimanfaatkan untuk mobilisasi sikap anti-pemerintah pada peringatan hari buruh 2019? Mengapa tidak hanya memfokuskan diri pada isu seputar buruh?
7. Bagaimana pandangan terkait anarko sindikalisme diasumsikan sebagai kenakalan remaja, dorongan aktualisasi diri kalangan pemuda terutama dalam momentum hari buruh?
8. Adakah tokoh yang dijadikan panutan/inspirasi dalam pergerakan anarko sindikalisme di Indonesia? Apakah terdapat akademisi/ aktivis yang berperan dalam mengadvokasi? Bagaimana memupuk solidaritas kelompok?
9. Bagaimana efektivitas aksi vandalisme dan kekerasan yang dilakukan anarko sindikalisme? apakah dipandang positif atau hanya sekedar menunjukkan keberadaannya?
10. Apa yang dikritik dari buruh, serikat buruh, dan pemerintah?

### **Ways**

1. Bagaimana peran media sosial dan perkembangan teknologi dalam memobilisasi massa? Bagaimana menciptakan kesadaran eksploitasi dan penindasan oleh pemilik modal/serikat buruh/pemerintah?
2. Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat? apakah melalui kerusuhan atau media sosial untuk menyerang psikologis dan emosi masyarakat?
3. Bagaimana tabing/ kurus politik informal dilakukan seperti perpustakaan jalanan maupun pasar gratis?
4. Bagaimana komunikasi atau pertemuan dengan jejaring anarko sindikalisme di Kota Bandung dan lintas kota? Apakah pada momen/ agenda tertentu saja? Hal ini dikaitkan dengan organisasi tanpa kepala/ketua (*anephalous*).

5. Bagaimana penganut anarko sindikalisme menyusup dalam gerakan buruh? Apakah telah berkoordinasi dengan buruh/ serikat buruh?
6. Apakah praktik pemogokan massal dan sabotase alat produksi masih dipraktikkan untuk mengajukan tuntutan pada hari buruh?
7. Bagaimana pandangan terhadap adanya perjuangan melalui parlemen atau bergabung dengan pemerintahan apakah melemahkan atau melumpuhkan perlawanan buruh atau bahkan berdampak positif bagi buruh?
8. Apakah perjuangan buruh relatif melemah pasca reformasi? Hal ini dikarenakan masih terpecahnya tujuan dari buruh itu sendiri? Apakah serikat buruh berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan buruh dan sesuai dengan kebutuhan buruh?
9. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan penindasan yang terjadi di masyarakat?
10. Apakah serikat buruh berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan buruh dan sesuai dengan kebutuhan buruh?
11. Apakah penetapan hari buruh sebagai hari libur nasional menjadi salah satu faktor pergeseran gerakan buruh dari gerakan sosial menjadi gerakan politik?

#### **Ends**

1. Bagaimana respon masyarakat umum terhadap pergerakan sosial anarko sindikalisme?
2. Apakah upaya represif pemerintah efektif dalam menghilangkan paham anarko sindikalisme? Apa saja tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah/ kepolisian? Respon terhadap penangkapan 619 peserta aksi yang 293 orang diantaranya anak-anak?
3. Apakah surat edaran imbauan penolakan anarko sindikalisme efektif untuk memobilisasi dukungan masyarakat terhadap pemerintah?
4. Apa upaya dan strategi yang sebaiknya diterapkan Pemerintah, Kepolisian, dan TNI dalam menghadapi paham anarko sindikalisme untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada hari buruh 2019 dan selanjutnya?

## Lampiran Foto Wawancara



Wawancara Bapak Letkol R.Sefi  
Tribiwiyono  
(Mantan Staf Perwakilan Kementerian)



Wawancara Bapak Erry Gandana  
Kepala Sub Bidang Ideologi  
Kesbangpol Kota Bandung



Wawancara Bapak Roy Jinto  
DPD SPSI Jawa Barat



Wawancara Bapak Iyus  
Wakil Ketua I Bidang Organisasi SPN Kota  
Bandung



Wawancara Bapak Hadianto  
Wakil Kepala Sekolah Bidang Dunia  
Industi-Dunia Usaha  
smk Nasional Bandung



Wawancara Lurah Tamansari, Bapak  
Dadang Sobandi (Baju Putih)  
Warga Tamansari RW 11, Bapak Endang  
(Jaket Hitam)



Wawancara Bapak Dedi  
Fasilitator Hubungan Industrial Disnakertrans  
Provinsi Jawa Barat



Wawancara Melalui  
Whatsapp  
dengan Prof Muradi

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Talolo Muara Purba, S.IP. Lahir di Bandung pada 1 Desember 1995. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sahata Purba dan Ibu Pintauli R. Siregar. Menyelesaikan pendidikan SD Santo Yusuf lulus tahun 2007, SMP Santo Yusuf lulus tahun 2010, SMA Santa Maria 2 lulus tahun 2013, dan Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran lulus pada tahun 2017. Skripsi penulis dijadikan jurnal dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov dengan judul “Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta” pada 1 April 2018.

Peneliti memiliki pengalaman bekerja sebelum melanjutkan studi di Universitas Pertahanan. Pada tahun 2018, peneliti bekerja sebagai Media Analisis di PT. Indonesia Indicator yang berlokasi di Tangerang Selatan. Peneliti bertugas dalam membuat laporan baik harian, mingguan, atau bulanan terkait isu seputar politik dan pemerintahan. Peneliti bekerja sebagai Media Analisis di PT. Indonesia Indicator selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2019, peneliti melanjutkan studi Magister Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan pada Agustus 2019. Peneliti melaksanakan sidang akhir tesis pada 15 Februari 2021.